



2025



LAPORAN CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN

TRIWULAN I



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PEMETAAN SASARAN STRATEGIS	1
BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I.....	5
A. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	5
A.1. Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif.....	6
A.2. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif	10
A.3. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	15
B. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	21
B.1. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti.....	22
B.2. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan	29
B.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	35
C. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	40
C.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan yang dimanfaatkan	41
C.2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Materi yang dimanfaatkan 52	
C.3. Persentase Rekomendasi Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	58
D. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	65
D.1. Persentase Tenaga Pengajar Pancasila yang Tersertifikasi.....	66
D.2. Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi.	70
D.3. Persentase Peserta Diklat Berkepribadian Pancasila Dengan Tingkat Baik	75
E. Terlaksananya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.....	81



E.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	81
E.2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	85
E.3. Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan	90
F. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima berbasis Elektronik.....	96
F.1. Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja.....	97
F.2. Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	104
F.3. Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja	121
F.4. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan	129
F.5. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP	136
F.6. Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	143
BAB III REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	151
BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN	154
BAB V PENUTUP	179



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP	3
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	5
Tabel 2. 2 Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	6
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya	7
Tabel 2. 4 Tahapan Penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	8
Tabel 2. 5 Aktivitas Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya	9
Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa	10
Tabel 2. 7 Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan	11
Tabel 2. 8 Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan	12
Tabel 2. 9 Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan	13
Tabel 2. 10 Aktivitas Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa	14
Tabel 2. 11 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila	16
Tabel 2. 12 Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	18
Tabel 2. 13 Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	18
Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	21
Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila	22
Tabel 2. 16 Rekomendasi rancangan produk hukum yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila	23
Tabel 2. 17 Aktivitas Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila	24
Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	29
Tabel 2. 19 Aktivitas Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	33
Tabel 2. 20 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila	35
Tabel 2. 21 Aktivitas Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila	38
Tabel 2. 22 Indikator Kinerja Program Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	41
Tabel 2. 23 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	42



Tabel 2. 24 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	49
Tabel 2. 25 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	52
Tabel 2. 26 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	56
Tabel 2. 27 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	58
Tabel 2. 28 Aktivitas Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	62
Tabel 2. 29 Indikator Kinerja Program Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	66
Tabel 2. 30 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	67
Tabel 2. 31 Aktivitas Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	69
Tabel 2. 32 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	71
Tabel 2. 33 Aktivitas Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	73
Tabel 2. 34 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila	76
Tabel 2. 35 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila	77
Tabel 2. 36 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	79
Tabel 2. 37 Aktivitas Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	80
Tabel 2. 38 Indikator Kinerja Program Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila	81
Tabel 2. 39 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	82
Tabel 2. 40 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengendalian PIP	83
Tabel 2. 41 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	86
Tabel 2. 42 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	88
Tabel 2. 43 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	90
Tabel 2. 44 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila	92
Tabel 2. 45 Indikator Kinerja Program Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik	96
Tabel 2. 46 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja	98
Tabel 2. 47 Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja	101
Tabel 2. 48 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	104



Tabel 2. 49 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi.....	108
Tabel 2. 50 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi.....	117
Tabel 2. 51 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja.....	121
Tabel 2. 52 Aktivitas Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja	126
Tabel 2. 53 Indikator Kinerja Kegiatan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan	129
Tabel 2. 54 Aktivitas Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan	135
Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Kegiatan pengawasan internal di lingkungan BPIP ..	136
Tabel 2. 56 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	139
Tabel 2. 57 Aktivitas Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP	140
Tabel 2. 58 Indikator Keluaran Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	143
Tabel 2. 59 Aktivitas Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	150
Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja	152
Tabel 4. 1 Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya hubungan antar lembaga, Kerja Sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP	154
Tabel 4. 2 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	158
Tabel 4. 3 Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP	161
Tabel 4. 4 Kendala dan Tindak Lanjut Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	165
Tabel 4. 5 Kendala dan Tindak Lanjut Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi PIP.....	168
Tabel 4. 6 Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen	173



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP.....	2
Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total	151
Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program.....	152



DAFTAR ISTILAH

ADKASI	: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ARJUNA	: Akreditasi Jurnal Nasional
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BerAKHLAK	: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BIN	: Badan Intelijen Negara
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BTU	: Buku Teks Utama
CPMK	: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DKT	: Diskusi Kelompok Terpumpun
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
IDEA	: <i>Indonesian E-Commerce Association</i>
IKU	: Indikator Kinerja Utama
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenPANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Medsos	: Media Sosial
MKWK	: Mata Kuliah Wajib Kurikulum
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskbiraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka



PDN	: Pusat Data Nasional
PDP	: Purnapaskibraka Duta Pancasila
PEMDA	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PJK	: Pancasila Jurnal Keindonesiaan
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PN	: Prioritas Nasional
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PSP	: Pusat Studi Pancasila
PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
RAPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	: Rencana Strategis
RO	: Rincian <i>Output</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBKU	: Standar Biaya Keluaran Umum
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SINTA	: <i>Science and Technology Index</i>
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SIPI	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
TTIS/CSIRT	: Tim Tanggap Insiden Siber/ <i>Computer Security Incident Response Team</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UKPBJ	: Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNDANA	: Universitas Nusa Cendana
UNWIRA	: Universitas Katolik Widya Mandira
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Program & Kegiatan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bahwa Kepala dan Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan Capaian Program & Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) terhadap penggunaan anggaran BPIP periode Januari-Maret 2025. Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, mewujudkan Pancasila sebagai leitstar atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia, juga sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam laku hidup rakyat Indonesia.

Jakarta, 17 April 2025

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

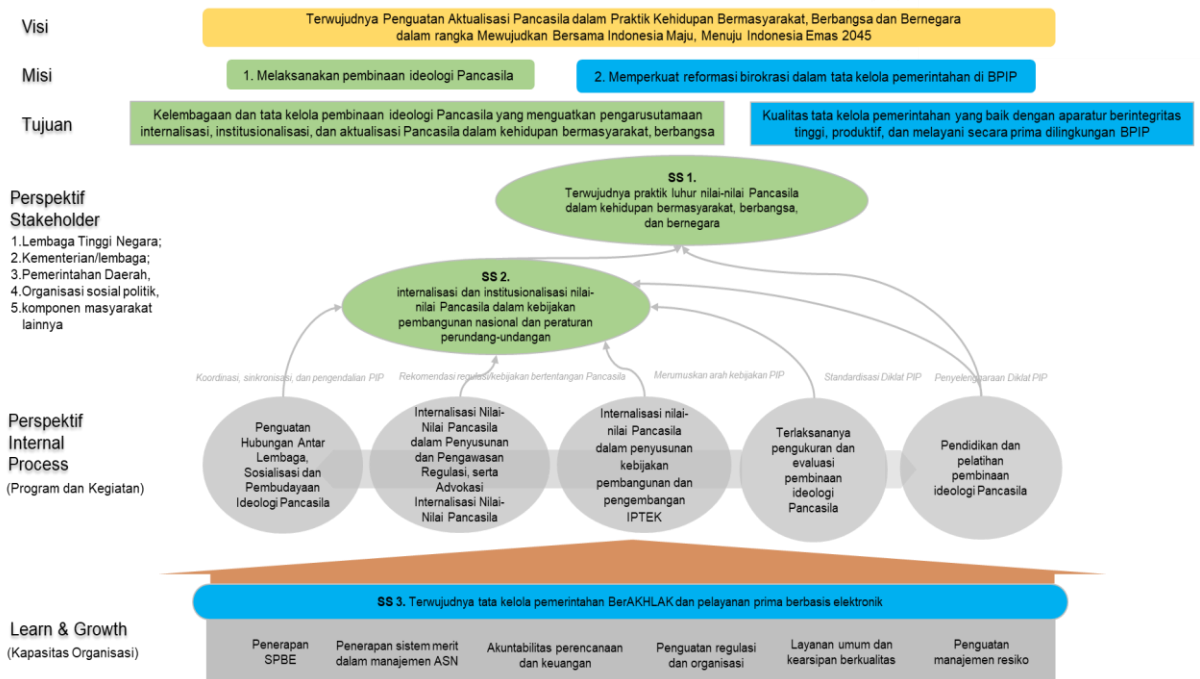
RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dimandatkan dalam Rencana Strategis BPIP 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ketiga sasaran strategis tersebut dapat terwujud dengan dukungan Sasaran Program Kedeputan dan Sekretariat Utama. Sasaran Program dicapai dengan berbagai kegiatan teknis. Hubungan sasaran strategis dan Sasaran Program PIP dipetakan berikut ini:

PETA STRATEGIS BPIP



PETA STRATEGIS BPIP



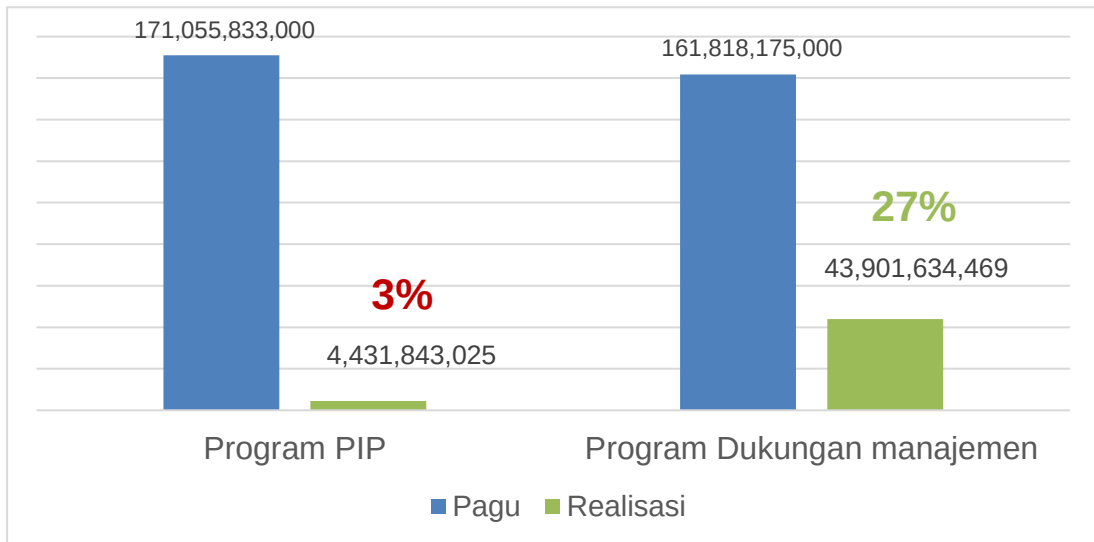
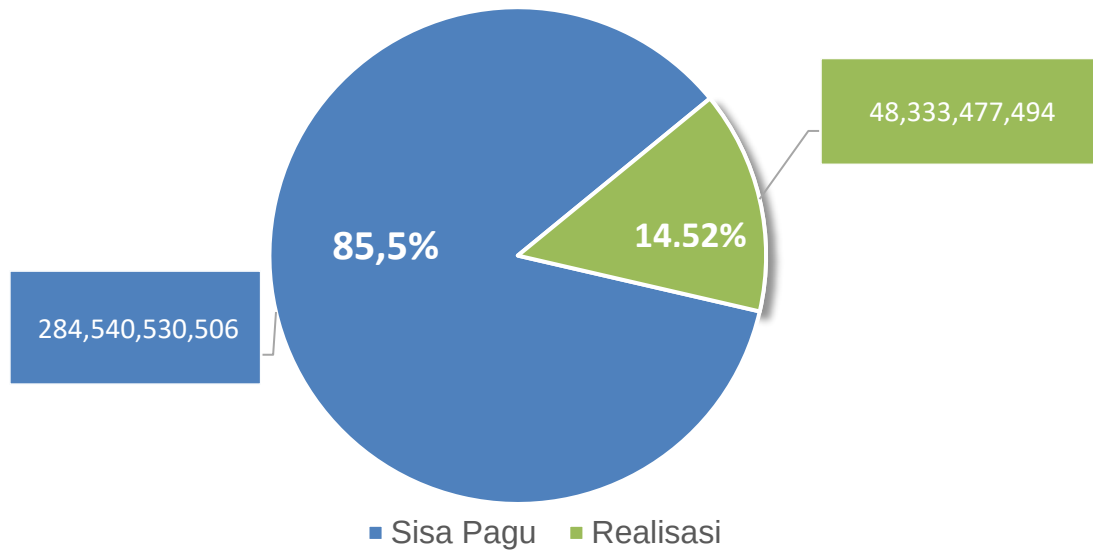
Capaian kinerja sasaran program merupakan kinerja pelaksanaan kegiatan yang melekat pada masing-masing sasaran. Pelaksanaan kegiatan periode Triwulan I Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila;
 - a. Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif dengan capaian 8%;
 - b. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif dengan capaian 20%;
 - c. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif dengan capaian 11,15%.
2. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti dengan capaian 15%;
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan dengan capaian 11%;
 - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 22,5%.
3. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan dengan capaian 22,5%;
 - b. Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan dengan capaian 50%;
 - c. Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan dengan capaian 18,3%.
4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - a. Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi dengan capaian 20% ;
 - b. Persentase lembaga penyelenggara diklat Pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi dengan capaian 26%;



- c. Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik 19,8%;
5. Terlaksananya pengukuran dan evaluasi Pembinaan ideologi Pancasila;
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 28,6%;
 - b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 10%;
 - c. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 25%.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.
 - a. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja dengan capaian 25%;
 - b. Layanan pengawasan intern di lingkungan BPIP dengan capaian 25%;
 - c. layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja dengan capaian 25%;
 - d. Layanan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan dengan capaian 25%;
 - e. Layanan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi dengan capaian 25%;
 - f. Layanan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 25 %.

Pada Triwulan Tahun 2025, berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2025 realisasi anggaran BPIP adalah 14,52% atau sebesar 48.333.477.494,00 dari alokasi pagu DIPA TA 2025 sebesar Rp332.874.008.000,00 Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode Tahun 2025:



Realisasi Anggaran BPIP

Beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025, antara lain adalah (i) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas; (ii) mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang ada untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya; (iii) Menyusun Perpres tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila; (iv) Pembangunan sistem manajemen terintegrasi diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (v) Mendorong Rancangan Undang-Undang BPIP.



Pada Triwulan I Tahun 2025 optimalisasi pelaksanaan kegiatan diupayakan sesuai dengan *timeline* kegiatan, bila terdapat kendala teknis dan non teknis yang ada pada pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan perbaikan sesuai rencana aksi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai guna terus membangun penguatan akuntabilitas kinerja, BPIP akan terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan dengan lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta aturan, arahan dan praktek yang tepat dalam revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.

BAB I

PEMETAAN SASARAN STRATEGIS

Pancasila telah menjadi konsensus para pendiri bangsa sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup yang menaungi tata peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan negara dengan kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan terkonstruksi secara menyebar ke dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila menjadi jiwa dalam tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila selalu menjadi dasar dalam setiap proses pembangunan semenjak Indonesia berdiri. Saat ini sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dalam melaksanakan misi pembangunan Indonesia Emas 2025, kebijakan terkait ideologi Pancasila diarahkan pada:

1. Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara;
2. Pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan, serta penguatan karakter dan identitas bangsa.

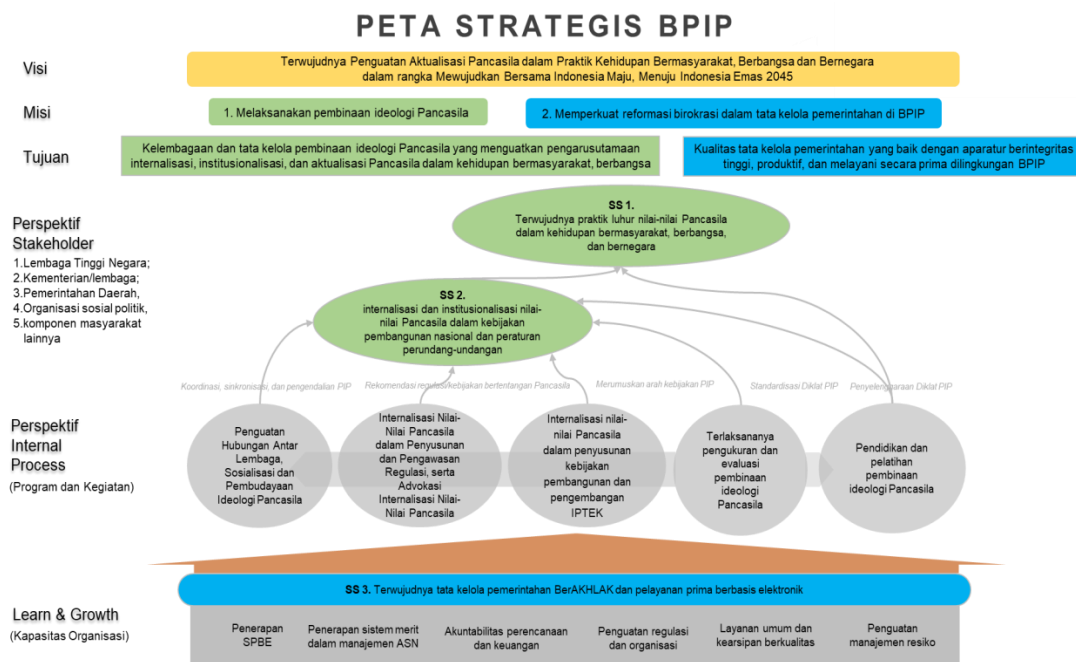
BPIP mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. BPIP dengan program PIP tahun 2025-2029 berfokus pada Asta Cita I atau Agenda Pembangunan Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan program pembangunan

Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional.

Rencana strategis pelaksanaan Program PIP diarahkan mewujudkan 4 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ketiga sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui dukungan Sasaran Program Kedeputian teknis dan Sekretariat Utama dukungan kapasitas organisasi. Sasaran program dicapai dengan berbagai kegiatan. Peta strategis keterkaitan sasaran-sasaran melalui pendekatan perspektif *Stakeholder*, pelaksanaan program dan kegiatan, serta dukungan kapasitas organisasi tampak pada Peta Strategis BPIP berikut ini:



Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP

Tujuan sasaran-sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dipetakan di atas, yaitu:

1. Kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
2. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dilingkungan BPIP;

Ukuran keberhasilan sasaran strategis BPIP adalah, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila	79,37
	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan	Persentase implementasi peta jalan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	40%
Kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi	77,32
		Kategori SAKIP	B

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dilingkungan BPIP	BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik	Nilai Sistem Merit	333
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
		Indeks SPBE	4
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83%

Kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Program PIP dan Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program, yaitu:

1. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila;
2. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
3. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Terlaksananya pengukuran dan evaluasi Pembinaan ideologi Pancasila;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I

A. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Sebagai Lembaga yang diberi mandat dalam PIP maka fungsi koordinasi dan sinkronisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif	100%	8%	 8%
Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif	100%	20%	 20%
Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	100%	11,15%	 11,15%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

A.1. Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif

Indikator Keberhasilan Program:

Target Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 8% (Kinerja anggaran). Jika dilihat perkembangannya selama triwulan pertama di tahun 2025 Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan telah berupaya secara maksimal menjadi salah satu Koordinator dalam memfasilitasi dan menghubungkan kegiatan-kegiatan yang berdampak dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Namun pada Triwulan I ini dukungan Deputi I terhadap capaian IKU tersebut belum efektif. Hal ini dipengaruhi kebijakan efesiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dan program untuk optimalisasi kerja sama pembinaan ideologi Pancasila belum tercapai.

Untuk Triwulan I Tahun 2025 ini upaya telah dilakukan untuk dapat mencapai target tersebut Kedeputian Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Kerjasama, melalui Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama optimalisasi terhadap Organisasi Sosial dan Politik serta Organisasi Masyarakat belum ada mitra kerja. Sedangkan untuk optimalisasi yang dilakukan terhadap K/L/Instansi di Pemerintah Pusat & Daerah sebanyak 2 Mitra. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda
1.	Kementerian Dalam Negeri

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda
2.	Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Kab Samosir)

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	4 Rekomendasi Kebijakan	20%	20% (Tahapan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

Penyusunan dokumen Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila dalam lima tahap yaitu:

Tabel 2. 4 Tahapan Penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda
1.	Penyusunan sistematika (Penentuan metodologi, lokus kajian identifikasi permasalahan pengumpulan data primer/skunder dan studi literasi, penyusunan daftar pertanyaan, pemetaan <i>stake holder</i>)
2.	Pengolahan data, koordinasi dan sinkronisasi <i>stakeholder</i> (penentuan sampling, narasumber)
3.	Pelaksanaan Kajian (diskusi, penyebaran kuisioner, observasi lapangan dan wawancara mendalam)
4.	Perumusan naskah rekomendasi
5.	Finalisasi naskah rekomendasi

Pada Periode Triwulan I Tahun 2025 ini Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama jika dilihat berdasarkan Tahapan untuk menyelesaikan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila masih dalam tahapan pertama, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi sehingga Direktorat Hubungan Antar Lembaga baru dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut yaitu:

1. Koordinasi internal untuk menyusun mekanisme dan alat dalam penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama dengan Lembaga tinggi negara, K/L, Pemda dan Orsospol, serta komponen masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti.
2. Berkoordinasi dengan mitra kerja sama BPIP untuk mendapat gambaran atas kerjasama yang ditindaklanjuti sebagai bahan dalam penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama dengan Lembaga tinggi negara, K/L, Pemda dan Orsospol, serta komponen masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti.

Sehinga dapat disimpulkan capaian pada tahap pertama dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{tahap} \text{ hingga TW I}}{(1 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 20\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

Tabel 2. 5 Aktivitas Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPIP dengan Kementerian Hukum (Jakarta, tanggal 24 Januari 2025)	
2.	Audiensi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) (Jakarta, tanggal 18 Maret 2025)	

A.2. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif

Indikator Keberhasilan Program

Target Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 20% $(30\%+10\%+20\%)/3$ (rata-rata capaian hasil Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif dan Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti)

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif.	Jumlah Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan	7	30%	30% (Layanan)
	Jumlah Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan	5	10%	10% (Layanan)
Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan	1	20%	20% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

a. Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan

Untuk mencapai 7 Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila maka presentase perhitungan saat ini sekitar 30% dengan rincian layanan yaitu:

Tabel 2. 7 Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan

No	Layanan	Keterangan	Output
1.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Politik dan Keamanan	Dalam Proses (1 Kegiatan)	Total 2.000 orang yang dicapai dalam kegiatan masing-masing bidang
2.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Masyarakat	Dalam Proses	
3.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Perekonomian	Dalam Proses	
4.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Dalam Proses (1 Kegiatan)	
5.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Dalam Proses	
6.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dalam Proses (1 Kegiatan)	
7.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Pangan	Dalam Proses	

Hingga triwulan I kegiatan yang sudah dilakukan untuk memenuhi 3 Output dimaksud yaitu:

1) Sosialisasi Pancasila Bidang Politik dan Keamanan

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pelajar bekerjasama dengan BNPT di Kabupaten Tasikmalaya: “Memperkuat Semangat Kebangsaan dengan Spirit Pancasila dan Ramadhan untuk Mewujudkan Generasi Muda Berkarakter Pancasila”	Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 13 Maret 2025	300 peserta komponen Masyarakat, Pemda, dan Pelajar secara luring

2) Sosialisasi Pancasila Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Wilayah Purwokerto "Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa"	Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 24 Maret 2025	300 peserta mahasiswa dan pelajar secara luring

3) Sosialisasi Pancasila Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masyarakat Pesisir dan Nelayan: "Memperkuat Ideologi Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa" di Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta	Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, pada tanggal 26 Maret 2025	300 peserta unsur nelayan dan masyarakat maritim secara luring

b. Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan

Untuk mencapai 5 Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila maka presentase perhitungan saat ini sekitar 10% dengan rincian layanan yaitu:

Tabel 2. 8 Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan

No	Layanan	Keterangan	Output
1.	Layanan Komunikasi PIP di Televisi Nasional / Swasta	Dalam Proses (1 Audiensi)	50.000 jangkauan orang yang dicapai dalam program masing-masing bidang
2.	Layanan Komunikasi PIP di Radio Nasional/Swasta	Dalam Proses	
3.	Layanan Komunikasi PIP di Media Online	Dalam Proses	
4.	Layanan Komunikasi PIP di Media Luar Ruang milik Pemerintah	Dalam Proses	
5.	Layanan Komunikasi PIP di Media Luar Ruang milik BUMN/BUMD	Dalam Proses	

c. Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan

Untuk mencapai 1 dokumen rekomendasi kebijakan hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila maka presentase perhitungan saat ini sekitar 20% dengan alur proses sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan

No	Tahapan	Uraian	Keterangan
1.	Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Konsinyering internal dalam hal pemetaan sosialisasi dan komunikasi Pancasila	Tercapai (1 Kegiatan)
2.	Pengumpulan dan Analisis Data yang melibatkan pakar, <i>stakeholder</i> , dsb	Pembuatan instrument survei kegiatan luring /daring	Proses
3.	Perumusan Strategi dan Alternatif Pendekatan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Perhitungan hasil survei, diskusi komprehensif dengan pihak terkait	Proses
4.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Perancangan strategi sosialisasi dan komunikasi	Proses
5.	Hasil Rekomendasi Kebijakan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Melakukan harmonisasi pedoman dan implementasi alur kebijakan	Proses

Hingga triwulan I kegiatan yang sudah dilakukan untuk memenuhi Tahap 1 alur proses dimaksud yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	<i>Focus Group Discussion</i> Optimalisasi Strategi Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025	Jakarta pada tanggal 21 s.d. 24 Januari 2025.	50 peserta

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

Tabel 2. 10 Aktivitas Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	<i>Focus Group Discussion</i> Optimalisasi Strategi Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025 (Jakarta, tanggal 21 s.d. 24 Januari 2025)	
2.	Sosialisasi PIP bagi Pelajar bekerjasama dengan BNPT di Kabupaten Tasikmalaya: “Memperkuat Semangat Kebangsaan dengan Spirit Pancasila dan Ramadhan untuk Mewujudkan Generasi Muda Berkarakter Pancasila” (Tasikmalaya, tanggal 13 Maret 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Sosialisasi PIP di Wilayah Purwokerto "Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa" (Purwokerto, tanggal 24 Maret 2025)	
4.	Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masyarakat Pesisir dan Nelayan: "Memperkuat Ideologi Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa" (Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2025)	

A.3. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif

Indikator Keberhasilan Program

Target Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 11,15% $(20\% + 2,3\%) / 2$ (rata-rata capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti dan Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila)

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 11 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya
Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan
Pancasila**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila yang Diselesaikan	2	20%	20% (Rekomendasi)
Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila	Jumlah Fasilitas Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	217	5	2,3% (Kelompok Masyarakat)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

a. Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti

Tersusunnya Rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti, yaitu saat ini masih dalam tahap pertama yaitu tahap perencanaan dari target lima tahapan untuk menyelesaikan dua rekomendasi Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila. Sehingga Jumlah Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila yang Diselesaikan, telah tercapai 20% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rekomendasi} = \frac{\text{capaian tahapan}}{5 \text{ tahapan}}$$

$$= \frac{1 \text{ tahapan}}{5 \text{ tahapan}} = 20\%$$

Adapun tahapan-tahapan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Identifikasi Masalah

Tahap awal ini bertujuan untuk mengumpulkan hasil pembudayaan Pancasila dari berbagai FGD yang sudah

dilakukan dan menentukan rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti.

2. Penetapan Prioritas

Setelah penentuan rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti, maka perlu menyusun skala prioritas untuk pelaksanaan berdasarkan sumber daya, waktu, dan target capaian.

3. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Setelah menetapkan prioritas, perlu untuk menyusun rencana aksi (action plan) yang jelas dan terukur: tujuan, langkah kerja, waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab dan melibatkan pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan media.

4. Implementasi Program

Pada tahap ini Direktorat Jaringan dan Pembudayaan melaksanakan pembudayaan Pancasila sesuai dengan rencana tindak lanjut.

5. Menyusun Rekomendasi Hasil Pembudayaan yang Ditindaklanjuti

Setelah dari implementasi program pembudayaan yang ditindaklanjuti, maka tahap terakhir adalah menyusun rekomendasi hasil pembudayaan yang ditindaklanjuti.

b. Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila

Tahun 2025 ini target dari Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila yaitu 217 Jaringan Relawan. Untuk Triwulan I Tahun 2025 tercapai 5 Jaringan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila atau sebesar 2,3% dari total keseluruhan capaian dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jaringan relawan yang melakukan Aktualisasi}}{217 \text{ Jaringan Relawan}}$$

$$= \frac{5 \text{ Jaringan Relawan}}{217 \text{ Jaringan Relawan}} = 2,3\%$$

Adapun Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila

No.	Nama Komunitas/Kelompok Masyarakat	Asal Komunitas
1.	Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI)	Jakarta
2.	Yayasan Puan Amal Hayati	Jakarta
3.	Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI)	Jakarta
4.	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta	Jakarta
5.	FPK Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jakarta

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 13 Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyelarasan Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi <i>Forum Group Discussion</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di BPIP (Jakarta, tanggal 8 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Lanjutan Pembahasan Informasi Kinerja Direktorat Jaringan dan Pembudayaan Tahun Anggaran 2025 (Jakarta, tanggal 10 Januari 2025)	
3.	Rapat Pembahasan Awal Kegiatan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 13 Januari 2025)	
4.	Rapat Pembahasan Draf Surat Keputusan Kepala BPIP dan Website Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 17 Januari 2025)	
5.	Kegiatan Penilaian Tahap I Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 20 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Rapat Pembahasan Draf Surat Keputusan Kepala BPIP dan Website Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 25 Februari 2025)	
7.	Kegiatan Penyusunan Instrumen Survei Pembudayaan dan Musyawarah Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2017 s.d. 2024 (Jakarta, tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025)	
8.	Kegiatan Rapat Koordinasi Jaringan Pembudayaan Pancasila (Jakarta, tanggal 18 Maret 2025)	
9.	Rapat Pleno Awal Penilaian Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Maret 2025)	

B. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum tersendiri yang secara terus menerus dilakukan internalisasi dan institusionalisasi. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Indikator Keberhasilan Sasaran Program Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah termanfaatkan dan ditindaklanjutinya capaian keluaran yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI	Ket
Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	100%	15%	 15%
Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan	100%	11%	 11%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	100%	22,5%	 22,5%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

B.1. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti dengan Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 15% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Produk Hukum hingga TW I}}{20 \text{ Produk Hukum}} \times 100\% = \frac{3 \text{ Produk Hukum}}{20 \text{ Produk Hukum}} \times 100\% = 15\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Selaras dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	5	15%	15% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

Dalam hal pelaksanaan analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai Pancasila pada tahun anggaran 2025 memiliki target 5 rekomendasi dengan 20 keluaran rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila. Hingga Triwulan I (Januari s.d. Maret), Direktorat Analisis dan Penyelarasan telah menyelesaikan 3 analisis dan penyelarasan dari 20 keluaran rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Rekomendasi rancangan produk hukum yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan Pengelolaan Rumah Susun;	Selesai diselaraskan 100%
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Penyelenggaraan Ilmu Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Selesai diselaraskan 100%

Sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % dengan rincian perhitungan:

$$\frac{\text{Produk Hukum hingga TW I}}{20 \text{ Produk Hukum}} \times 100\% = \frac{3 \text{ Produk Hukum}}{20 \text{ Produk Hukum}} \times 100\% = 15\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

Tabel 2. 17 Aktivitas Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyelarasan Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi <i>Forum Group Discussion</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di BPIP (Jakarta, tanggal 8 Januari 2025)	
2.	Koordinasi Rapat Rencana Kerja dan Rencana Penarikan dana Triwulan I Tahun 2025 Direktorat Analisis dan Penyelarasan di BPIP (Jakarta, tanggal 15 Januari 2025)	
3.	Menerima Kunjungan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan Kunjungan Kerja Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelarasan Rancangan Produk Hukum di Daerah di BPIP (Jakarta, tanggal 17 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	menerima Audiensi dan Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di BPIP (Jakarta, tanggal 21 Januari 2025)	
5.	Koordinasi Program Penyusunan Peraturan di Kementerian Koperasi di Kementerian Koperasi (Jakarta, tanggal 30 Januari 2025)	
6.	Koordinasi Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Berdasakan Indikator Nilai Pancasila dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Jakarta, tanggal 13 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Koordinasi Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta (Jakarta, tanggal 17 Februari 2025)	
8.	Koordinasi Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Jakarta (Jakarta, tanggal 18 Februari 2025)	
9.	Koordinasi Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Koperasi (Jakarta, tanggal 19 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Rapat Harmonisasi 3 (tiga) rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bekasi (Bekasi, tanggal 6 s.d. 7 Maret 2025)	
11.	Penyusunan Draft Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi di BPIP (Jakarta, tanggal 14 Maret 2025)	
12.	Penyusunan Draf Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum di BPIP (Jakarta, tanggal 18 Maret 2025)	
13.	Penyusunan Draf Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Pengawasan Regulasi di BPIP (Jakarta, tanggal 19 Maret 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
14.	Penyusunan Draf Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Advokasi di BPIP (Jakarta, tanggal 20 Maret 2025)	
15.	Perumusan Konsepsi Lampiran Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang HAPR (Jakarta, tanggal 21 Maret 2025)	
16.	Rapat Harmonisasi 2 (dua) rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bekasi (Bekasi, tanggal 20 s.d. 21 Maret 2025)	
17.	Rapat Kegiatan Audiensi RUU Masyarakat Adat Bersama Koalisi Masyarakat Adat di BPIP (Bekasi, tanggal 20 s.d. 21 Maret 2025)	

B.2. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 11% $(20\%+2\%)/2$ (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap LTN/K/L/D yang Diselesaikan	1	20%	15% (Rekomendasi Kebijakan)
	Jumlah Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Diselesaikan	9	2%	15% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

a. Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap LTN/K/L/D yang Diselesaikan

Pada Triwulan I, capaian rekomendasi hasil advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap LTN/K/L/D mencapai 20%. Nilai ini diperoleh dari penyelesaian satu dari lima tahapan penyusunan satu rekomendasi yang berupa inventarisasi masalah dan kendala dalam pelaksanaan PIP. Artinya, proses masih berjalan dan menunjukkan progres awal yang positif. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan dengan rincian layanan yaitu:

$$\frac{\text{Capaian tahapan hingga TW I}}{(1 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 20\%$$

No.	Rekomendasi	Tahap 1 inventarisasi masalah dan kendala	Tahap 2 perumusan substansi dan arah kebijakan	Tahap 3 finalisasi dokumen rekomendasi	Tahap 4 penyerahan dan penetapan hasil kajian	Tahap 5 monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
1	Rekomendasi Advokasi PIP Kepada Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya	✓				

b. Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Diselesaikan

Pada Triwulan I, capaian tahapan penyusunan Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap organisasi sosial dan komponen masyarakat lainnya mencapai 2%. Persentase ini dihitung dari satu tahapan yang berupa inventarisasi masalah dan kendala dalam pelaksanaan PIP dari total lima tahapan yang

direncanakan untuk total sembilan rekomendasi. Capaian ini menunjukkan bahwa proses advokasi telah dimulai dan diharapkan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan penyelesaian tahapan-tahapan selanjutnya secara bertahap dan terstruktur.

Berikut adalah deskripsi mendetail mengenai tabel persentase yang menunjukkan progres dokumen rekomendasi Direktorat Advokasi:

Dalam rangka penyusunan Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), terdapat lima tahapan utama yang harus dilalui secara sistematis, yaitu: (1) inventarisasi masalah dan kendala dalam pelaksanaan PIP; (2) perumusan substansi dan arah kebijakan dalam bentuk rekomendasi advokasi PIP; (3) finalisasi dokumen rekomendasi berdasarkan hasil konsultasi dan uji kelayakan; (4) penyerahan dan penetapan hasil kajian kepada Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, atau organisasi terkait; serta (5) monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Setiap rekomendasi disusun dengan pola kerja yang serupa, yaitu menargetkan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagai pihak yang diharapkan dapat memanfaatkan serta mengimplementasikan rekomendasi tersebut secara nyata dalam kebijakan atau program kerja. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat relevansi dan keberterimaan rekomendasi di tingkat pelaksana. Persentase capaian yang tercantum dalam laporan menunjukkan sejauh mana tahapan penyusunan rekomendasi telah dilakukan dan direspons oleh pihak-pihak terkait, baik dalam bentuk pengakuan, integrasi ke dalam kebijakan, maupun tindak lanjut konkret di lapangan, yang seluruhnya menjadi tolok ukur keberhasilan proses advokasi PIP. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan

dengan rincian layanan yaitu:

$$\frac{\text{Capaian tahapan hingga TW I}}{(9 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{45 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 2\%$$

No.	Rekomendasi	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
		inventarisasi masalah dan kendala	perumusan substansi dan arah kebijakan	finalisasi dokumen rekomendasi	penyerahan dan penetapan hasil kajian	monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
1	Rekomendasi Advokasi PIP Kepada Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya	✓				
2	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Kegamaan	✓				
3	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Kemanusiaan	✓				
4	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Demokrasi	✓				
5	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Sosial dan Ekonomi	✓				
6	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Persatuan dan Kesatuan	✓				
7	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	✓				
8	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Hukum dan Politik	✓				
9	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	✓				

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

Tabel 2. 19 Aktivitas Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya terkait Peranan DPRD dalam Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila di Tengah Masyarakat (Jakarta, tanggal 22 Januari 2025)	
2.	Rapat Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Regulasi dan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Jakarta, tanggal 31 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Rapat Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan (Jakarta, tanggal 5 Maret 2025)	
4.	Rapat Breakdown Anggaran dan Program Kerja Prioritas Direktorat Advokasi (Jakarta, tanggal 6 Maret 2025)	
5.	Rapat Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila "Mayoritas Vs. Minoritas dan Kewajiban Negara Melindungi Warga Negara (Kajian Atas Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia)" (Jakarta, tanggal 7 Maret 2025)	

B.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025 adalah 100%

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 22,5% $(20\%+25\%)/2$ (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	2	22,5%	22,5% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

Pada Tahun Anggaran 2025 Dukungan Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 2 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti yakni Rekomendasi hasil kajian regulasi/kebijakan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi. Capaian dari 2 rekomendasi tersebut dijelaskan melalui rincian berikut:

a. Dokumen rekomendasi hasil kajian regulasi/kebijakan

Sampai triwulan I Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam tahapan Penetapan regulasi yang akan dikaji (aduan masyarakat, inventarisasi internal, permohonan K/L lain). Dalam hal ini capaian tahapan pembentukan rekomendasi diukur dengan 5 Tahapan yaitu:

1. Penetapan regulasi yang akan dikaji (aduan masyarakat, inventarisasi internal, permohonan K/L lain).
2. Proses pengkajian dengan melibatkan akademisi Perguruan Tinggi, *stakeholder* dan praktisi.
3. Penyusunan rekomendasi bekerjasama dengan para pakar, *stakeholder* dan akademisi.
4. Penyampaian hasil rekomendasi kepada Presiden melalui pimpinan serta kepada *stakeholder* terkait.
5. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disusun melalui proses monitoring dan evaluasi.

Pada Triwulan I, capaian rekomendasi mencapai 20%. Nilai ini diperoleh dari penyelesaian satu dari lima tahapan penyusunan satu rekomendasi yang berupa Penetapan regulasi yang akan dikaji (aduan masyarakat, inventarisasi internal, permohonan K/L lain). Artinya, proses masih berjalan dan menunjukkan progres awal yang positif. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan. Berikut adalah metode perhitungannya:

$$\frac{\text{Capaian tahapan hingga TW I}}{(\text{1 rekomendasi} \times \text{5 tahapan penyusunan})} \times 100\% \\ = \frac{1}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 20\%$$

b. Dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

Sampai triwulan I Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam tahapan Pembahasan rekomendasi tingkat pimpinan, Dalam hal ini capaian tahapan pembentukan rekomendasi diukur dengan 4 Tahapan yaitu:

1. Pembahasan rekomendasi Tingkat pimpinan, yang ditindaklanjuti tingkat pimpinan telah dilaksanakan ditingkat Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi. Selanjutnya, Pembahasan penyampaian rekomendasi hasil kajian untuk di tindaklanjuti dibahas di tingkat Pimpinan dan Dewan Pengarah untuk mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah berdasarkan Pasal 55 Perpres No 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Setelah mendapat persetujuan, arahan dan disposisi pimpinan dan dewan pengarah, Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti kepada K/L, Pemprov, Pemkot, dan Pemkab berdasarkan Perban BPIP No 5 Tahun 2020 dan Perpres No 7 Tahun 2018.
3. Penyampaian rekomendasi, Deputi menyampaikan hasil rekomendasi kepada lembaga tinggi negara, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah berdasarkan Pasal 16 Perban No 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
4. Penyampaian hasil rekomendasi kepada Presiden melalui pimpinan serta kepada *stakeholder* terkait.

Pada Triwulan I, capaian rekomendasi mencapai 25%. Nilai ini diperoleh dari penyelesaian satu dari dua tahapan penyusunan satu rekomendasi yang berupa Pembahasan rekomendasi

tingkat pimpinan. Artinya, proses masih berjalan dan menunjukkan progres awal yang positif. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan Berikut adalah metode perhitungannya:

$$\frac{\text{Capaian tahapan hingga TW I}}{(1 \text{ rekomendasi} \times 4 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{4 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 25\%$$

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 21 Aktivitas Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Optimalisasi pelaksanaan anggaran Direktorat Penyusunan Rekomendasi kebijakan dan Regulasi Tahun Anggaran 2025 (efisien dan terukur (Jakarta, 13 Januari 2025)	
2.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Dalam Rangka Identifikasi Terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Dianggap Bertentangan dengan Pancasila (Jakarta, 20 s.d. 23 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Identifikasi dan Verifikasi terhadap Kebijakan dan Regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah Kab. Sleman No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai Pancasila (Sleman, 23 s.d. 25 Januari 2025)	
4.	Strategi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi (Jakarta, 14 Maret 2025)	

C. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagai lembaga PIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya penyelenggaraan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP, diantaranya adalah:

1. Intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
2. Kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
3. Masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
4. Rendahnya tingkat ke dalam literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
5. Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

Berdasarkan urgensi atas tugas yang diemban oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, maka Sasaran Program Deputi Bidang Pengkajian dan Materi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPIP Tahun 2025-2029 adalah berupa Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah:

Tabel 2. 22 Indikator Kinerja Program Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	Ket
Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan	100%	22,5%	 22,5%
Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan	100%	50%	 50%
Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan	100%	18,3%	 18,3%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

C.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 22,5% (proses penyusunan kajian) (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis PIP yang diselesaikan	2	22,5%	22,5% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis PIP yang diselesaikan. Capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dengan rincian perhitungan:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}}$$

$$= \frac{(25\% + 20\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}}$$

$$= \frac{45\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 22,5\%$$

Sebagai catatan, rekomendasi yang telah ditetapkan sebagai *output* Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP adalah 1) Rekomendasi Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan 2) Rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara.

Berikut merupakan detail capaian kinerja Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP pada Triwulan I tahun 2025, dengan mempertimbangkan

kalender rencana kerja Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP yang telah disusun:

1) Penyusunan Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

- Rekomendasi Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila

Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kajian kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila berupa dokumen Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tahun 2025, kajian ini berfokus pada Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penyusunan dokumen rekomendasi Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melakukan penyusunan sejak 2023 dengan keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan matriks usulan peta jalan. Sampai dengan akhir tahun 2024, telah melibatkan 41 Kementerian/Lembaga (K/L) dan lembaga negara (LN) dalam penyusunan Peta Jalan PIP 2025-2029. Proses penyusunan ini telah menghasilkan sebuah matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 yang berisi usulan-usulan kegiatan K/L dan LN berserta keluarannya yang dinilai relevan dapat mencapai sasaran-sasaran dari setiap isu strategis Arah Kebijakan PIP. Tetapi mengingat terjadi perubahan dan penambahan susunan organisasi K/L pada kabinet pemerintah 2025-2029, serta selesainya dokumen-dokumen perencanaan periode tahun 2024 dan terbitnya dokumen-dokumen perencanaan baru seperti RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pada tahun 2025 ini terhadap usulan-usulan kegiatan dalam Matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 yang telah diterima pada tahun 2024.

Dalam proses penyusunan rekomendasi Peta Jalan PIP, maka dilakukan tiga tahap yaitu:

1. Identifikasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Negara yang mengalami penyesuaian pada tahun 2025;
2. Validasi usulan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Negara yang mengalami penyesuaian pada tahun 2025;
3. Penyusunan lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2025-2029;
4. Akseptasi internal BPIP.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari penyusunan Peta Jalan PIP yang telah dilakukan, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP telah melaksanakan tahapan berupa identifikasi usulan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Negara yang terjadi penyesuaian pada tahun 2025. Hingga Triwulan 1 tahun 2025, sebanyak 17 K/L telah menyesuaikan usulan matriks Peta Jalan PIP 2025-2029, yaitu:

1. Mahkamah Agung RI;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Agama;
6. Kementerian Hukum;
7. Kementerian Sosial;
8. Kementerian Pertanian;
9. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
11. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Arsip Nasional Republik Indonesia;
14. Badan Kepegawaian Nasional;

15. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
16. Lembaga Administrasi Negara;
17. Lembaga Ketahanan Nasional.

Selanjutnya, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP berencana mengundang atau melakukan kunjungan kepada K/L dan LN yang belum memberikan usulan matriks Peta Jalan PIP. Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan PIP tahun 2025-2029 pada Triwulan I 2025 adalah sebesar:

$$\frac{\text{tahapan hingga TW I}}{(1 \text{ dokumen} \times 4 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$
$$= \frac{1}{4 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 25\%$$

Pada triwulan I, penyusunan dokumen rekomendasi Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila masih dalam tahap I, yaitu identifikasi usulan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Negara yang terjadi penyesuaian pada tahun 2025. Maka telah dilaksanakan 1 dari 4 tahapan keseluruhan, sehingga dapat dihitung capaian kinerja yang dicapai terkait penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan PIP tahun 2025-2029 adalah sebesar 25%.

- Rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP dalam hal perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pada tahun 2025 Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP akan menyusun Rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara. Penyusunan Rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara merupakan bentuk akhir dari upaya diselesaikannya dokumen Naskah Sumber Dasar Negara

yang telah dimulai pada tahun 2024.

Berkenaan dengan kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara, dibagi menjadi 3 rangkaian kronologis yaitu:

1. Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945;
2. Naskah Sumber Arsip Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)-Masa Reses dan Sidang Kedua 10 s.d. 17 Juli 1945;
3. Naskah Sumber Arsip Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945

Pada Tahun anggaran 2024, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi bekerjasama dengan Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Perlindungan Arsip telah menyelesaikan penyusunan “Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945”. Sementara itu terkait dua seri lainnya akan diselesaikan pada tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan Rekomendasi Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara diperlukan tahapan:

1. Identifikasi dan validasi Naskah Sumber Arsip Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)-Masa Reses dan Sidang Kedua 10 s.d. 17 Juli 1945;
2. Identifikasi dan validasi Naskah Sumber Arsip Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)-Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945
3. Gelar Naskah dan Ekspose Naskah Sumber Arsip Volume II dan II
4. Penyusunan Rekomendasi
5. Akseptasi Internal BPIP.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara, Pada Triwulan I Tahun 2025, Direktorat

Pengkajian Kebijakan PIP telah melaksanakan tahapan berupa identifikasi Naskah Sumber Arsip Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)-Masa Reses dan Sidang Kedua 10 s.d. 17 Juli 1945 melalui proses transkripsi dan translasi terhadap arsip yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Selanjutnya, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP berencana melakukan konfirmasi, verifikasi dan validasi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan Sejarawan atas Naskah Sumber Arsip yang telah disusun.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan dokumen Rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara pada Triwulan I 2025 adalah sebesar:

$$\frac{\text{tahapan hingga TW I}}{(1 \text{ dokumen} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$
$$= \frac{1}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 20\%$$

Pada triwulan I, penyusunan dokumen rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara masih dalam tahap I, yaitu berupa Identifikasi dan validasi Naskah Sumber Arsip Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)-Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945. Maka telah dilaksanakan 1 dari 5 tahapan keseluruhan, sehingga dapat dihitung capaian kinerja yang dicapai terkait penyusunan dokumen rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara adalah sebesar 20%.

2) Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Kajian penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penyusunan rekomendasi Kebijakan. Hingga triwulan I ini, baru dilaksanakan perencanaan terkait dengan sistem penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat.

3) Penerbitan Jurnal Ilmiah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP melakukan beberapa pengelolaan jurnal ilmiah yaitu:

- *Pengelolaan Jurnal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*
Pengelolaan jurnal ilmiah “Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK)” pada tahun 2025, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya akan melaksanakan dua kali penerbitan, yaitu pada periode April 2025 (Volume 5 Nomor 1) dan Oktober 2025 (Volume 5 Nomor 2). Hingga triwulan I tahun 2025, dalam rangka penerbitan jurnal Volume 5 Nomor 1 Edisi April 2025, telah dilakukan review internal dan penentuan Mitra Bestari.
- Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia;
Pengelolaan Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia, pada tahun 2025 akan melaksanakan dua kali penerbitan, yaitu pada periode Mei 2025 (Volume 2 Nomor 1) dan November 2025 (Volume 2 Nomor 2). Hingga triwulan I tahun 2025, telah dilakukan pengajuan ISSN (*International Standart Serial Number*) baik dalam bentuk *online* dengan nomor E-ISSN 3089-3224 maupun cetak P-ISSN 3089-3178.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 24 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peta Jalan PIP 2025 (Jakarta, 24 Januari 2025)	
2.	Rapat Pembentukan Tim Percepatan dan Pembahasan Rencana Kerja Peta Jalan PIP 2025-2029 (Jakarta, 5 Februari 2025)	
3.	Rapat Pembahasan Kerangka Regulasi, Kelembagaan, Perencanaan, dan Pendanaan Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2025-2029 (Jakarta, 14 Februari 2025)	
4.	Penajaman Isu Strategis Sistem Pendidikan dan IPTEK Rancangan Peraturan Presiden Tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025-2029 (Bandung, 17 s.d. 18 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Rancangan Lampiran Bab 5 dan Bab 6 (Kerangka Regulasi, Kelembagaan, Perencanaan dan Pendanaan) Peraturan Presiden Tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2025-2029 (Jakarta, 21 Februari 2025)	
6.	Menghadiri Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Model Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, 23 s.d. 25 Februari 2025)	
7.	Rapat Koordinasi Penyusunan Perpres Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2025-2029 (Jakarta, 27 Februari 2025)	
8.	Audiensi dan Koordinasi Bersama Kementerian Kebudayaan dalam Rangka Rencana Perancangan dan Pengembangan Naskah Sumber Dasar Negara sebagai Sumber Referensi Penyusunan Sejarah Nasional Indonesia	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
	(Jakarta, 28 Februari 2025)	
9.	Penyuntingan Artikel Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volume 5 No 1 April 2025 (Jakarta, 7 s.d. 8 Maret 2025)	
10.	Rapat Persiapan Identifikasi Program dan Kegiatan Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga (Jakarta, 10 Maret 2025)	
11.	Menghadiri Audiensi dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Guna Mendiskusikan Pengembangan Serta Revisi Sejarah Nasional Indonesia (SNI) (Jakarta, 18 Maret 2025)	
12.	Menghadiri Audiensi dengan Finalisasi Usulan Kegiatan Matriks Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025-2029 Bersama Kementerian/Lembaga (Jakarta, 19 s.d. 21 Maret 2025)	

C.2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Materi yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 50% $(43\%+57\%)/2$ (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	2	50%	50% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 50%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{(43\%+57\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{100\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 50\% \end{aligned}$$

Rincian dari 2 Rekomendasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Hasil Kajian reuiu materi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila yang diselesaikan

Pelaksanaan reuiu atas materi BTU Pendidikan Pancasila ini bertujuan sebagai upaya untuk Uji keterbacaan guru terhadap materi BTU Pendidikan Pancasila jenjang Pendidikan menengah, Mendiskusikan terapan nilai-nilai Pancasila dapat tersampaikan secara tepat dan relevan dengan kondisi zaman saat ini, Reuiu ini juga akan mengidentifikasi muatan materi yang tidak relevan dan harus disempurnakan, dan sebagai masukan ke Dikdasmen dalam penyempurnaan BTU pendidikan Pancasila atau suplemen tambahan BTU.

Dalam prosesnya penyusunan Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan dibutuhkan 7 tahapan yaitu:

- 1) Penentuan metodologi, lokus kajian, Identifikasi permasalahan, pengumpulan data primer/sekunder dan study literasi
- 2) Pengolahan data
- 3) Koordinasi dan sikronisasi dengan *stakeholder* terkait
- 4) Pelaksaan Kajian
- 5) Akseptasi

- 6) Perumusan sistematika Rekomendasi
- 7) Penyusunan rekomendasi

Dalam Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melakukan kunjungan ke Sekolah Menengah Atas di Bandung Jawa Barat dan telah didapat hasil revidu dari BTU pendidikan Pancasila kelas X,XI dan XII. Dari hasil pengumpulan data revidu tersebut akan dikompilasi dengan studi keterbacaan yang akan dilakukan di SMA di DKI Jakarta dan akan menjadi masukan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kegiatan ini membahas bersama isi materi, metodologi penyampaian, serta penyusunan konten sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan tantangan global. dengan demikian, buku teks ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk karakter dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu menghasilkan generasi yang kritis, toleran, dan berintegritas.

Tahapan yang telah dilakukan hingga akhir Triwulan I ini telah sampai pada tahap ketiga yaitu koordinasi dan sinkronisasi kepada *stakeholder* terkait dan direncanakan di Triwulan II nanti akan dilaksanakan kajian Bersama dengan tim penulis BTU, Guru dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari tahapan yang sudah dilalui dapat disimpulkan bahwa capaian Rekomendasi Hasil Kajian revidu materi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila yang diselesaikan adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{7 \text{ Tahapan Penyusunan}} \\ &= \frac{3 \text{ Tahapan}}{7 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 43\% \end{aligned}$$

2. Rekomendasi Hasil Kajian CPMK Pendidikan Pancasila sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang dimanfaatkan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 ayat 2 mengisyaratkan BPIP perlu menyusun pedoman tentang materi pembelajaran pendidikan Pancasila dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) bagi perguruan tinggi. Sebagai tindaklanjutnya, Direktorat Pengkajian Materi PIP telah melakukan koordinasi dan pembahasan bersama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil koordinasi dan pembahasan dimaksud, saat ini sedang dilakukan penyusunan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai dasar dalam penyusunan buku dan modul bahan ajar Pendidikan Pancasila pada MKWK.

Proses penyusunan CPMK ini dilakukan dengan kolaborasi antara Direktorat Pengkajian Materi PIP dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan diharapkan akan segera difinalisasi mengingat saat ini tengah disusun buku Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi oleh Dit. Belmawa dengan para penulis buku Perguruan Tinggi. Pedoman ini juga sekaligus menjadi salah satu rekomendasi dari Dit. Pengkajian Materi sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.

Adapun beberapa *output* berupa materi yang sudah diselesaikan yaitu:

- Penyusunan bahan tayang tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1965;
- Penyusunan bahan tayang Pidato 1 Juni 1945;

- Reviu materi PIP bagi Polri

Dari capaian diatas dapat disimpulkan bahwa Rekomendasi Hasil Kajian CPMK Pendidikan Pancasila sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang dimanfaatkan sudah melewati tahapan pelaksanaan kajian, sehingga dapat disimpulkan capaian adalah sebesar:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{7 \text{ Tahapan Penyusunan}}$$

$$= \frac{4 \text{ Tahapan}}{7 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 57\%$$

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 26 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Materi Bahan Tayang Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Hakim (Jakarta, 20 s.d. 22 Januari 2025)	
2.	Audiensi ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendiknasaintek dalam rangka pengumpulan data tentang materi pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi (Jakarta, 18 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Kegiatan Tindak Lanjut Tidak Berlakunya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 (Jakarta, 21 Februari 2025)	
4.	Kegiatan Pengumpulan Data/Informasi Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Sebagai Mata kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di Perguruan Tinggi dan Reviu materi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (Bandung, 23 s.d. 26 Februari 2025)	
5.	Kegiatan Rapat Penguatan Pancasila dalam Ekosistem Pendidikan dan Keterkaitan Tugas BPIP dalam Standar Nasional Pendidikan (Jakarta, 11 Maret 2025)	
6.	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di Perguruan Tinggi serta Perencanaan Penyusunan Pedoman dan Reviu Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta, 21 Maret 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Kegiatan Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di Perguruan Tinggi dan Perencanaan Penyusunan Pedoman (Jakarta, 21 Maret 2025)	

C.3. Persentase Rekomendasi Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 18,3% $(20\% + 16,6\%) / 2$ (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 27 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	2	18,3%	18,3% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan yaitu rekomendasi Kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan rekomendasi Kajian Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila. Capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{(20\% + 16,6\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{36,6\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 18,3\% \end{aligned}$$

Rincian dari 2 Rekomendasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila

Dalam prosesnya Penyusunan rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila, dilaksanakan dalam lima tahap yaitu:

- 1) Penyusunan sistematika (Penentuan metodologi, lokus kajian identifikasi permasalahan pengumpulan data primer/skunder dan studi literasi, penyusunan daftar pertanyaan Pengolahan data pemetaan *stakeholder*);
- 2) Pengolahan data, koordinasi dan sinkronisasi *stakeholder* (penentuan sampling, narasumber) ;
- 3) Pelaksanaan Kajian (diskusi, penyebaran kuisisioner, observasi lapangan dan wawancara mendalam);
- 4) Akseptasi;

5) Perumusan naskah rekomendasi.

Pelaksanaan kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila pada triwulan I tahun 2025 ini sudah melakukan tahapan penyusunan sistematika pengkajian, yang dilakukan dengan kegiatan rapat direktorat pengkajian implementasi. Selanjutnya direktorat pengkajian implementasi juga telah melakukan Rapat Identifikasi Hambatan Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada Satuan Pendidikan di Bawah Kementerian Agama Jawa Barat. Beberapa kegiatan yang tersebut dilakukan untuk pemetaan dan penyusunan sistematika untuk menentukan lokus dan keterwakilan permasalahan dalam penyusunan kajian implementasi PIP.

Pelaksanaan kajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila bertujuan untuk memahami dan menguraikan permasalahan penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila pada satuan Pendidikan, Menghimpun masukan dari satuan Pendidikan, Merumuskan strategi implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada satuan pendidikan yang menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah/K/L terkait.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila pada Triwulan I 2025 adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{5 \text{ Tahapan Penyusunan}} \\ &= \frac{1 \text{ Tahapan}}{5 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 20\% \end{aligned}$$

2. Rekomendasi Pengkajian Identifikasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Dalam prosesnya Penyusunan Pengkajian Identifikasi Pembinaan Ideologi Pancasila, dilaksanakan dalam enam tahap yaitu:

- 1) Penentuan metodologi dari data primer, studi literasi, dan pengolahan data;
- 2) Perumusan konsep, dimensi, dan penjabaran calon indikator yang dapat terukur;
- 3) Penetapan indikator berbasis isu strategis dan indikator IPOLEKSOSHANKAM;
- 4) Mengaktualkan dimensi dengan metode *Quivy* (dilakukan dengan observasi lapangan)
- 5) Penyusunan dan akseptasi naskah identifikasi nilai ideologi Pancasila;
- 6) Perumusan naskah rekomendasi

Proses penyusunan draft perumusan konsep nilai ideologi, dimensi, dan variabel dilakukan dengan membedah arsip-arsip dokumen, mendapatkan masukan dari sejarawan dan staf khusus ketua dewan pengarah. Pada Triwulan kedua, draft perumusan konsep nilai ideologi, dimensi, dan variabel akan dikomparasikan nilai ideologi Pancasila, tujuan bernegara, dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)-Asta Cita. Tujuan dari naskah rekomendasi kajian Identifikasi Nilai Pembinaan Ideologi Pancasila adalah mendapatkan makna esensial nilai ideologi Pancasila.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan rekomendasi Pengkajian Identifikasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan I 2025 adalah sebesar:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{6 \text{ Tahapan Penyusunan}}$$

$$= \frac{1 \text{ Tahapan}}{6 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 16,6\%$$

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 28 Aktivitas Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Penguatan PIP (Jakarta, 10 Januari 2025)	
2.	Rapat Pembahasan Usulan Potensi Tindak Lanjut Kerja Sama PIP Tahun 2025 (Jakarta, 13 Januari 2025)	
3.	Rapat Finalisasi <i>Output</i> Direktorat Pengkajian Implementasi PIP (Jakarta, 24 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Rapat Penilaian Kinerja Direktorat Pengkajian Implementasi PIP tahun 2024 (Jakarta, 30 Januari 2025)	
5.	Diskusi Kelompok Terpumpun Perumusan Instrumen Nilai Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Pengkajian Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila (Jakarta, 31 Januari 2025)	
6.	Rapat <i>Brainstroming</i> Awal Konsep, Metode dan Indikator Nilai Ideologi Pancasila (Jakarta, 14 Februari 2025)	
7.	Pemetaan Indikator/Instrumen Nilai Ideologi Pancasila (Jakarta, 18 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Kegiatan Perancangan Indikator/Instrumen Nilai Ideologi Pancasila pada Kebijakan, Program dan Kegiatan (Jakarta, 19 Februari 2025)	
9.	Monitoring Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada Satuan Pendidikan di Bawah Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat (Bandung, 24 s.d. 27 Februari 2025)	
10.	Akseptasi Rekomendasi Kajian Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila di Satuan Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Bandung, 24 s.d. 27 Februari 2025)	
11.	Rapat Penyamaan Presepsi Metode Penyusunan Instrumen/Indikator Nilai Ideologi Pancasila (Jakarta, 6 Maret 2025)	
12.	Rapat Pembahasan Identifikasi Hambatan Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada Satuan Pendidikan di Bawah Kementerian Agama Jawa Barat (Jakarta, 19 Maret 2025)	

D. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Pengembangan kebijakan/regulasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Sistem Nasional Pendidikan dan PIP yang terstruktur, sistemik, dan masif sehingga perlu dirumuskan pengaturan yang komprehensif. Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan PIP merupakan implementasi dari Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan. Perumusan program teknis dilakukan untuk memastikan advokasi kebijakan strategis yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni terwujudnya pembumian Pancasila sebagai dasar negara sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kehidupan bermasyarakat. Program teknis tersebut perlu dielaborasi dalam program jangka panjang Sistem Nasional Diklat PIP dalam rangka mendukung terwujudnya pembumian Pancasila bagi aparatur negara dan seluruh komponen bangsa menuju sumber daya manusia unggul pada saat Indonesia Emas Tahun 2045. Sedangkan program teknis jangka menengah, jangka pendek, serta tahunan dielaborasi secara komprehensif dan *cascading* dimana secara agregat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang tersebut.

Sumber daya manusia Indonesia Emas tahun 2045 diharapkan mempunyai kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain untuk mendukung Indonesia sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban dunia. Pembangunan SDM unggul tersebut perlu dilakukan secara paripurna, tidak hanya membangun kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga membangun iman dan taqwa serta budaya sehingga menjadi insan-insan pembangunan yang religius, menguasai iptek, serta berbudaya luhur.

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah:

Tabel 2. 29 Indikator Kinerja Program Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi	100%	20%	 20%
Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi	100%	26%	 26%
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik	100%	19,8%	 19,8%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

D.1. Persentase Tenaga Pengajar Pancasila yang Tersertifikasi

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 20% proses pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$IKK = \frac{n}{x} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK = persentase capaian indikator kinerja kegiatan

n = capaian kinerja jumlah Pengajar Diklat PIP yang Tersertifikasi

x = target kinerja Pengajar Diklat PIP yang Tersertifikasi (275 orang)

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 30 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN		KET
Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat	Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	275	20%	20% (orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh yaitu:

a. Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat

Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat dengan rincian *output* Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila dari target 275 orang. Berdasarkan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025 dapat dilaporkan sudah tercapai 20%, yaitu:

1. Proses persiapan pelaksanaan sertifikasi sudah dilakukan pada triwulan I tahun 2025 dan akan dilanjutkan proses pendaftaran sertifikasi pengajar Diklat PIP tahun 2025 pada triwulan II tahun 2025 dengan target kinerja 250 orang peserta setelah berkoordinasi dengan tim asesor sertifikasi pengajar Diklat PIP.

2. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP pada lampiran II tentang deskripsi mata pelatihan yaitu Materi Dasar PIP, Materi Umum Pancasila, dan Materi Pengayaan bahwa peserta pelatihan bagi pengajar Diklat PIP tahun 2023 baik yang dilaksanakan bagi internal BPIP dan Eksternal BPIP belum semuanya mendapatkan materi tersebut dan akan dilakukan pemutakhiran materi kepada 225 orang peserta pelatihan bagi pengajar Diklat PIP tahun 2023 pada triwulan II tahun 2025.
3. Akan dilaksanakan pelatihan bagi pengajar Diklat PIP tahun 2024 sebanyak 572 orang peserta pada triwulan II tahun 2025 karena pada tahun sebelum belum dilakukan pelatihan bagi pengajar Diklat PIP tersebut.

Pedoman penilaian (*scoring*) capaian rincian *output* persentase tenaga Diklat PIP yang bersertifikat, yaitu:

Score	Kriteria Score	Keterangan
0%	Belum dilaksanakan	Belum terlaksana
20%	Terlaksananya verifikasi dan validasi data calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Proses Pelaksanaan
50%	Tersedianya berita acara hasil asesmen peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dari Tim Asesor.	Belum terlaksana
70%	Tersedianya rekomendasi hasil penelusuran rekam Jejak calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dari BIN.	Belum terlaksana
80%	Terlaksananya Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP dan/atau Penguatan Bagi Pengajar Diklat PIP kepada calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Belum terlaksana
100%	Tersedianya 200 orang Pengajar Diklat PIP bersertifikat sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Belum terlaksana

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

**Tabel 2. 31 Aktivitas Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat
Pembinaan Ideologi Pancasila**

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Persiapan Kegiatan Penyerahan Sertifikat Sertifikasi Pengajar Diklat PIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 9 Januari 2025)	
2.	Rapat Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Bagi Calon Pengajar Diklat PIP (Jakarta, tanggal 13 Februari 2025)	

D.2. Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi.

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi pada Tahun 2025 adalah 100%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 26% dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\left(a = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right) + \left(b = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right)}{2}$$
$$IKK = \frac{a + b}{2}$$
$$IKK = \frac{10\% + 42\%}{2} = 26\%$$

Keterangan :

IKK = persentase capaian indikator kinerja kegiatan

a = Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

b = Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan:

- Terlaksananya Akreditasi Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
- Tersedianya Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 32 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	Jumlah Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang terakreditasi	15	10%	10% (Lembaga)
Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	Jumlah NSPK Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	7	3	42% (NSPK)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi, yaitu:
 - a. Telah disusun agenda kerja akreditasi penyelenggara Diklat PIP.
 - b. Akreditasi penyelenggara Diklat PIP akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 dengan agenda pertama rapat koordinasi dengan tim asesor akreditasi penyelenggara Diklat PIP dimana terdapat perubahan tim asesor dikarenakan tim asesor sebelumnya telah pensiun dan mutasi ke instansi lain.
 - c. Target kinerja sebanyak 15 lembaga penyelenggara Diklat PIP merupakan hasil analisis terhadap Kementerian/Lembaga/Pemda tempat pengajar Diklat PIP yang bersertifikat bekerja.

Adapun pedoman penilaian (*scoring*) capaian rincian *output* persentase penyelenggara Diklat PIP yang terakreditasi, yaitu:

Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
0%	Belum dilaksanakan	Belum terlaksana
20%	Bimbingan Teknis Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP bagi Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP	Proses Pelaksanaan

Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
40%	DKT Penyampaian Data Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP kepada Tim Asesor	Belum terlaksana
60%	Visitasi Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP (pemeriksaan data dukung)	Belum terlaksana
70%	Berita Acara Hasil Penilaian Tim Asesor Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP kepada Calon Penyelenggara Diklat PIP	Belum terlaksana
90%	Berita Acara Tim Penilai Akhir menyampaikan rekomendasi pemohon yang layak diberikan akreditasi dengan melampirkan hasil penilaian akhir akreditasi kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Belum terlaksana
100%	Kepala BPIP menetapkan status akreditasi bagi lembaga penyelenggara diklat untuk menyelenggarakan program Diklat PIP dan menerbitkan sertifikat akreditasi penyelenggara Diklat PIP	Belum terlaksana

2. Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan, yaitu:

Berdasarkan target kinerja sebanyak 7 NSPK, telah disusun dan menunggu persetujuan pimpinan sebanyak 3 NSPK, yaitu:

- Rancangan Kurikulum Diklat PIP bagi Kepala Desa;
- Rancangan Kurikulum Diklat PIP bagi Komunitas; dan
- Rancangan Kurikulum Diklat PIP bagi PGRI.

Pada triwulan II dan III tahun 2025 akan dilakukan penyusunan sebanyak 4 NSPK Diklat PIP, yaitu: (1) Kurikulum Diklat PIP bagi Hakim, Jaksa, dan Pengacara; (2) Kurikulum Diklat PIP bagi Purnapaskibraka; (3) Kurikulum Diklat PIP bagi Organisasi Perempuan; dan (4) Kurikulum Diklat PIP bagi Anggota Partai Politik dengan melibatkan akademisi, kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, serta sasaran Diklat PIP. Pelibatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan yang membangun dalam menyusun NSPK

Diklat PIP. Juknis yang disusun tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam pelaksanaan Diklat PIP. Petunjuk teknis tersebut memuat cara pelaksanaan Diklat PIP sesuai sasarannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pemantauan dan evaluasi Diklat PIP. Untuk mengetahui bagaimana kebermanfaatan dokumen petunjuk teknis yang telah disusun, dalam beberapa kegiatan pelaksanaan Diklat, akan dimonitoring dan evaluasi menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang merupakan lampiran dari Dokumen Petunjuk Teknis Diklat PIP. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam pelaksanaan Diklat PIP berikutnya.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 33 Aktivitas Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Rencana Kerja Triwulan I (Jakarta, tanggal 10 Januari 2025)	
2.	Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Kerja Akreditasi Lembaga Diklat PIP Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Jakarta, tanggal 21 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Cetak Biru Diklat PIP (Jakarta, tanggal 23 Januari 2025)	
4.	Rapat Pembahasan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 (Jakarta, tanggal 3 Februari 2025)	
5.	Rapat Pembahasan Pemberdayaan Petunjuk Teknis Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP (Jakarta, tanggal 10 Februari 2025)	
6.	Rapat Penyusunan Bahan Ajar Bagi Calon Pengajar Diklat PIP Bersama Narasumber Psikolog (Jakarta, tanggal 28 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Penyusunan Bahan Ajar Diklat PIP (Jakarta, tanggal 12 s.d. 14 Maret 2025)	
8.	Koordinasi Lembaga Penyelenggara Diklat PIP yang Telah Diakreditasi (Jakarta, tanggal 18 s.d. 21 Maret 2025)	

D.3. Persentase Peserta Diklat Berkepribadian Pancasila Dengan Tingkat Baik

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik pada Tahun 2025 adalah 100%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 26% dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\left(a = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right) + \left(b = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right)}{2}$$

$$IKK = \frac{a + b}{2}$$

$$IKK = \frac{27,3\% + 12,29\%}{2} = 19,8\%$$

Keterangan :

IKK = persentase capaian indikator kinerja kegiatan

a = Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila

b = Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan:

- Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila
- Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 34 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila	6732	1840	27,3% (Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh Tahun 2025 yaitu:

- Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila, yaitu:
Paskibraka menjalankan penugasan sebanyak dua kali, yaitu pada HUT RI 17 Agustus pada tahun berjalan dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni pada tahun berikutnya. Setelah menjalankan penugasan pada Hari Lahir Pancasila, baru bisa disebut sebagai Purnapaskibraka. Purnapaskibraka ini selanjutnya akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) dan lulus diklat. Purnapaskibraka yang lulus diklat baru bisa diangkat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila (PDP). Diklat PIP untuk Purnapaskibraka dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui system *Learning Management System* (LMS). Tahun 2025 ini, jumlah Purnapaskibraka yang sudah difasilitasi dan dilakukan pembinaan adalah sejumlah 1840 orang.

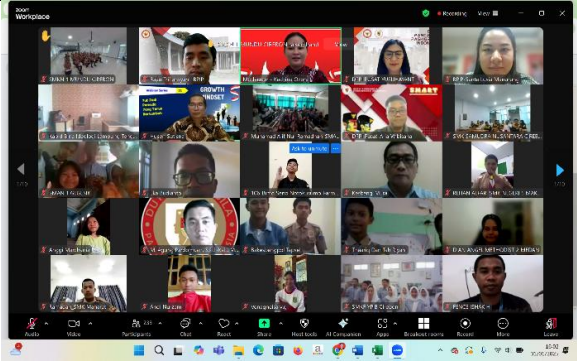
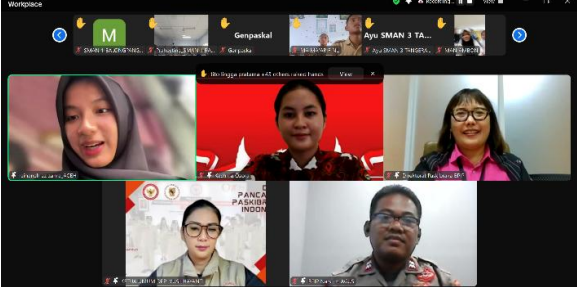
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Purna Paskibraka yang lulus}}{\text{Target Purnapaskibraka Duta Pancasila}} \times 100$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1840 \text{ orang}}{6732 \text{ orang}} \times 100\% = 27,3\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 35 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Persiapan Koordinasi Nasional, Bimtek Pembentukan Paskibraka Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pelaksana DPPI (Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 Januari 2025)	
2.	Diskusi Kelompok Terpumpun Tentang Identitas KelIndonesiaan Dalam Penggunaan Seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Jakarta, tanggal 14 s.d. 17 Januari 2025)	
3.	Finalisasi Rancangan Surat Edaran Pembentukan Paskibraka Tahun 2025 dan Asesmen Calon Pengurus Daerah DPPI (Jakarta, tanggal 14 s.d. 17 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Rapat Koordinasi Nasional Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Januari 2025)	
5.	Webinar Series 1 - "Yuk Jadi Pemuda yang Terus Bertumbuh" (Jakarta, tanggal 31 Januari 2025)	
6.	Webinar Series 2 - "Yuk Jadi Pemuda yang Terus Bertumbuh" (Jakarta, tanggal 14 Februari 2025)	
7.	Penyusunan Rancangan Rencana Induk Program Paskibraka (Jakarta, tanggal 3 Maret 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 20 Maret 2025)	

Tabel 2. 36 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila	Jumlah Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP	11.568	1.422	12,29% (Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh Tahun 2025 yaitu:

1. Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila, yaitu:

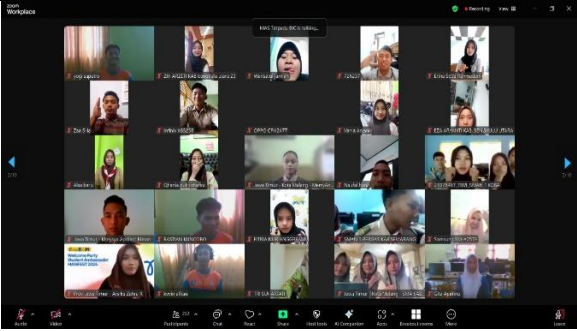
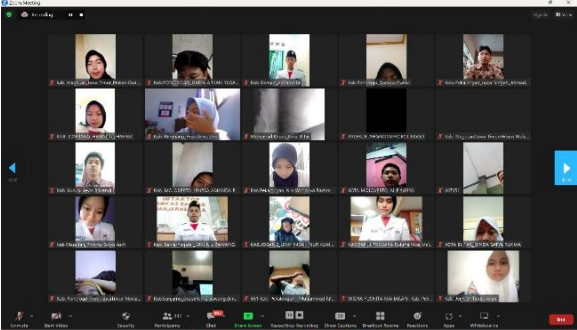
Berdasarkan pengukuran hasil capaian IKK pada Triwulan I Tahun 2025 untuk Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila sebesar 1.422 orang dari target RO 11.568 orang peserta sebesar 12,29%.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP}}{\text{Target Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP}} \times 100$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1.422 \text{ orang}}{11.568 \text{ orang}} \times 100\% = 12,29\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 37 Aktivitas Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Purnapaskibraka Tahun 2023 Angkatan V sebanyak 1.178 orang (Jakarta, tanggal 31 Januari 2025)	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Purnapaskibraka Tahun 2023 Angkatan VI dan VII sebanyak 244 orang (Jakarta, tanggal 10 Februari 2025)	
3.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Model Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, tanggal 23 s.d. 25 Februari 2025)	
4.	Penyusunan Rancangan Pembelajaran, <i>Learning Management System</i> , dan Instrumen Pemantauan Perkembangan Karakter Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 17 s.d. 19 Maret 2025)	

E. Terlaksananya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila adalah:

Tabel 2. 38 Indikator Kinerja Program Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KINERJA
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	28,6%	 28,6%
Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	10%	 10%
Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	25%	 25%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

E.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 28,6% .

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 39 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	1	28,6	28,6% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

- a. Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai dan menyelesaikan Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (100%) dibutuhkan 5 dokumen laporan penyusunan metode pengendalian (33%), 18 dokumen laporan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila internal dan eksternal (33%), dan 2 dokumen laporan penyampaian usulan langkah dan strategi(33%).

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I tahun 2025, laporan Rekomendasi dari kegiatan yang terkumpul adalah sebagai berikut:

1. Laporan Penyusunan Metode Pengendalian Program PIP;
2. Laporan rekomendasi IAP Provinsi Lampung Tahun 2023;
3. Laporan Pengendalian Internal Program Kegiatan PIP di BPIP;
4. Laporan Pengendalian PIP dengan Tema: “Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa” di Purwokerto;
5. Laporan penyampaian usulan langkah dan strategis Arah

Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Perilaku Toleran dan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat.

Adapun perhitungan capaian adalah sebagai berikut:

$$\text{Metode pengendalian} = \frac{\text{Laporan Metode Pengendalian hingga TW I}}{(1 \text{ dokumen} \times 5 \text{ Laporan Metode Pengendalian})} \times 33\%$$

$$\text{Metode pengendalian} = \frac{1}{5} \times 33\% = 6,6\%$$

$$\text{Pengendalian int dan ext} = \frac{\text{Laporan Pengendalian In dan Ex hingga TW I}}{(1 \text{ dokumen} \times 18 \text{ Laporan Rekomendasi Kegiatan})} \times 33\%$$

$$\text{Pengendalian int dan ext} = \frac{3}{18} \times 33\% = 5,5\%$$

$$\text{Usulan langkah strategis} = \frac{\text{Laporan kegiatan dan rekomendasi hingga TW I}}{(1 \text{ dokumen} \times 2 \text{ Laporan Rekomendasi Kegiatan})} \times 33\%$$

$$\text{Usulan langkah strategis} = \frac{1}{2} \times 33\% = 16,5\%$$

$$\text{Total akhir keseluruhan} = 6,6\% + 5,5\% + 16,5\% = 28,6\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka kegiatan pengendalian pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 40 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengendalian PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyerahan Penghargaan Bupati Paling Peduli dalam Pendidikan Karakter dan Kerukunan Umat Beragama (Klaten, tanggal 13 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Penyusunan Usulan Langkah dan Strategis Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Perilaku Toleran dan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama (Bandung, tanggal 15 s.d. 17 Januari 2025)	
3.	Rapat Pembahasan Capaian Program Kerja dan Kinerja Tahun 2024 Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Jakarta, tanggal 20 s.d. 21 Januari 2025)	
4.	Rapat Penyamaan Persepsi Pedoman Pengendalian, Evaluasi dan Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 6 Maret 2025)	
5.	Rapat Pembahasan Evaluasi Manajemen Resiko Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi bersama Biro Pengawasan Internal (Jakarta, tanggal 10 Maret 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Rapat Pengendalian Program Kegiatan PIP di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 18 s.d. 19 Maret 2025)	
7.	Rapat Penyusunan Metode Pengendalian Program PIP (Jakarta, tanggal 20 s.d. 21 Maret 2025)	
8.	Pendampingan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Tema: "Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa" (Purwokerto, tanggal 24 s.d. 25 Maret 2025)	

E.2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 10% telah dilakukannya Penyusunan Draf Pedoman Pengendalian dan Evaluasi (penyusunan metoda) dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{10\%}{1 (\text{rekomendasi})} \times 100\% = 10\%$$

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 41 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	1 10%	10% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

- Persentase rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam tahapannya rekomendasi evaluasi pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti sudah mencapai 10% dimana dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan:

- Penyusunan sistematika pedoman pengendalian dan evaluasi;
- Penyusunan tujuan pedoman pengendalian dan evaluasi dan kerangka pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan PIP;
- Penyusunan deskripsi dan mekanisme pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan PIP dan PIP Prioritas;
- Rapat Pembahasan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi(PPE) PIP Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dengan Seluruh Unit Kerja Deputi 5;
- Rapat Pembahasan PPE PIP dengan BHO dan Renkeu.

Adapun pedoman penilaian (*scoring*) capaian rincian *output* Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti, yaitu:

Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
0%	Fisik: Belum dilaksanakan	Belum terlaksana
20%	Tahap 1 : Penyusunan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi (penyusunan metoda): - Rapat Pembahasan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi(PPE) PIP Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dengan Seluruh Unit Kerja Deputi 5 - Rapat Pembahasan PPE PIP dengan BHO dan Renkeu - Uji coba PPE PIP - Evaluasi Uji coba dan Penetapan Peraturan PPE PIP $= \text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{4} \times 20\%$ $= 10\%$	Proses Pelaksanaan
40%	Tahap 2 : Penyusunan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi (penyusunan metoda): - Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi (Penyusunan Metoda) - Rapat Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi dengan BHO dan Renkeu - Rapat Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Settama dan Pimpinan - Uji coba Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila - Evaluasi Uji coba dan Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Belum terlaksana
60%	Tahap 3 : Penyusunan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi (penyusunan metoda): Koordinasi internal BPIP dalam Rangka Perumusan Indikator	Belum terlaksana

Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
	Instrumen b. Penyusunan Instrumen Evaluasi c. Uji coba Instrumen Evaluasi d. Evaluasi Uji coba dan Penetapan Instrumen Evaluasi	
80%	Tahap 4 : Penyusunan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi (penyusunan metoda): a. Evaluasi Implementasi PIP di Indonesia Bagian Barat b. Evaluasi Implementasi PIP di Indonesia Bagian Tengah c. Evaluasi Implementasi PIP di Indonesia Bagian Timur	Belum terlaksana
100%	Tahap 5 : Penyusunan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi (penyusunan metoda): a. Analisis dan Interpretasi Data Hasil Evaluasi b. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi c. Exspose Hasil Evaluasi Implementasi PIP dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi PIP	Belum terlaksana

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 42 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Kegiatan Direktorat Evaluasi Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 6 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Info Kinerja Tahun 2025 dengan Biro Perencanaan dan Keuangan (Jakarta, tanggal 16 Januari 2025)	
3.	Rapat Bimbingan Teknik Kearsipan pada Direktorat Evaluasi (Jakarta, tanggal 17 Januari 2025)	
4.	Pembahasan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BPKP (Jakarta, tanggal 22 Januari 2025)	
5.	Rapat Pembahasan Pedoman Evaluasi dengan Staf Khusus Dewan Pengarah dan Tim Internal BPIP (Jakarta, tanggal 31 Januari 2025)	

E.3. Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 25% $((37,5\% + 12,5\%) / 2) \times 100\%$ rata-rata capaian indikator.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(37,5\% + 12,5\%)}{2 (\text{rekomendasi kegiatan})} \times 100\% = 25\%$$

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 43 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang Diselesaikan	1	37,5%	100% (Rekomendasi)
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang Diselesaikan	1	12,5%	100% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

- Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang Diselesaikan

Dalam tahapannya Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang diselesaikan sudah mencapai 37,5% dimana saat telah melaksanakan 3 dari 8 tahapan dengan rincian sebagai berikut

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{8 \text{ tahapan rekomendasi kebijakan}}$$
$$= \frac{3}{8 \text{ tahapan}} = 37,5\%$$

1. melaksanakan Penyusunan Pedoman IAP dan SK Pendelegasian IAP dengan melaksanakan dengan menyelenggarakan :
 - Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila dan Pedoman Pengukuran Pelembagaan Pancasila (14 Februari 2025)
 - Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (24 Februari 2025)
2. Melaksanakan Penghitungan IAP dan penyusunan Laporan IAP dengan menyelenggarakan :
 - Penyusunan Rekomendasi Hasil Indeks Aktualisasi Pancasila Provinsi Lampung Tahun 2023 (23 s.d. 25 Januari 2025)
 - Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Podes (4 Indikator) pada IAP (18 Maret 2025)
3. Melaksanakan Pengembangan Metodologi IAP dengan menyelenggarakan :
 - Rapat Penyusunan Indikator IAP Mandiri (15 s.d. 17 Januari 2025)
 - Rapat Penyusunan Indikator Indeks Aktualisasi Pancasila Mandiri sila 3 dan 4 (7 Maret 2025)
 - Rapat Penyusunan Indikator Indeks Aktualisasi Pancasila Mandiri Sila 5 (11 Maret 2025) Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Kor (5 Indikator) pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (14 Maret 2025)
 - Rapat Finalisasi Penyusunan Indikator IAP Mandiri Sila 1 s.d. 5 (20 Maret 2025)

b. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang Diselesaikan

Dalam pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Hasil pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase rekomendasi kebijakan PIP yang ditindaklanjuti sebesar 25%, dimana saat telah melaksanakan 3 dari 8 tahapan dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{8 \text{ tahapan rekomendasi kebijakan}}$$

$$= \frac{1}{8 \text{ tahapan rekomendasi kebijakan}} = 12,5\%$$

Tabel 2. 44 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Program Kerja di Lingkungan Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP (Jakarta, tanggal 13 Januari 2025)	
2.	Rapat Penyusunan Indikator IAP Mandiri (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Penyusunan Rekomendasi Hasil Indeks Aktualisasi Pancasila Provinsi Lampung Tahun 2023 (Lampung, tanggal 23 Januari 2025)	
4.	Rapat Koordinasi Konsep Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 13 Februari 2025)	
5.	Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila dan Pedoman Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 14 Februari 2025)	
6.	Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (Jakarta, tanggal 24 Februari 2025)	
7.	Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 3 Maret 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Rapat Koordinasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Jakarta, tanggal 6 Maret 2025)	
9.	Rapat Penyusunan Indikator Indeks Aktualisasi Pancasila Mandiri sila 3 dan 4 (Jakarta, tanggal 7 Maret 2025)	
10.	Rapat Penyusunan Indikator Indeks Aktualisasi Pancasila Mandiri Sila 5 (Jakarta, tanggal 11 Maret 2025)	
11.	Rapat Koordinasi Pendampingan Manajemen Resiko Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 13 Maret 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Kor (5 Indikator) pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, tanggal 14 Maret 2025)	
13.	Rapat Koordinasi Awal Instrumen Penilaian Mandiri Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 17 Maret 2025)	
14.	Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Podes (4 Indikator) pada IAP (Jakarta, tanggal 18 Maret 2025)	
15.	Rapat Finalisasi Penyusunan Indikator IAP Mandiri Sila 1 s.d. 5 (Jakarta, tanggal 20 Maret 2025)	

F. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima berbasis Elektronik

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya meliputi kegiatan Kesekretariatan yang diarahkan pada Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik adalah:

Tabel 2. 45 Indikator Kinerja Program Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KET
Nilai Reformasi Birokrasi	77,32	77,32	Penilaian atas periode T.A. 2024
Kategori SAKIP	B	-	Capaian Indeks Sistem merit Tahun 2025 belum dilakukan
Nilai Sistem Merit	333	-	Capaian Indeks Sistem merit Tahun 2025 belum dilakukan
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	-	Opini atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 oleh BPK masih proses
Indeks SPBE	4	-	Penilaian atas indeks SPBE 2025 belum dilakukan
Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	-	Survei terhadap <i>Stakeholder</i> 2025 belum dilakukan

Fokus layanan yang dilakukan dalam rangka dukungan manajemen BPPI diberikan kepada pihak internal BPPI dan K/L Pembina sebagai mitra BPPI dalam upaya penguatan kelembagaan BPPI adalah:

1. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja;

2. Layanan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
3. Layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja;
4. Layanan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan;
5. Layanan pengawasan Internal; dan
6. Layanan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik menjadi perhatian: (i) Kementerian PAN dan RB, BKN dengan Nilai Reformasi Birokrasi, Kategori implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks SPBE, Nilai Sistem Merit, dan Indeks Kepuasan Masyarakat; (ii) Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini pada laporan keuangan, dan (iii) Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait perencanaan, keuangan, dan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.

Beberapa perkembangan capaian strategis tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik Triwulan I Tahun 2025, dicapai melalui kegiatan yaitu:

F.1. Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja

Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1	25	25% (Dokumen)
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	25%	25% (Dokumen)
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Layanan Manajemen Keuangan	1	25%	25% (Dokumen)
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Layanan Penyusunan Laporan Monev	4	25%	25% (Dokumen)
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	25%	25% (Dokumen)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada periode Triwulan I Tahun 2025 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Layanan yang telah dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen Perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Biro Perencanaan dan Keuangan sudah melakukan layanan Perencanaan sebaik mungkin misalnya dari Revisi DIPA dan revisi POK dalam rangka optimalisasi anggaran. Berikut adalah dokumen dan layanan perencanaan dan penganggaran yang telah diselesaikan Pada Tahun Anggaran 2025:

1. Revisi DIPA 3 kali;
2. Revisi POK 2 kali;
3. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja K/L T.A. 2026;
4. Rapat Dengar Pendapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2025;
5. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2025;
6. Rapat Penelaahan Efisiensi Anggaran T.A. 2025 bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas;
7. Rapat Dengar Pendapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025;
8. Rapat Konfirmasi Usul Anggaran Belanja Tambahan (ABT) BPIP Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 13 Maret 2025;
9. Forum Penyesuaian Renstra BPIP Tahun 2025-2029 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi pada tanggal 15 April 2025.

b. Layanan Manajemen Keuangan

Dalam menjalankan Layanan Manajen Keuangan Biro Perencanaan dan keuangan pada tahun 2025 Tahun 2025 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Pelaksanaan Layanan Keuangan;
3. Pelaksanaan audit keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pansila;

c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Dalam menjalankan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan I Tahun 2025 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Tahun 2024;
2. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Triwulan I 2025
3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025;

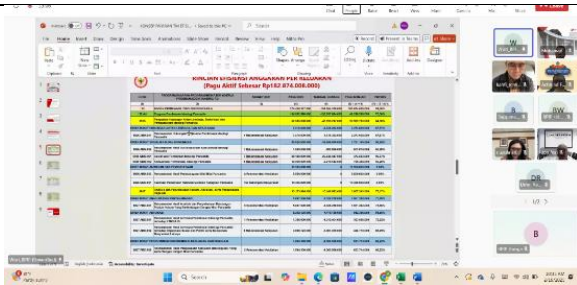
4. Pemenuhan Monev Pelaksanaan Anggaran melalui e-monev Bappenas dan smart-dja;
5. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2024;
6. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan;
7. Koordinasi dan penyusunan laporan pada SISMONEV KP KSP setiap triwulan;
8. Pelaksanaan Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Wilayah Sumatera dalam Rangka Penyusunan Renstra BPIP;
9. Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi bersama dengan BAPPENAS.
10. Pemutakhiran Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi di Lingkungan BPIP; dan
11. Mengumpulkan dan mengevaluasi aspirasi Masyarakat untuk membangun rencana Strategis BPIP tahun 2025-2029.

Aktivitas dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan, dan kinerja pada Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 47 Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja K/L T.A. 2026 (Jakarta, Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Pelaksanaan Koordinasi Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Unaudited & Audited Tahun Anggaran 2024 (Jakarta, Januari 2025)	
3.	Pelaksanaan Sosialisasi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Jakarta, tanggal 13 s.d. 15 Januari 2025)	
4.	Pelaksanaan Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Pedoman Teknis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 (Jakarta, tanggal 15 s.d. 18 Januari 2025)	
5.	Rapat Dengar Pendapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 4 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 13 Februari 2025)	
7.	Rapat Penelaahan Efisiensi Anggaran T.A. 2025 bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas (Jakarta, tanggal 19 Februari 2025)	
8.	Rapat Dengar Pendapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 11 Maret 2025)	
9.	Rapat Konfirmasi Usul Anggaran Belanja Tambahan (ABT) BPIP Tahun Anggaran 2025 (Jakarta, tanggal 13 Maret 2025)	
10.	Kegiatan Koordinasi Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Jakarta, tanggal 23 s.d. 25 Maret 2025)	

F.2. Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi Pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 48 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	Layanan Hukum	1	25%	25% (Layanan)
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	25%	100% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada periode Triwulan I Tahun 2025 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Uraian capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

1. Persentase rancangan produk hukum dilaksanakan dengan rincian *output* layanan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan hukum meliputi 2

(dua) klasifikasi utama sebagai berikut:

- a. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP; dan
- b. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penelaahan hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun masing-masing layanan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum

Rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan BPIP, sedangkan produk hukum BPIP meliputi Keputusan Dewan Pengarah/Kepala/Sekretaris Utama/Deputi BPIP, selain juga instruksi dan surat edaran.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tahapan kegiatan penyusunan Peraturan BPIP meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan. Dalam perencanaan akan ditetapkan Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala BPIP. Tahap penyusunan dilakukan oleh pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan penyelarasan internal oleh Biro Hukum dan Organisasi. Tahap

pembahasan merupakan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelahnya Rancangan Peraturan BPIP akan ditetapkan oleh Kepala BPIP untuk selanjutnya diundangkan melalui pencatatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tahap penyusunan keputusan dan produk hukum lainnya meliputi penyusunan dan pembahasan internal. Dalam tahap penyusunan dan pembahasan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, ahli, dan atau pihak lain yang terkait dengan materi produk hukum. Dalam beberapa penyusunan produk hukum memerlukan kegiatan studi banding dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintahan daerah sehingga produk hukum yang disusun tepat tujuan dan tepat sasaran serta dapat diimplementasikan.

b. Penelaahan Hukum dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1) Penelaahan hukum merupakan kegiatan untuk melakukan kajian terhadap produk hukum dan berbagai permasalahan hukum, yang terdiri atas analisis hukum, evaluasi produk hukum, mediasi, dan pendampingan hukum serta asistensi penyusunan naskah Kerja Sama berupa nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, kemitraan, dan naskah Kerja Sama lainnya.

Objek kajian penelaahan adalah lembaga (BPIP) maupun individual (Pegawai BPIP), termasuk juga kajian terhadap produk hukum BPIP dalam kerangka pembentukan atau evaluasi produk hukum BPIP. Sedangkan mediasi dan pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum yang memerlukan penanganan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Asistensi penyusunan naskah Kerja Sama dilaksanakan dalam rangka menguatkan materi Kerja Sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, kemitraan, dan naskah Kerja Sama lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

- 2) Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum di lingkungan BPIP meliputi pendokumentasian, penyebarluasan, dan pemeliharaan dokumen hukum. Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum tersebut telah diundangkan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP, dimana BPIP diproyeksikan JDIH BPIP menjadi sentra informasi dan dokumentasi hukum terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum merupakan kegiatan pengelolaan produk hukum BPIP meliputi pendokumentasian, inventarisasi, dan penyediaan informasi produk hukum. Pendokumentasian produk hukum BPIP dilakukan secara manual dan elektronik dalam JDIH BPIP yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Sedangkan penyediaan informasi hukum dilakukan melalui berbagai sarana, yaitu dapat melalui pencetakan/penjilidan produk-produk hukum BPIP, pamflet, *standing banner*, dan berbagai media lain serta media elektronik, selain juga melakukan sosialisasi dan/atau internalisasi produk hukum yang telah diterbitkan BPIP. Pengembangan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi

hukum juga memerlukan pembangunan perpustakaan *offline* dan *online*.

Sebagai salah satu sarana penyediaan informasi hukum berbasis elektronik, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan terhadap JDIH secara berkala sehingga seluruh produk hukum BPIP dan segala dokumen berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila dapat terinformasikan dan diakses oleh masyarakat luas dengan serta-merta.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian Layanan Hukum dilakukan melalui berbagai tahapan yang harus dibangun secara bertahap, berkelanjutan dan perlu melibatkan koordinasi serta Kerja Sama dengan instansi lain (K/L/Pemda) serta didukung dengan tersedianya infrastruktur (sarana prasarana) yang memadai.

Pada Triwulan I Tahun 2025, penyusunan rancangan Peraturan BPIP dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

Tabel 2. 49 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

PRODUK HUKUM BPIP		
Keputusan Kepala BPIP		Tanggal Disebarluaskan
1.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	24 Februari 2025



PRODUK HUKUM BPIP		
2.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2025 tentang Panitia Penyelenggara Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2025	10 Februari 2025
3.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2025	10 Februari 2025
4.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 8 Tahun 2025 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023	17 Maret 2025
5.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025	6 Mei 2025
6.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tim Penghapusan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi	17 Maret 2025



PRODUK HUKUM BPIP		
	Pancasila Tahun Anggaran 2025	
7.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	18 Maret 2025
8.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	17 Maret 2025
9.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	6 Mei 2025
10.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025	6 Mei 2025
11.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan	1 Maret 2025



PRODUK HUKUM BPIP		
	Pembinaan Ideologi Pancasila pada Bulan Ramadan 1446 Hijriah	
Keputusan Sekretaris Utama BPIP		
12.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025 (KPA)	6 Mei 2025
13.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	6 Januari 2025
14.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	7 Februari 2025
15.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Biro Pengawasan Internal Badan	6 Mei 2025



PRODUK HUKUM BPIP		
	Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025	
Surat Edaran Kepala BPIP		
16.	Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Kantor (Work From Office/WFO), dari Rumah (Work From Home/WFH), dan/Atau Lokasi Lain (Work From Anywhere/WFA) Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	19 Maret 2025
Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP		
17.	Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Periode Pelaporan Tahun 2024	5 Februari 2025
Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP		
18.	Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nomor 1 Tahun 2025	18 Januari 2025

PRODUK HUKUM BPIP		
	tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2025	

2. Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang di tindaklanjuti dilaksanakan dengan rincian *output* Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal meliputi 4 (empat) klasifikasi utama sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penataan Organisasi

Penataan organisasi menurut Peraturan Menteri PANRB terbaru, seperti PermenPANRB No. 7 Tahun 2023, diarahkan pada penyederhanaan birokrasi agar instansi pemerintah menjadi lebih lincah, efisien, dan adaptif. Salah satu langkah utamanya adalah penyederhanaan struktur organisasi dengan mengurangi jenjang jabatan struktural dan mengalihkan sebagian besar jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat profesionalisme ASN, serta meningkatkan kinerja berbasis hasil (*output* dan *outcome*).

Selain itu, penataan organisasi juga mencakup penerapan sistem kerja berbasis tim dan proyek (*team-based working*), pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan peran jabatan fungsional. Instansi

pemerintah didorong untuk membentuk tim kerja lintas unit yang fleksibel dan berbasis target, sekaligus memanfaatkan sistem digital untuk mendukung fleksibilitas dan transparansi. dengan pendekatan ini, diharapkan struktur organisasi pemerintah lebih dinamis dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Draft Dokumen Tindak Lanjut Kelembagaan dan Dokumen Perencanaan Reformasi Birokrasi
2. Menyusun Draft Laporan Rencana Tindak Lanjut Kelembagaan

b. Pelaksanaan Tata Kelola Internal

1. Tata Kelola Administrasi Biro Hukum dan Organisasi

Kinerja yang dilakukan terkait ketatusahaan adalah urusan tata usaha dan rumah tangga serta penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Hukum dan Organisasi.

Biro Hukum dan Organisasi di dalam Korespondensi yang terdiri Surat Masuk dan Surat Keluar mengalami perubahan terdiri dari Jumlah Kualitas dan Kuantitas. Didalam surat masuk yang meliputi nota dinas, memorandum, undangan, surat perintah, surat edaran, surat keputusan, intruksi atau surat edaran dari unit kerja lain. Surat Keluar terdiri dari nota dinas, memorandum, sprint,

undangan, dan surat keluar biasa.

2. Kepuasan Layanan Biro Hukum

Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Hukum dan Organisasi sebagai salah satu penyedia dukungan manajemen di Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu diselenggarakan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penilaian pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil Survei Kepuasan *Stakeholder* yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan *Stakeholder* dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat *Stakeholder*, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

c. Perencanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur negara agar lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Untuk memperkuat arah dan pelaksanaan reformasi ini, pemerintah telah menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 melalui Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020, yang kemudian disempurnakan dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan fokus reformasi dengan kondisi aktual, memperjelas hubungan sebab-akibat

antara program reformasi dan dampaknya terhadap pembangunan nasional, serta mendorong birokrasi yang lebih adaptif dan berdaya saing.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah mengeluarkan PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Peraturan ini menggantikan PermenPANRB No. 26 Tahun 2020 dan menetapkan kerangka evaluasi yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil. Melalui evaluasi ini, instansi pemerintah diharapkan dapat secara berkala menilai kemajuan reformasi yang telah dilakukan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien. Capaian Triwulan I Tahun 2024 adalah:

1. Draft Laporan Hasil Pelaksanaan RB BPIP Tahun 2024
 2. Draft *Road Map* Reformasi Birokrasi BPIP Tahun 2025-2029,
 3. Draft Peta Proses Bisnis BPIP
- d. Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPIP

Evaluasi SAKIP BPIP oleh Kementerian PAN-RB baru sudah dilakukan sejak tahun 2021. Pada Tahun 2025 ini berdasarkan hasil evaluasi yang diakses melalui sistem informasi lembar kerja evaluasi RB pada aplikasi portal.rb, menunjukkan penilaian RB periode Tahun 2024 BPIP dimana BPIP memperoleh Nilai Reformasi 77,32 atau predikat “BB”. Nilai ini menunjukkan kenaikan 10,5 poin dibandingkan pada Tahun 2023 BPIP memperoleh nilai 66,82 dan peningkatan predikat “B”

menjadi “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun Selama Triwulan I Tahun 2025 telah disusun Draft SK TIM Reformasi Birokrasi 2025

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi pada Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 50 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Pemutakhiran Data Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan BPIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 14 Januari 2025)	
2.	Rapat Pemutakhiran Data Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan BPIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 17 Januari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Audiensi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten (Klaten, tanggal 16 Januari 2025)	
4.	Kegiatan Penyelarasan Internal Keputusan Kepala BPIP dan Internalisasi Strategi Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi (Bogor, tanggal 22 s.d. 25 Januari 2025)	
5.	Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Evaluasi dan Register Risiko Operasional Reformasi Birokrasi Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 11 Februari 2025)	
6.	Rapat Penyelarasan Internal Rancangan Keputusan Kepala BPIP tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 13 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Kegiatan Kaji Banding pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Arsip Nasional (Jakarta, tanggal 17 Februari 2025)	
8.	Kegiatan Auidensi Evaluasi Produk Hukum mengenai Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung, tanggal 25 s.d. 26 Februari 2025)	
9.	Rapat Penyelarasan Internal Lanjutan Rancangan Keputusan Kepala BPIP tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 27 Februari 2025)	
10.	Rapat Evaluasi Hasil Sementara dan Persiapan Masa Sanggah Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 5 Maret 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Rapat Identifikasi Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dalam Rencana Strategis BPIP 2025 – 2029 pada Lingkup Deputi (Jakarta, tanggal 17 Maret 2025)	
12.	Kegiatan Penyusunan Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025-2029 (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Maret 2025)	

F.3. Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja Pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 51 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan kepada unit kerja atas layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	Layanan Manajemen Aset	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan BMN	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Umum	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Perkantoran	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Sarana Internal	40	25%	25% (unit)
	Layanan Manajemen SDM	441	25%	25% (Layanan)
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	95	97	102% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan I Tahun 2025 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Beberapa capaian tersebut didukung sebagai berikut:

a. Barang Milik Negara dan Layanan BMN

Merupakan layanan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengendalian, serta pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, layanan BMN telah melakukan penyusunan beberapa laporan seperti Laporan Barang Pengguna Unaudited Tahun Anggaran 2024, Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2025, dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2024. Laporan Barang Pengguna Unaudited Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang berisi tentang akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan akuntansi Barang Milik Negara yang meliputi Neraca, Laporan Barang Milik Negara, dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara. Sedangkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian merupakan laporan pemantauan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, dan Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya.

Penyusunan Laporan yang telah dilakukan pada tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan manajemen dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara.

b. Layanan Umum

Pengelolaan Barang Milik Negara yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimulai dari tahap

perencanaan kebutuhan khususnya Kendaraan dan anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Negara yang saat ini berada pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

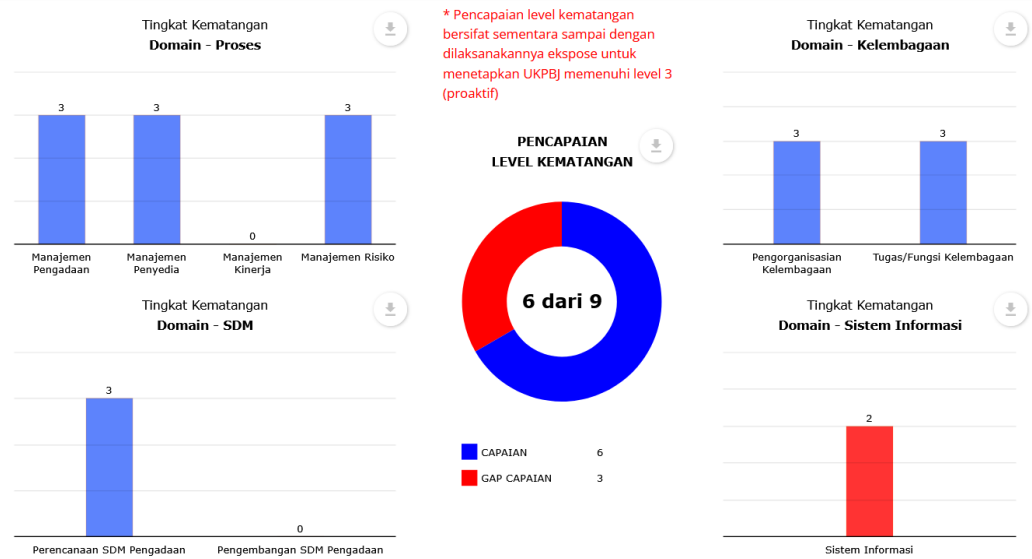
Pada Triwulan I Tahun 2025, Layanan Umum masih berusaha untuk meningkatkan nilai Pencapaian Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dimana pada hasil dari Penilaian ITKP Tahun 2024 masih kurang memuaskan.

Beberapa Rencana dalam peningkatan nilai ITKP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kuota Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ)
2. Peningkatan kompetensi SDM Pengadaan melalui pelatihan pengelolaan e-katalog bagi pelaku PBJ pada bulan Mei 2025
3. Peningkatan Tingkat Kematangan UKPBJ dengan memenuhi standar SPSE *Admin Agency*
4. Peningkatan produk dalam negeri di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Untuk tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPIP yang merupakan tingkat kesiapan dan kemampuan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa. Kematangan UKPBJ diukur menggunakan Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ. Model ini mencakup empat domain dan sembilan variabel. Tujuan dari pengukuran kematangan UKPBJ adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kemampuannya dalam menyesuaikan diri. Pengukuran ini juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah korupsi.

UKPBJ BPIP saat ini telah mencapai tingkat kematangan proaktif pada 6 dari 9 variabel.



Beberapa langkah yang dilaksanakan oleh UKPBJ BPIP untuk meningkatkan level kematangan UKPBJ BPIP sebagai berikut:

1. Mengusulkan pendirian LPSE mandiri ke LKPP agar menjadi Service Provider dari yang sebelumnya Agency pada LPSE Kementerian Hukum dan HAM;
2. Membuat perencanaan dan laporan kinerja UKPBJ sebagai laporan kinerja tahunan;
3. Membuat laporan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan personal UKPBJ, serta memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi pelaku pengadaan.

c. Layanan Perkantoran

Pada Triwulan I Tahun 2025, layanan perkantoran melakukan dukungan perkantoran seperti proses pembayaran gaji dan tunjangan/hak keuangan pejabat dan pegawai BPIP dari Dewan Pengarah hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Layanan perkantoran juga memberikan layanan berupa dekorasi kantor dan proses dukungan pemeliharaan peralatan dan mesin sehingga menunjang tugas dan fungsi pegawai.

Pengelolaan kendaraan dinas seperti pemeliharaan dan pembayaran pajak dilakukan sehingga pejabat atau pegawai yang menggunakan fasilitas tersebut terasa aman pada saat menggunakan dan tidak mengalami hambatan.

d. Layanan Manajemen SDM

Pada Triwulan I Tahun 2025, Layanan manajemen SDM telah melakukan Layanan bagi seluruh Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang rutin dilaksanakan, Dimana telah dilakukan. Selain itu pada Triwulan I tahun 2025 memiliki beberapa pencapaian yaitu:

- a. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi (SINERGI)
- b. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMANTEN)

e. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Pada Triwulan I Tahun 2025, Layanan Pendidikan Pelatihan yang telah dilakukan yaitu pelatihan teknis dan pelatihan fungsional kepada 97 orang dengan detail sebagai berikut:

1. Pelatihan Jarak Jauh Pemanfaatan Google Workspace untuk Administrasi Perkantoran dengan jumlah 54 pegawai;
2. Pelatihan Jarak Jauh Desain Grafis dengan jumlah 36 pegawai;
3. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama dengan metode *E-Learning* dengan jumlah 1 pegawai; dan
4. Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan III Tahun 2025 dengan jumlah 6 orang.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja pada Triwulan Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 52 Aktivitas Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
2.	Kegiatan Layanan Dukungan Voucher Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
3.	Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Menghasilkan Penerimaan Negara Bukan	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Pemeriksaan dan stok opname barang persediaan bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan RI	
5.	Mengikuti kegiatan Indonesia Sustainable Procurement Expo dan Busines Mactchinng (Jakarta, tanggal 11 s.d. 12 Februari 2025)	
6.	Rapat Koordinasi Laporan Manajemen Risiko Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (Jakarta, tanggal 28 Februari 2025)	
7.	Sosialisasi Mekanisme Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan Rapat dari Jabatan Lain (Jakarta, tanggal 28 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Koordinasi Tindak Lanjut Pengusulan Jabatan Fungsional Pembina Ideologi Pancasila dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Jakarta, tanggal 11 Maret 2025)	
9.	Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Ideologi Pancasila di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 21 Maret 2025)	
10.	Rapat Koordinasi Pembayaran Penghasilan Pegawai Saat Proses Pemeriksaan Hukuman Disiplin di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 26 Maret 2025)	

F.4. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 53 Indikator Kinerja Kegiatan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Layanan Protokoler	1	25%	25% (Layanan)
Predikat keterbukaan informasi publik BPIP	Layanan Tata Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik	1	25%	25% (Layanan)
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	25%	25% (Layanan)
Kategori Nilai pengawasan kearsipan	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	25%	25% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat, dan administrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada tahun 2025 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Adapun layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Layanan Protokoler secara khusus bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada Pimpinan, dengan berfokus pada

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan stake holder sehingga mewujudkan tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan, pengamanan, dan administratif yang diberikan. Beberapa aktifitas kegiatan yang diberikan dalam layanan protokoler meliputi:

1. Pengkoordinasian Layanan Tata Usaha;
2. Pengkoordinasian Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan;
3. Penyusunan Agenda Pimpinan;
4. Fasilitasi dan Pendampingan Acara Pimpinan;
5. Penyusunan Materi Pimpinan;
6. Penyelenggaraan Rapat Unsur Pimpinan;
7. Fasilitasi Penerimaan Tamu Pimpinan;
8. Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila;
9. Pelatihan Layanan Keprotokolan; dan
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Layanan Protokoler.

Layanan Protokoler telah dilaksanakan Triwulan I Tahun 2025. Kegiatan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi di wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Adapun layanan yang dilakukan berfokus pada pendampingan Unsur Pimpinan, Pengurusan tata usaha dan rumah tangga, serta pembuatan materi (berupa *speech notes* dan/atau bahan paparan), rapat pimpinan dan protokol kegiatan Unsur Pimpinan yang sejalan dengan pendampingan unsur pimpinan.

b. Layanan Tata Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik

Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah suatu metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana lembaga publik, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, memenuhi prinsip transparansi dalam penyediaan informasi kepada masyarakat.

Penilaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa publik memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, dan proses administrasi negara, yang pada akhirnya mendukung akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan publik.

Penilaian IKIP berlandaskan pada berbagai aturan hukum yang mengatur hak akses informasi publik, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut. Selain itu, aturan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi juga diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (KIP) seperti Peraturan KIP No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Secara umum, penilaian IKIP dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana badan publik memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Indikator-indikator tersebut dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan Informasi: Mengukur sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara terbuka, baik melalui website atau media lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP.
2. Aksesibilitas Informasi: Menilai kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi yang disediakan, termasuk kemudahan navigasi pada situs web badan publik, serta cara dan prosedur untuk mendapatkan informasi.

3. Kualitas Informasi: Mengevaluasi kelengkapan, kejelasan, dan ketepatan waktu informasi yang disediakan oleh badan publik, apakah informasi tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Informasi.
4. Pelayanan Permohonan Informasi: Mengukur responsivitas dan efisiensi dalam menangani permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat, serta apakah prosedur yang diikuti transparan dan tidak berbelit-belit.
5. Partisipasi Masyarakat: Mengidentifikasi sejauh mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan atau pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan publikasi informasi.
6. Sanksi dan Pengawasan: Melihat sejauh mana badan publik mematuhi aturan keterbukaan informasi, serta adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang diberlakukan jika badan publik gagal memenuhi kewajibannya.

Penilaian terhadap indikator-indikator tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi atau lembaga independen yang ditunjuk, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang tingkat keterbukaan informasi suatu badan publik. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna memperkuat demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

Adapun beberapa hal yang sudah dilakukan oleh BPIP dalam proses penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik meliputi:

1. Penilaian atas sarana dan prasarana BPIP;
2. Penilaian atas kualitas informasi yang diberikan BPIP kepada publik;

3. Penilaian atas jenis informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
4. Penilaian atas komitmen BPIP melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Penilaian atas inovasi dan strategi dalam BPIP; dan
6. Penilaian atas digitalisasi di lingkungan BPIP.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025 sampai saat ini masih belum dilakukan.

c. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan sebagai pengukuran indeks kinerja. Tujuan dari pengukuran ini mencakup:

1. Perencanaan dan Pengambil Keputusan:
Memastikan data dan informasi arsip yang akurat untuk mendukung perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang efektif .
2. Dukungan Pelayanan Publik:
Menyediakan akses yang cepat dan akurat terhadap informasi arsip yang diperlukan untuk mendukung pelayanan publik.
3. Pelindungan Terhadap Hak Keperdataan Rakyat:
Memastikan keamanan dan integritas dokumen penting seperti buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, ijazah, dan sertifikat.
4. Bahan Pertanggungjawaban:
Menyediakan basis data yang dapat diandalkan untuk pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan organisasi.
5. Pelindungan Aset dan Kekayaan Intelektual:
Menjaga keberlanjutan dan keutuhan informasi yang berharga sebagai aset dan kekayaan intelektual organisasi.

6. Pembelajaran Bagi Generasi Sekarang dan yang Akan Datang:

Menyimpan dan menyajikan informasi yang berharga sebagai sumber pembelajaran bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

7. Identitas dari Memori Kolektif:

Menyajikan dan memelihara arsip sebagai identitas dan memori kolektif masyarakat.

8. Pelindungan Eksistensi Bangsa (Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa):

Menggunakan arsip sebagai alat pemersatu dan penjaga eksistensi bangsa.

9. Sebagai Alat Bukti Hukum:

Menyediakan arsip sebagai bukti hukum yang sah dan dapat diandalkan.

dengan mengukur indeks kinerja Layanan Penyelenggaraan Kearsipan melalui indikator ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem kearsipan berkontribusi secara positif pada tujuan-tujuan strategis yang lebih luas. Pencapaian Layanan Penyelenggaraan Kearsipan pada tahun 2025 secara pengukuran Nasional masih belum dilakukan, sedangkan capaian tahun 2024 BPIP telah berhasil mendapatkan nilai hasil Pengawasan Kearsipan yaitu 81,32 Kategori A (Memuaskan) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu kategori BB (Sangat Baik).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menetapkan 4 (empat) instrumen kearsipan, yaitu berupa Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Dinamis (SKKAD), dan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pengelolaan Kearsipan juga telah aktif berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Serta telah menjadi anggota Sistem

Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat dan administrasi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 54 Aktivitas Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pendampingan Kegiatan Unsur Pimpinan-Dewan Pengarah (Protokol, Tata Usaha, dan Peliputan) (Januari s.d. Maret 2025)	
2.	Ratas Terbatas Unsur Pimpinan BPIP (Januari s.d. Maret 2025)	
3.	Rapat Pleno Unsur Pimpinan BPIP (Januari s.d. Maret 2025)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Rapat Optimalisasi Layanan Keprotokolan, Kehumasan dan Administrasi (Bogor, tanggal 8 Januari 2025)	

F.5. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP Pada Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Kegiatan pengawasan internal di lingkungan BPIP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Layanan Audit Internal	1	25%	25% (Dokumen)
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP	2,5	25%	25% (Nilai)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen pengawasan internal adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%.

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 Organisasi dan tata Kerja BPIP Bahwa dalam melaksanakan tugas Biro

Pengawasan Internal mempunyai Tugas dan fungsi melakukan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama. Sebagaimana Keputusan Sekretaris Utama Nomor 5 tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Biro Pengawasan Internal Tahun 2025 dimana memiliki Program Kerja, antara lain Audit, Reviu, Evaluasi, Pengawasan Lainnya.

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;
2. Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d 5); dan
3. Prosentase Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator atau alat ukur dalam mencapai sasaran kegiatan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan Sasaran Program. Di samping itu indikator kinerja kegiatan digunakan untuk mengukur efektivitas perencanaan pengawasan Biro Pengawasan Internal. Indikator Kinerja Biro pengawasan Internal 2 (dua) sasaran kegiatan Perjanjian Kinerja dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu:

- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;

Pada Triwulan I Tahun 2025 Capaian indikator kinerja kegiatan pelaksanaan manajemen pengawasan internal pada indikator kinerja kegiatan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dimana merupakan hasil

pengawasan dari evaluasi BPK yang telah ditindaklanjuti capaian dengan persentase 25%. (Layanan selama 3 bulan).

b. Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d 5);

Belum terdapat informasi mengenai capaian kinerja atas IKK ini dalam Triwulan I karena pelaksanaan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi baru dapat dilaksanakan pada Bulan Juli 2025. Adapun skor Evaluasi terakhir yang telah disampaikan oleh BPKP selaku Instansi Pembina dan Pengawasan dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terhadap BPIP adalah 3,009 (Tahun 2024).

Hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Triwulan I hingga Triwulan IV telah disampaikan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko BPIP Tahun 2025 sesuai Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 4 Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

1. Pemenuhan Area of Improvement atas Pelaksanaan Evaluasi pada tahun sebelumnya;
2. Penyediaan Jasa Konsultansi Pendampingan atas Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan BPIP kepada seluruh Unit Kerja;
3. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan BPIP;
4. Penyediaan Jasa Konsultansi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi; hingga
5. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi.

Adapun detail mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dilakukan oleh Biro Pengawasan

Internal yang telah dilakukan sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 56 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perencanaan Pengawasan PKPT Januari s.d Maret	Jumlah	
			Target Januari s.d Maret	Realisasi Januari s.d Maret
1.	Jumlah Laporan Evaluasi, Reviu, Audit, Pemantauan dan Pengawasan lainnya	Jumlah Laporan Hasil Audit	3 Laporan	-
		Jumlah Laporan Hasil Reviu	10 Laporan	4 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan	8 Laporan	-
		Jumlah Lapooran Hasil Evaluasi	6 Laporan	3 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lainnya	13 Laporan	-

Rincian lebih Lanjut target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Biro Pengawasan Internal Triwulan I Tahun 2025 telah menghasilkan beberapa dokumen yaitu:

1. Jumlah realisasi laporan hasil Reviu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Laporan Reviu
1.	Laporan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024
2.	Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024 (Unaudited)
3.	Laporan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
4.	Laporan Reviu Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2025

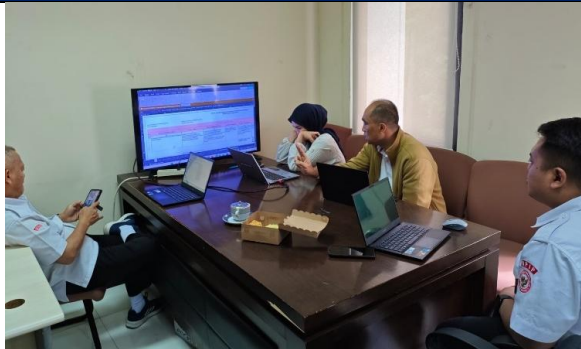
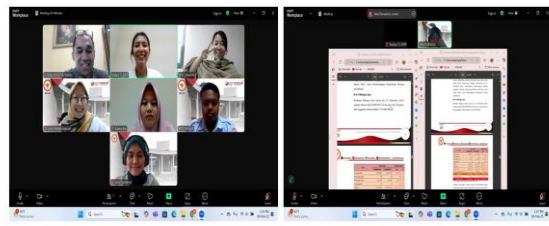
2. Adapun jumlah realisasi laporan hasil Evaluasi adalah sebagai berikut:

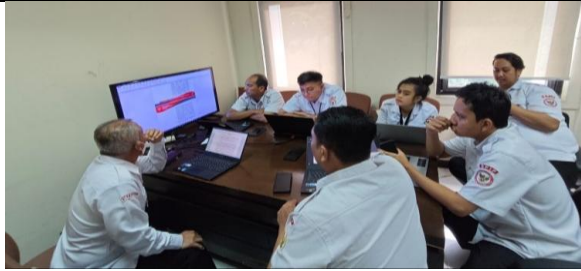
No.	Nama Evaluasi
1.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3.	Laporan Konsultasi Manajemen Risiko

3. Belum ada realisasi laporan hasil Pengawasan Lainnya

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 57 Aktivitas Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 2 Januari s.d. 31 Januari 2025)	
2.	Reviu Laporan Keuangan (<i>Unaudited</i>) (Jakarta, tanggal 3 s.d. 10 Januari 2025)	
3.	Pendampingan dan Koordinasi atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2024 pada BPIP dan Instansi Lain Terkait di DKI Jakarta dan Riau (Jakarta, tanggal 3 s.d. 23 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 13 Februari 2025)	
5.	Persiapan <i>Entry Meeting</i> Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Jakarta, tanggal 3 Februari 2025)	
6.	Tindak lanjut Nota Dinas Kepala Biro Pengawasan Internal Nomor 101/PW/07/2024/TU. WASNAL tentang Notisi Penilaian dan Pemetaan Strategis Risiko Operasional BPIP Semester 1 Tahun 2024) (Jakarta, tanggal 3 s.d. 4 Februari 2025)	
7.	Layanan Konsultasi Manajemen Risiko (Jakarta, tanggal 5 s.d. s.d. 28 Februari 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Pendampingan atas Pelaksanaan Uji Petik di Provinsi Riau dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) BPIP Tahun 2024 oleh Tim Pemeriksa BPK RI (Jakarta, tanggal 23 s.d. 28 Februari 2025)	
9.	Tindaklanjut Evaluasi Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024 (Jakarta, tanggal 3 Maret 2025)	
10.	Rapat Kerja Teknis Tindaklanjut atas Hasil Pengawasan Program P3DN serta Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 pada BPIP (Jakarta, tanggal 20 Maret 2025)	
11.	Pendampingan Kegiatan Apel Pengecekan Kendaraan Operasional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 20 Maret 2025)	

F.6. Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Triwulan I Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 58 Indikator Keluaran Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	Layanan Data dan Informasi	1	25%	25% (Layanan)
	Indeks SPBE	2,50	25%	25% (Nilai)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen data dan informasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Tahun 2025 telah terlaksana layanan selama 3 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 25%. Berikut adalah Layanan yang telah diberikan Pusat Data dan Teknologi sampai dengan:

Di Triwulan I Tahun 2025 ini, Pusat Data dan Teknologi Informasi, telah melakukan beberapa pencapaian guna mendukung tercapainya nilai indeks SPBE yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Saat ini sudah dilaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi BPIP. Berikut rincian pencapaian hingga bulan September 2025, antara lain:

1. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting dalam pemerintahan karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa layanan TIK sangat penting dalam konteks pemerintahan:

- Peningkatan Efisiensi Administrasi

Penggunaan TIK memungkinkan untuk mengotomatiskan banyak proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual, yang mengurangi beban kerja dan meningkatkan kecepatan pemrosesan data

- Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem informasi yang transparan memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran dikelola, bagaimana kebijakan diambil, dan bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.

- Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat dan Akurat

dengan TIK, data yang terkumpul bisa diproses dan dianalisis dengan cepat, memberikan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan.

- Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah

TIK memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai lembaga pemerintahan. Sistem berbasis digital memungkinkan berbagai instansi untuk berbagi informasi dan beKerja Sama dalam menangani isu-isu nasional dengan lebih Efektif . Misalnya, aplikasi SAKTI untuk penganggaran, Srikandi untuk persuratan, aplikasi Transparansi untuk Paskibraka, dan lain sebagainya.

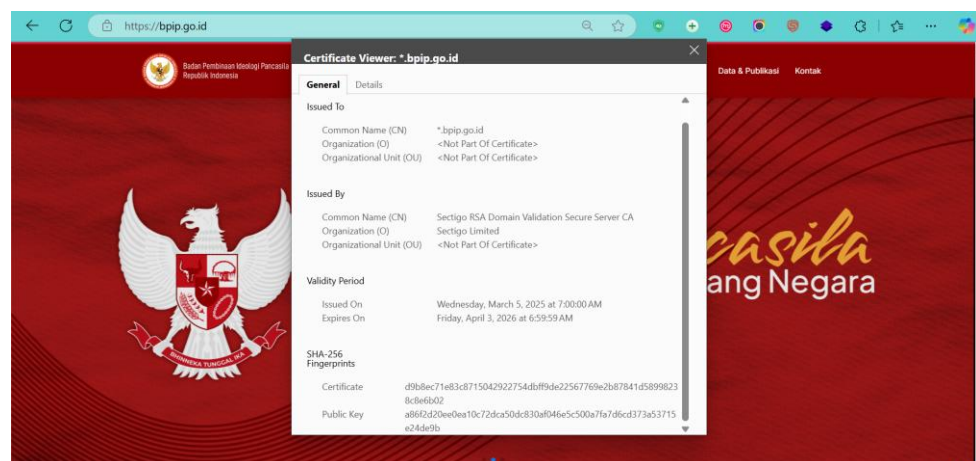
- Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Data

Teknologi memungkinkan pemerintah untuk mengamankan data sensitif. Sistem keamanan yang baik dapat melindungi data dari ancaman peretasan, penyalahgunaan, atau kebocoran informasi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP telah melaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi dalam rangka memenuhi sasaran kinerja layanan TIK. Berikut rincian pencapaian sampai dengan bulan Maret 2025, antara lain:

- a. Pemasangan *Secure Socket Layer (SSL) Website* BPIP Periode 2025-2026

Pusat Data dan Teknologi Informasi telah melakukan pembaharuan periodiasi pada SSL untuk website-website BPIP untuk menjamin keamanan website BPIP:



- b. Pemasangan *IT Security Sensor* Kementerian Komunikasi dan Digital pada 75 VM

Permohonan ke Kementerian Komdigi, untuk proses pemasangan di dashboard. Dilakukan melalui portal layanan aduan dan tiket ke <https://pdn.layanan.go.id> . Permohonan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2025. Per Tanggal 8 April 2025

telah di lakukan pemasangan pada 75 VM BPIP yang terdapat di Layanan Pusat Data Nasional milik Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sehingga Pemantauan Keamanan Sistem Server BPIP telah di perkuat.

REQ-KMF-032025-0089179	Pemohonan Instalasi EDR pada VM-VM BPIP di PDN 21 Maret 2025	Closed	21 Mar 2025 12:45:31 WIB
------------------------	--	--------	--------------------------

c. Pemasangan *IT Security Sensor* pada *Server-Server* BPIP di PDN

Sensor yang digunakan menggunakan Garuda *Cybereason* dan dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital. Digunakan untuk memantau keamanan pada sisi server dan aplikasi guna menghindari eksploitasi yang tidak diingingkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Showing 1-75 results												Updated a few seconds ago	Columns
☐	Machine name	FQDN	Data collection	Site	Sensor version	Last update st...	Last seen	First seen	OS	Internal IP addr...	Fileless Protect...	Last signatures...	Signa
☐	csirpancasila	csirpancasila	Enabled	Primary	23.2.222.0	Succeeded		March 24, 2025 ...	Linux	10.118.0.13	Disabled	April 13, 2025 at...	Preve
☐	localhost.localdomain	localhost	Enabled	Primary	23.2.222.0	Succeeded		March 24, 2025 ...	Linux	10.118.0.53	Disabled	April 13, 2025 at...	Preve
☐	localhost.localdomain	localhost	Enabled	Primary	23.2.222.0	Succeeded		March 24, 2025 ...	Linux	10.118.0.37	Disabled	April 13, 2025 at...	Preve
☐	mail.bpip.go.id	mail.bpip.go.id	Enabled	Primary	23.2.222.0	Succeeded		March 24, 2025 ...	Linux	10.118.0.10	Disabled	April 14, 2025 at...	Preve
☐	surel.bpip.go.id	surel.bpip.go.id	Enabled	Primary	23.2.222.0	Already up to d...		August 27, 2024...	Linux	202.10.51.23	Disabled	April 14, 2025 at...	Preve
☐	vadivokasi	vadivokasi	Enabled	Primary	23.2.222.0	Succeeded		March 24, 2025 ...	Linux	10.118.0.48	Disabled	April 13, 2025 at...	Preve

d. Proses *Backup* Aplikasi dan Server BPIP

Proses *Backup* pada Aplikasi dan Server BPIP di Pusat Data Nasional telah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital diantaranya:

➤ **Backup Server Priority Tahap 2**

REQ-KMF-072024-07510	Nama VM	Keterangan
Tahap 2 Jumlah 15 VM Berhasil Terbackup : 15 VM	VM07SPG-DBPROD	Terbackup
	VM08SPG-SSOPROD	Terbackup
	VM09SPG-APIPROD	Terbackup
	VM23SDMAPP-BPIP	Terbackup
	VM29HELPDESK-BPIP	Terbackup
	VM37ESIGN-BPIP	Terbackup
	VM39SIMPATI-BPIP	Terbackup
	VM44SELTAR-BPIP	Terbackup
	VM54SARPRAS-BPIP	Terbackup
	VM55FILESERVER-BPIP	Terbackup
	VM58DatabaseE-SKP	Terbackup
	VM60StuntingBPIP	Terbackup
	VM63KEHADIRAN	Terbackup
	VM72Evaluasi	Terbackup
	VM73Simata	Terbackup

➤ **Backup Server Priority Tahap 3**

REQ-KMF-072024-07727	Nama VM	Keterangan
Tahap 3 Jumlah 26 VM Berhasil Terbackup : 26 VM	VM01SDI-PRODWEB	Terbackup
	VM02SDI-PRODAPP	Terbackup
	VM03SDI-PRODDDB	Terbackup
	VM11DPPI-BPIP	Terbackup
	VM13CSIRT-BPIP	Terbackup
	VM16PPID-BPIP	Terbackup
	VM18JURNAL-BPIP	Terbackup
	VM20BMN-BPIP	Terbackup
	VM21IKON-BPIP	Terbackup
	VM24LMS-BPIP	Terbackup
	VM28MANRISK	Terbackup
	VM32DIKLAT-BPIP	Terbackup
	VM34RAKER-BPIP	Terbackup
	VM41EAUDIT-BPIP	Terbackup
	VM42SPBE-BPIP	Terbackup
	VM46SNIPPER-BPIP	Terbackup
	VM47HARLAH-BPIP	Terbackup
	VM58DatabaseE-SKP	Terbackup

➤ Backup Server Priority Tahap 4

Report Backup
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

REQ-KMF-082024-07943		
No	VM Name	Note
1.	VM51ERB-BPIP-AVYV	Terbackup
2.	VM45SIMPUL-BPIP-4pfF	Terbackup
3.	VM17SIPENDEKAR-gR4b	Terbackup
4.	VM49SERDADU-BPIP-4EII	Terbackup
5.	VM30GLPI-BPIP-CIB9	Terbackup
6.	VM40SIPERJADIN-BPIP-xGhn	Terbackup
7.	VM36WAZUH-BPIP-CSIRT-nn4v	Terbackup
8.	VM67RegisDiklat-Prod-hWez	Terbackup
9.	VM04SPG-DBDEV-HIIIm	Terbackup
10.	VM05SPG-SSODEV-e4FR	Terbackup
11.	VM53EsignDev-BPIP-2gcV	Terbackup
12.	VM56E-SKPDEV-BPIP-sPIG	Terbackup
13.	VM62JDIH-DEV-U42w	Terbackup
14.	VM35SIFASPIM-K1mJ	Terbackup
15.	VM48ADVOKASI-BPIP-wmBH	Terbackup
16.	VM33GLPI-DEV-xLAg	Terbackup
17.	VM52PORTALDEV-BPIP-BhA1	Terbackup
18.	VM27SILARAS-cXjK	Terbackup
19.	VM10MAIL-BPIP-FLqV	Terbackup
20.	VM64SDIDEV-BPIP-YrNO	Terbackup
21.	VM50SIPERJADIN-DEV-M3x8	Terbackup
22.	VM06SPG-APIDEV-iS0j	Terbackup
23.	VM19APII-KINERJA-i5QW	Terbackup
24.	VM26CLEAR-HOUSE-IiU0	Terbackup

➤ Backup Server Priority Tahap 5

Report Backup

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

REQ-KMF-012025-0088556	Nama VM	Keterangan
Tahap 5 Jumlah 8 VM Berhasil Terbackup : 8 VM	VM75KERJASAMA	Terbackup
	VM77DB-LMSDIKLAT	Terbackup
	VM78PRTG-BPIP	Terbackup
	VM79SINERGI-BPIP	Terbackup
	VM80Paskib2023	Terbackup
	VM81Paskib2024	Terbackup
	VM82Paskib2025	Terbackup
	VM83PaskibDashboard	Terbackup

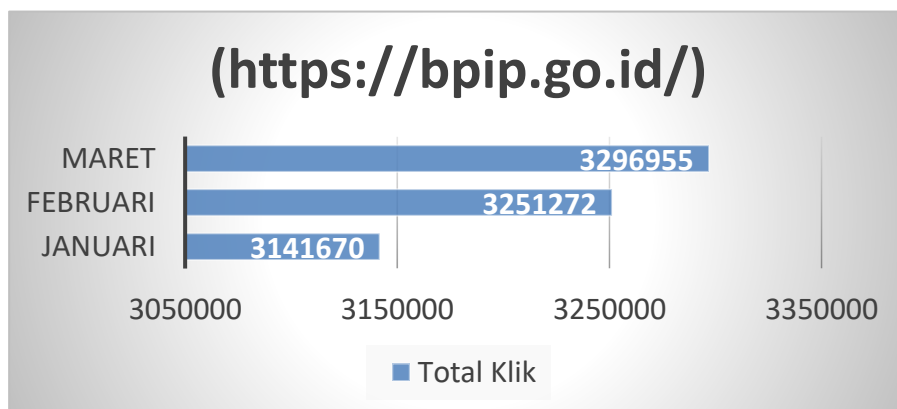
➤ Backup Server Priority Tahap 6

Report Backup Tahap 6
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

REQ-KMF-022025-0088833		
No	VM Name	Note
1.	VM84PusdatinDev	Terbackup
2.	ReverseProxy	Terbackup

e. Kunjungan website utama BPIP

Selama Triwulan I Tahun 2025 website utama BPIP <https://bpip.go.id> telah dikunjungi sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Instansi perlu meningkatkan indeks SPBE karena indeks SPBE merupakan indikator yang penting untuk menilai efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. SPBE membawa sejumlah manfaat signifikan bagi transformasi digital pemerintahan. Salah satunya adalah SPBE dapat meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengotomatisasi proses-proses pemerintahan. Hal ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga membuka jalan untuk proses pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, SPBE memungkinkan publik untuk mengakses informasi pemerintahan dengan lebih mudah dan cepat, menciptakan tingkat transparansi yang tinggi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi, telah melakukan beberapa pencapaian guna mendukung tercapainya nilai indeks SPBE yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada Triwulan I ini masih dalam tahap perencanaan kajian.

Tabel 2. 59 Aktivitas Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Rapat Pembahasan Integrasi SPBE di Lingkungan BPIP untuk Penguatan Tata Kelola dan Keamanan Informasi (Bandung, tanggal 22 s.d. 25 Januari 2025)	
2.	Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan SMKI di BPIP (Jakarta, tanggal 31 Januari 2025)	
3.	Kegiatan Rapat Persiapan Penilaian Index EPSS Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 12 Maret 2025)	

BAB III REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

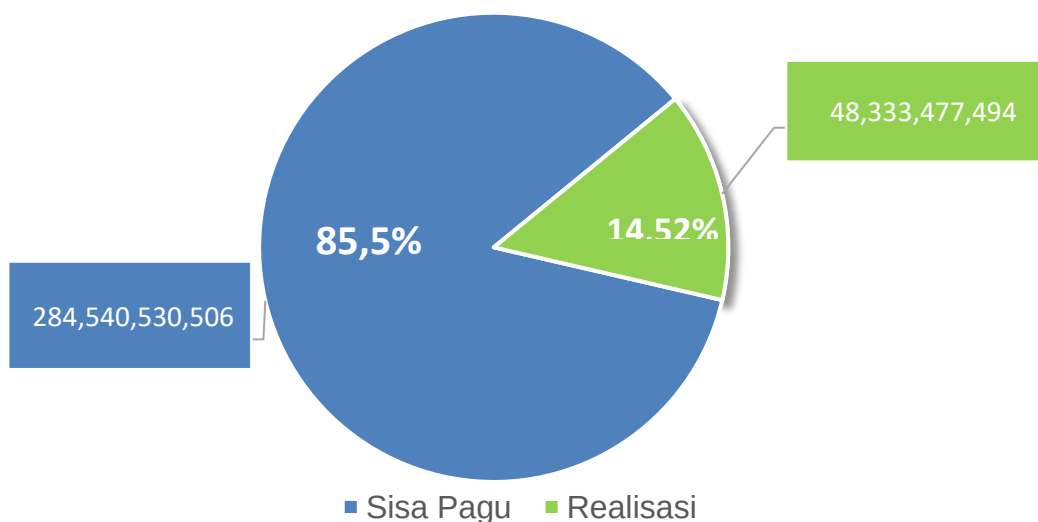
Tahun Anggaran 2025 BPIP mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp332.874.008.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ribu rupiah). Anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

- Program PIP, sebesar Rp 171.055.833.000;
- Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp161.818.175.000,00.

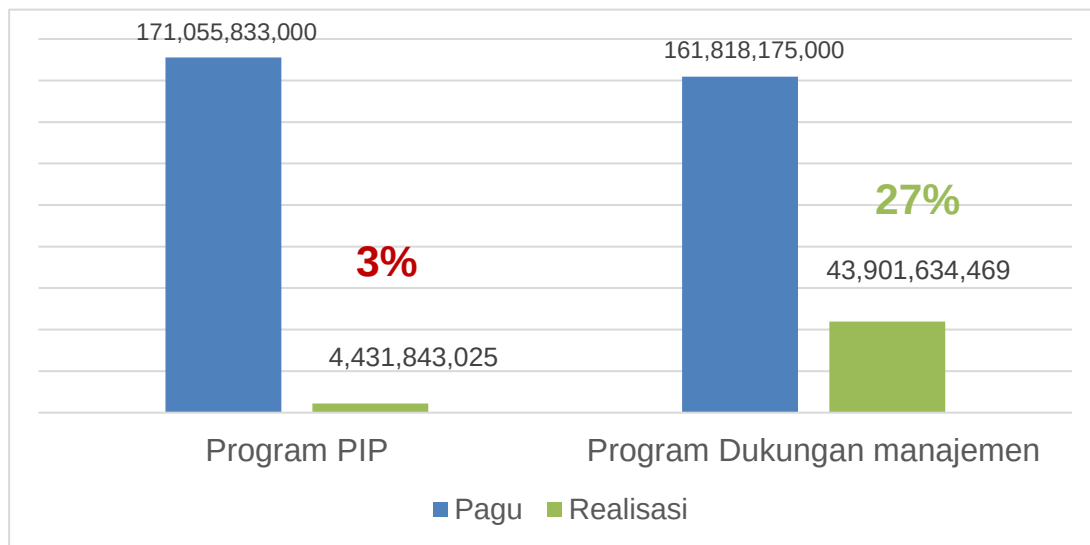
Realisasi Anggaran hingga 31 Maret 2025 (sumber: aplikasi SAKTI) adalah:

Realisasi Anggaran Total: **Rp48.333.477.494,00** (Empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar **14,52%** dari pagu.

Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total



Realisasi anggaran per program:



Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program

Adapun realisasi anggaran berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		161,818,175,000	43,901,634,469	27.13%	117,916,540,531
1	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	19,707,376,000	1,459,099,341	7.40%	18,248,276,659
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	116,257,900,000	40,554,360,138	34.88%	75,703,539,862
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	8,651,022,000	1,094,348,115	12.65%	7,556,673,885
4	Biro Hukum dan Organisasi	12,557,662,000	302,905,003	2.41%	12,254,756,997
5	Biro Pengawasan Internal	2,418,900,000	13,674,413	0.57%	2,405,225,587
6	Pusat Data dan Informasi	2,225,315,000	477,247,459	21.45%	1,748,067,541
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		60,006,479,000	799,162,342	1.33%	59,207,316,658
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama	5,266,884,000	40,553,050	0.77%	5,226,330,950



LAPORAN CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN I
TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
2	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi	33,041,479,000	582,681,000	1.76%	32,458,798,000
3	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan	21,698,116,000	175,928,292	0.81%	21,522,187,708
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		11,714,092,000	197,840,400	1.69%	11,516,251,600
1	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	4,951,003,000	3,965,400	0.08%	4,947,037,600
2	Direktorat Advokasi	5,292,125,000	17,503,000	0.33%	5,274,622,000
3	Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	1,470,964,000	176,372,000	11.99%	1,294,592,000
Deputi Bidang Pengkajian Materi		14,673,588,000	359,860,331	2.45%	14,313,727,669
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	5,115,000,000	72,171,201	1.41%	5,042,828,799
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	5,367,888,000	210,406,260	3.92%	5,157,481,740
3	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	4,190,700,000	77,282,870	1.84%	4,113,417,130
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		69,743,595,000	2,712,834,016	3.89%	67,030,760,984
1	Direktorat Perencanaan, Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	6,263,000,000	81,262,500	1.30%	6,181,737,500
2	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	45,056,595,000	2,496,393,857	5.54%	42,560,201,143
3	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	18,424,000,000	135,177,659	0.73%	18,288,822,341
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		14,918,079,000	362,145,936	2.43%	14,555,933,064
1	Direktorat Pengendalian	4,751,500,000	140,823,623	2.96%	4,610,676,377
2	Direktorat Evaluasi	3,970,500,000	110,603,273	2.79%	3,859,896,727
3	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	6,196,079,000	110,719,040	1.79%	6,085,359,960
TOTAL		332,874,008,000	48,333,477,494	14.52%	284,540,530,506

BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN

Bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi unit kerja dalam rangka mencapai Sasaran Program dan kegiatan. Terhadap kendala tersebut dilakukan upaya tindak lanjut. Usulan rekomendasi merupakan upaya perbaikan guna peningkatan kinerja di waktu mendatang. Kendala dan tindak lanjut atau rekomendasi atau usulan perbaikan dikelompokkan per Sasaran Program, yaitu:

1. Kendala dan Rekomendasi Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 1 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, serta Pembudayaan PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif	1. Masih Kekurangan SDM 2. Tidak ada penanggung Jawab yang jelas untuk Kerjasama yang telah ditandatangani 3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi atas kerja sama yang telah ditandatangani 4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi antar lembaga	1. Memaksimalkan SDM yang tersedia 2. Membuka jaringan komunikasi dengan mitra kerja sama BPIP 3. Melakukan sinkronisasi berupa penyusunan rencana aksi nyata kerja sama dengan mitra kerja BPIP 4. Menggunakan semua media/sarana komunikasi dalam melakukan komunikasi dengan lembaga 5. Melakukan kegiatan secara daring
Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif	1. Masih Belum optimalnya penentuan skala/teritori target peserta berdasarkan data wilayah prioritas, karakteristik masyarakat, dan isu	1. Peningkatan koordinasi lintas unit kerja dan pemanfaatan pengukuran indeks, data spasial (wilayah) dan sosial demografis untuk pemetaan target

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	aktual. 5. Sosialisasi dan Komunikasi Pancasila secara luring belum terjangkau hingga ke wilayah terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).	peserta secara lebih tepat. 6. Optimalisasi kerja sama dengan Pemerintah Pusat / Daerah, tokoh agama, tokoh adat, instansi pendidikan lainnya maupun organisasi masyarakat
Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	1. Cukup lamanya waktu dalam penyesuaian anggaran ketika efisiensi anggaran sehingga kegiatan belum berjalan optimal	1. Menggunakan semua media/sarana komunikasi dalam melakukan komunikasi dengan lembaga 2. Melakukan kegiatan secara daring
Persentase Rekomendasi Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Ditindaklanjuti.	1. Terbatasnya anggaran akibat efesiensi sehingga berdampak pada pembuatan alat dan panduan 2. Belum ada penyamaan persepsi di antara unit kerja dalam bentuk alat dan panduan yang akan digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama guna sebagai penyusunan rekomendasi	1. Menyusun NSPK terkait petunjuk teknis mekanisme penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama dengan Lembaga tinggi negara, K/L, Pemda dan Orsospol, serta komponen masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti. 2. Penyusunan perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh Unit kerja teknis pelaksana
Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif	1. Belum adanya instrumen khusus untuk mengetahui jangkauan pemberitaan, jangkauan program radio, dan rating program PIP di televisi anggaran akibat efesiensi sehingga berdampak pada pembuatan alat dan panduan 2. Terbatasnya jumlah personil pendukung 3. Kurangnya pelibatan kreator konten profesional dalam produksi materi sosialisasi dan komunikasi PIP	1. Pengembangan instrumen pemantauan berupa analisis efektivitas konten dan paparan kegiatan/materi Rating Share, NPS/Net Promotor Score, Media Monitoring, Sentimen Analisis untuk mengukur jangkauan konten di berbagai platform dan peningkatan kerja sama dengan lembaga penyiaran dan lembaga riset media (seperti Nielsen atau KPI). 2. Diperlukan penambahan jumlah sumber daya

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		manusia yang membantu pelaksanaan administrasi dan kegiatan teknis. 3. Kolaborasi dengan komunitas kreatif, pegiat literasi digital, dan influencer yang sejalan dengan nilai Pancasila yang berbasis multimedia (video animasi, infografis, podcast, dll).
Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti	Belum tersusunnya pedoman baku terkait mekanisme penyusunan, penyampaian, dan tindak lanjut rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi	Menyusun pedoman teknis penyusunan dan penyampaian rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi yang melibatkan pakar, <i>stakeholder</i> , mitra BPIP untuk membuat perhitungan dan rate indikator rekomendasi
Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti	Dibutuhkan pedoman pelaksanaan pembudayaan Pancasila yang segmented sesuai target sasaran	Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan pembudayaan Pancasila yang lebih segmented sesuai target sasaran
Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila	1. Belum ada konektivitas antar komunitas sehingga dapat dipantau secara optimal melalui media sosial atau internet; dan administrasi keuangan 2. Tidak ada monitoring berkelanjutan untuk pembinaan ideologi Pancasila pada komunitas.	1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait guna memfasilitasi jejaring komunitas melalui platform digital terpadu untuk memetakan dan memantau aktivitas komunitas secara <i>realtime</i>; dan 2. Membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk mendukung pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan.

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- a) Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung implementasi Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2025-2029
- b) Penyusunan Pedoman Optimalisasi Kerjasama PIP
- c) Pelaksanaan Optimalisasi Kerjasama PIP kepada mitra eksternal dan internal BPIP
- d) Dilakukan peninjauan/evaluasi terhadap nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani yang sudah lewat masa berlakunya agar seluruh kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan optimal.
- e) Penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan prioritas kerja Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
- f) Pengembangan pedoman sosialisasi dan komunikasi untuk integrasi aspek-aspek teknis dan prosedural agar kegiatan lebih terencana, terukur dan terarah.
- g) Optimalisasi penentuan wilayah dan target sosialisasi dan komunikasi sesuai dengan Rencana Strategis BPIP dan Indeks Aktualisasi Pancasila.
- h) Peningkatan kapabilitas pegawai Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi melalui program pelatihan dan bimbingan teknis untuk mendukung pencapaian *output* kerja dan *outcome* kinerja secara optimal.
- i) Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat melalui peningkatan sinergitas dan gotong royong antar unit kerja di lingkungan BPIP serta penguatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
- j) Penyusunan instrument evaluasi program dan kegiatan yang terintegrasi dan komprehensif.

- k) Penyusunan dan pengajuan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan program secara efektif dan efisien untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 2 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya penguatan kelembagaan BPIP dalam bentuk Undang-Undang; 2. Belum adanya SOP dan Pedoman kriteria dalam melakukan analisis dan penyelarasan terhadap rancangan produk hukum nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam implementasi pada program dan kegiatan masing-masing bidang di direktorat. 3. Belum terstrukturanya penyelenggaraan Penyelarasan baik ditingkat pusat maupun di daerah	1. Perlu penguatan kelembagaan BPIP dengan mengupayakan agar RUU BPIP dibahas pada tahun 2025; 2. Perlu pembuatan SOP dan pedoman kriteria kinerja penyelarasan rancangan peraturan perundang-undangan. 3. Perlu adanya kesepakatan konseptual antar stakeholder penyelenggara penyusunan peraturan perundang-undangan
Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan	1. Belum semua instansi memahami urgensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan mereka. 2. Keterbatasan pemahaman teknis dalam mengimplementasikan rekomendasi. 3. Minimnya regulasi operasional yang menjadi rujukan	1. Menyusun pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Badan. 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi ke instansi/lembaga. 3. Menyusun materi advokasi yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	pelaksanaan advokasi	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	1. Rekomendasi hasil kajian kebijakan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila tidak serta merta langsung ditindaklanjuti oleh K/L, Pemprov, Pemkot/Pemkab atau <i>stakeholder</i> dikarenakan memerlukan mekanisme tersendiri dalam merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan antar lembaga belum terbangun secara optimal. 2. Dibutuhkan upaya atau Pola Koordinasi dan kolaborasi antar <i>Stakeholder</i> agar pelaksanaan hasil rekomendasi kajian kebijakan regulasi dapat ditindaklanjuti.	1. Perlu mendapat arahan, atensi dan disposisi dari Pimpinan dan Dewan Pengarah BPIP dalam hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Kajian Kebijakan Regulasi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 55 Perpres 7 Tahun 2018 tentang BPIP. 2. Perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hasil kajian nilai-nilai Pancasila
Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyesuaian rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya penguatan kelembagaan BPIP dalam bentuk Undang-Undang; 2. Belum adanya SOP dan Pedoman kriteria dalam melakukan analisis dan penyesuaian terhadap rancangan produk hukum nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam implementasi pada program dan kegiatan masing-masing bidang di direktorat. 3. Belum terstrukturanya penyelenggaraan Penyesuaian baik ditingkat pusat maupun di daerah	1. Perlu penguatan kelembagaan BPIP dengan mengupayakan agar RUU BPIP dibahas pada tahun 2025; 2. Perlu pembuatan SOP dan pedoman kriteria kinerja penyesuaian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. 3. Perlu adanya kesepakatan konseptual antar <i>stakeholder</i> penyelenggara penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Koordinasi antar lembaga belum terbangun secara optimal. 2. Belum ada sistem pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi. 3. Rekomendasi belum sepenuhnya masuk ke agenda kerja lembaga sasaran.	1. Menjalinkan kerja sama melalui PKS dengan instansi terkait. 2. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator. 3. Menyesuaikan substansi rekomendasi dengan prioritas program lembaga sasaran.
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Rekomendasi hasil kajian kebijakan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila tidak serta merta langsung ditindaklanjuti oleh K/L, Pemprov, Pemkot/Pemkab atau <i>stakeholder</i> dikarenakan memerlukan mekanisme tersendiri dalam merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan antar lembaga belum terbangun secara optimal. 2. Dibutuhkan upaya atau Pola Koordinasi dan kolaborasi antar <i>Stakeholder</i> agar pelaksanaan hasil rekomendasi kajian kebijakan regulasi dapat ditindaklanjuti.	1. Perlu mendapat arahan, atensi dan disposisi dari Pimpinan dan Dewan Pengarah BPIP dalam hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Kajian Kebijakan Regulasi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 55 Perpres 7 Tahun 2018 tentang BPIP. 2. Perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hasil kajian nilai-nilai Pancasila

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- a) Untuk melaksanakan perpanjangan tugas Deputi bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagaimana diatur dalam organisasi dan tata kerja, perlu disusun arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam bentuk Peraturan BPIP;

- b) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas analisis dan penyelarasan di Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
- c) Mendorong penyusunan pedoman pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila dalam bentuk Peraturan Badan, sebagai acuan normatif dan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan advokasi di seluruh tingkatan dan sektor. Kedua rekomendasi ini diharapkan memperkuat tata kelola serta efektivitas pelaksanaan advokasi ideologi Pancasila secara nasional;
- d) Mendorong disusunnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan mitra strategis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kajian dan advokasi pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan dan terarah; dan
- e) Mendorong tingkat Pimpinan dan melibatkan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal Menyusun format atau bentuk Surat Pengantar penyampaian Rekomendasi hasil Kajian Regulasi dan Kebijakan melalui tahap Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi ke Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan meminta arahan dan pertimbangan dari Ketua Dewan Pengarah BPIP

3. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 3 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan	1. Masih dilakukan penyusunan dokumen kajian sehingga belum	1. Melakukan penyusunan dokumen kajian sesuai tahapan penyusunan yang ditetapkan; 2. Mempersiapkan penerbitan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	dapat dimanfaatkan oleh pihak lain 2. Jadwal penerbitan Jurnal Ilmiah berada di triwulan II	PJK pada bulan April, dan BTI pada bulan Mei
Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan	3. Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga. 4. Besarnya jumlah populasi guru sebagai narasumber uji keterbacaan sebagai sampling kajian 5. Kewenangan MKWK bukan pada BPIP 6. Besarnya jumlah perguruan tinggi sebagai sampling dosen pengampu pendidikan Pancasila 7. Terbatasnya narasumber/penulis standar materi yang memahami konteks 8. Kurangnya bahan materi yang sesuai dengan kebenaran sejarah	1. Melaksanakan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi sains dan Teknologi dan Kementerian/Lembaga terkait 2. Melaksanakan kegiatan di dalam kantor dengan melibatkan narasumber.
Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan	1. Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga. 2. Besarnya jumlah populasi satuan Pendidikan dibawah lementerian agama (swasta) sebesar 52.350 satuan pendidikan sehingga tidak dapat menentukan lokus kajian dengan flesibilitas tinggi.	1. Melaksanakan kolaborasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dasar dan menengah, Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kab/Kota, Balai Guru Penggerak, dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan. 2. Melaksanakan kegiatan di dalam kantor dengan melibatkan narasumber.
Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	1. Terdapat perubahan dan penambahan nomenklatur beberapa K/L seiring dengan bergantinya	1. Dilakukan verifikasi dan validasi ulang kepada K/L yang mengalami perubahan dan penambahan nomenklatur;

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
yang Ditindaklanjuti	pemerintahan baru, sehingga dokumen Peta Jalan PIP perlu dilakukan penyesuaian kembali; 2. Pelibatan pemangku kepentingan lintas K/L dalam melakukan penyusunan kajian memerlukan waktu koordinasi yang cukup panjang; 3. Adanya perubahan standar akreditasi menuju SINTA 2 yang memerlukan persiapan dan dukungan lebih matang; 4. Penyusunan dokumen yang menjadi prioritas Lembaga sehingga memerlukan proses verifikasi dan validasi pimpinan yang memakan waktu cukup panjang	2. Mengefektifkan pembahasan substansi dalam setiap pertemuan antar pemangku kepentingan; 3. Melakukan persiapan teknis dan substantif dengan melibatkan <i>stakeholder</i> yang berkompeten terkait proses akreditasi menuju SINTA 2; 4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja di BPIP terkait dengan penyusunan kajian
Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga.	1. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga. 2. Besarnya jumlah populasi satuan Pendidikan dibawah lementerian agama (swasta) sebesar 52.350 satuan pendidikan sehingga tidak dapat menentukan lokus kajian dengan	1. Melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kab/Kota, Balai Guru Penggerak, dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	fleksibilitas tinggi.	

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program yaitu:

- Menyusun prioritas kegiatan didasarkan pada ketersediaan anggaran agar unit kerja tetap dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal;
- Komitmen bersama antar unit kerja dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kegiatan.
- Perlu dilakukan Kajian strategi Implementasi BTU Pendidikan Pancasila pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama pada tahun 2025, pada lingkup ekosistem satuan Pendidikan yang dikelola oleh swasta pada seluruh Jenjang Pendidikan (MI, MTs, MA/MAK).
- Perlu diambil Langkah Strategi dalam menyambut Tahun Ajaran Baru 2025/2026 yang jatuh pada Juli 2025, yakni Penerapan Buku Teks Utama (BTU) secara Nasional
- perlu sinergi dan kolaborasi Kemendikdasmen RI, Kemenag RI dan BPIP RI untuk memastikan Pendidikan Pancasila diterapkan sebagai muatan kurikulum dan mata Pelajaran wajib

4. Kendala dan rencana tindak lanjut Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 4 Kendala dan Tindak Lanjut Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi	Belum tersedianya petunjuk teknis pelatihan bagi pengajar Diklat PIP secara daring dan <i>blended learning</i> .	Berkoordinasi secara internal untuk Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan bagi pengajar Diklat PIP secara daring dan <i>blended learning</i> .
Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi	Belum dilaksanakannya Diklat PIP oleh Lembaga penyelenggara Diklat PIP.	Melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti hasil akreditasi penyelenggara Diklat PIP.
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik	Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.	Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP dengan mengundang K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.
Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat	Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.	Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dengan mengundang K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.
Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	1. Perubahan tim asesor akreditasi penyelenggara Diklat PIP dikarenakan pensiun dan mutasi 2. Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024 tentang	1. Berkoordinasi dengan instansi tim asesor yang pensiun dan mutasi terkait pengganti tim asesor tersebut. 2. Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.	tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP dengan mengundang K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.
Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	Penyelenggaraan Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP belum secara optimal sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat PIP dan Keputusan Kepala BPIP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar dan Kurikulum Diklat PIP.	Melakukan koordinasi internal dan menyampaikan hasil evaluasi hasil Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP kepada Direktorat Penyelenggaraan Diklat.
Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila	1. Tidak semua daerah memiliki sinyal atau jaringan yang bagus, sehingga saat mengikuti diklat PIP banyak yang tidak berhasil menyelesaikan diklat dari awal sampai akhir sehingga tidak lulus diklat dan tidak bisa diangkat menjadi Duta Pancasila 2. Tidak semua Purnapaskibraka bersedia mengikuti diklat pembinaan Ideologi Pancasila untuk menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila 3. Purnapaskibraka sebelum tahun 2022 tidak dalam tanggungjawab BPIP dan Kesbangpol, sehingga agak sulit untuk melakukan pendataan terhadap Purnapaskibraka sebelum Tahun 2022	1. Menyarankan agar Kesbangpol Kab/Kota dan Provinsi menghimpun Purnapaskibraka dalam 1 tempat yang memiliki sinyal bagus untuk memastikan semua Purnapaskibraka yang mengikuti diklat bisa menuntaskan dan menyelesaikan diklat PIP. 2. Bekerjasama dengan Kesbangpol di setiap kabupaten/kota dan provinsi agar terus mengingatkan peran Purnapaskibraka sebagai agen perubahan di tempat masing-masing 3. Menjalin hubungan baik dengan instansi-instansi yang pernah bertanggungjawab melakukan pembentukan Paskibraka agar lebih mudah dalam meminta basis data Purnapaskibraka

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		sebelum tahun 2022.
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila	Penyampaian laporan aktualisasi dari lulusan diklat terlambat disampaikan	1. Koordinasi intensif dengan para lulusan diklat melalui para penanggung jawab laporan 2. Usulan penambahan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Diklat PIP; 3. Kerja Sama penyelenggaraan diklat dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, baik Pusat dan Daerah melalui mekanisme <i>resource sharing</i>

Penyelenggaraan Diklat PIP pada Tahun 2025 menghadapi kendala-kendala dari aspek dukungan regulasi/kebijakan, keterbatasan sumber daya, sehingga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 dengan melakukan komunikasi strategis dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal BPIP dalam rangka kolaborasi/gotong royong dalam:

- a) Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b) Pengembangan dan penerapan kebijakan strategis dan program teknis untuk mewujudkan gotong royong kolaboratif, integratif, dan sinergis dalam pemanfaatan sumber daya (SDM, finansial, sarana prasarana, data informasi) antara BPIP dengan lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional bagi aparatur negara, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;
- c) Pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan

- komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP dan pelaksanaan PIP dalam Diklat calon Paskibraka;
- d) Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan
 - e) Pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai standard dan kebutuhan
 - f) Pengembangan sistem dan metode pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila berbasis teknologi informasi dan komunikasi
 - g) Fasilitasi pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP serta sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP untuk mendorong penyelenggaraan Diklat PIP secara instansional di lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan
 - h) Penyempurnaan Instrumen Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat PIP.

5. Kendala dan rencana tindak lanjut Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 5 Kendala dan Tindak Lanjut Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Belum ada dokumen atau payung hukum sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pengendalian PIP yang menyeluruh	1. Penyusunan Pedoman Pengendalian PIP 2. Melaksanakan Konsolidasi dengan seluruh unit kerja di BPIP dalam bentuk Rapat Pengendalian PIP secara rutin

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	Belum terselesaikannya pedoman pengendalian dan evaluasi	- Dilaksanakannya koordinasi lintas direktorat dan biro untuk membuat suatu pedoman yang menjadi dasar kegiatan pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila - Dilaksanakannya uji coba untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pedoman pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila
Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan	- Belum ditetapkan pedoman pengukuran Pelembagaan Pancasila dan Pengukuran IAP diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan BHO - Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga. - Masih adanya penyesuaian dan perubahan metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila, hal ini berdampak pada tahapan proses Pengukuran berikutnya - Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran, belum terdapatnya penganggaran pembangunan sistem informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila - Keterbatasan jumlah SDM pada Direktorat Pengukuran Pelembagaan	- Melakukan koordinasi untuk melakukan penyusunan pedoman pengukuran pelembagaan dan pengukuran IAP dengan BHO - Pembahasan lebih lanjut terkait metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila dengan melibatkan Lintas unit kerja dan melibatkan Pakar/Akademisi - Koordinasi lebih lanjut terkait perencanaan penganggaran sistem informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila - Permohonan penambahan SDM
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	Indikator Pencapaian Program PIP khususnya Peta Jalan PIP dalam hal Pengendalian masih belum terstandarisasi. Belum ada Dokumen Kebijakan dalam hal	- Mendorong untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Indikator Pencapaian Program PIP yang terfokus pada Peta Jalan PIP - Mempercepat proses

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	Pedoman Pengendalian PIP 2. Fungsi Pengendalian belum dianggap hal yang sangat penting oleh penerima manfaat	penyusunan Pedoman Pengendalian PIP 3. Melaksanakan kegiatan yang menunjukkan fungsi Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas PIP, seperti menyelenggarakan rapat koordinasi teknis pengendalian tujuan BPIP kepada unit organisasi selain itu membuat Kebijakan Kewenangan pengendalian program kerja tujuan BPIP 4. Melaksanakan monitoring Teknis Pengendalian atas Program kerja BPIP kepada unit organisasi secara berkala 5. Melaksanakan koordinasi validasi dan analisa terhadap data rekomendasi secara ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan 6. Memberikan rekomendasi menggunakan pendekatan formal dan informal, pendekatan informal dilakukan secara halus kepada unit kerja
Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Belum tersedianya pedoman pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila	1. Dilaksanakannya koordinasi antar unit untuk membuat suatu pedoman yang menjadi dasar kegiatan pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila 2. Dilaksanakannya uji coba untuk pedoman pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Belum ditetapkannya pedoman pengukuran Pelembagaan Pancasila dan Pengukuran IAP diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan BHO 2. Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga. 3. Masih adanya penyesuaian dan perubahan metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila, hal ini berdampak pada tahapan proses Pengukuran berikutnya 4. Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran, belum terdapatnya penganggaran pembangunan sistem informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila 5. Keterbatasan jumlah SDM pada Direktorat Pengukuran Pelembagaan	1. Melakukan koordinasi untuk melakukan penyusunan pedoman pengukuran pelembagaan dan pengukuran IAP dengan BHO 2. Pembahasan lebih lanjut terkait metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila dengan melibatkan Lintas unit kerja dan melibatkan Pakar/Akademisi 3. Koordinasi lebih lanjut terkait perencanaan penganggaran sistem informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila 4. Permohonan penambahan SDM

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan Sasaran Program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- a) Segera mensahkan Draft Pedoman Pengendalian menjadi Peraturan Badan agar Kedeputian Pengendalian dan Evaluasi memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b) Segera mensahkan metode pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- c) K/L, Pemda dan Perguruan Tinggi diharapkan dapat meningkatkan peran dari sebatas objek menjadi subjek dalam melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dirasakan oleh seluruh masyarakat luas;

- d) Penyelesaian Penyelesaian Pedoman Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan ditetapkan melalui regulasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- e) Perlu Pembentukan POKJA evaluasi pelaksanaan PIP;
- f) Pembuatan Petunjuk Teknis pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- g) Penyusunan pedoman yang melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan unit kerja terkait untuk mempercepat penyusunan pedoman resmi Pengukuran Pelembagaan Pancasila dan IAP agar menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan ke depan;
- h) Pembahasan metodologi secara kolaboratif dengan melibatkan unit kerja terkait, serta para akademisi atau pakar dalam rangka mereviu dan menyepakati metodologi pengukuran;
- i) Perencanaan penganggaran Sistem Informasi dengan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan unit kerja terkait untuk menyusun strategi penganggaran sistem informasi pengukuran;
- j) Pengusulan penambahan dan pengembangan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan, guna mendukung optimalisasi kinerja serta percepatan pengisian formasi dalam peta jabatan yang telah ditetapkan.

6. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Tabel 4. 6 Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Keterlambatan penyampaian dokumen usulan revisi anggaran dari unit kerja sehingga menghambat penerbitan dokumen revisi anggaran.	Perlu diadakan rapat bersama unit kerja tata cara revisi anggaran
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu keuangan	laporan keuangan 2024 audited sedang dalam proses penyusunan, kemarin terhambat akibat maintenance aplikasi SAKTI	Melakukan komunikasi dengan pihak terkait, seperti Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Penyampaian Laporan dari unit kerja melebihi waktu yang telah ditetapkan sehingga memperhambat dalam penyusunan laporan kinerja	Mengadakan rapat kepada unit kerja untuk menentukan penanggung jawab dalam penyusunan laporan kinerja
Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	RUU BPIP belum ada tindak lanjut dari Badan Legislasi DPR RI	Menunggu arahan Pimpinan BPIP
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	1. Renstra BPIP Tahun 2025-2029 belum terbit. Arah, kebijakan dan pencapaian organisasi kelembagaan belum dapat teridentifikasi; 2. Kategori kelembagaan yang masih belum jelas. Apakah masuk kedalam kelompok Kementerian/Lembaga atau setingkat kementerian. Hal ini membuat kendala dalam melakukan kajian organisasi dalam rangka penataan organisasi; 3. <i>Grand Design</i> RB Tahun 2025-2045 dan <i>Road Map</i> RB 2025-2029 belum ada. Arah, kebijakan dan pencapaian RB BPIP belum dapat ditentukan.	1. Melakukan koordinasi dan rapat intensif dengan Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian PAN RB; 3. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian PAN RB serta melakukan kaji banding dengan Kementerian/Lembaga lainnya

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	1. Pemenuhan bukti dukung dalam proses penilaian masih belum maksimal khususnya mengenai implementasi aplikasi pengelolaan manajemen ASN baik pengelolaan manajemen talenta ataupun terkait kebijakan mengenai pengelolaan manajemen ASN di lingkungan BPIP 2. Belum dipenuhinya secara maksimal mengenai kebutuhan kualitas ASN meliputi Pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai 3. Salah satu indikator dalam indeks pengelolaan aset adalah mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk penghapusan yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak.	1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lemba ga terkait untuk memenuhi Sistem Merit di BPIP; 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kebutuhan pengembangan kompetensi dan pemenuhan data dukung proses penilaian dan pemenuhan indeks profesionalisme ASN; 3. Melakukan Penghapusan Barang Milik Negara yang telah dalam kondisi rusak berat untuk menunjang Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin.
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Kompetensi SDM Biro masih rendah;	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi atau Bimbingan Teknis
Nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik BPIP	Kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang dimaksud	Mengajukan permintaan SDM
Nilai pengawasan kearsipan	Pengawasan Kearsipan Internal, masih banyak Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik, hal tersebut karena BPIP belum memiliki SDM Kearsipan yang fokus untuk melakukan Pengelolaan arsip, dan BPIP belum memiliki NSPK Kearsipan yang menjadi syarat pelaksanaan kearsipan Internal	Melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	- Masih perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN serta memproses hasil inventarisasi peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya - Masih terdapat proses penghapusan BMN belum tertib - Masih Ada Pemilihan Jenis dan Lokus Diklat PIP Belum Dilakukan Sesuai Kebutuhan; - Masih Ada Diklat PIP Belum Sepenuhnya Diselenggarakan Sesuai dengan Perencanaan dan Kebutuhan; - Masih ada rekomendasi untuk Direktur Pelaksanaan Diklat supaya menetapkan jumlah peserta sesuai ketentuan dan menyelenggarakan tahapan pembelajaran diklat untuk semua Diklat PIP sesuai ketentuan	- Telah memberikan surat jawaban dari petugas pengelola BMN yang menyatakan kesediaan melaksanakan perintah Sestama untuk lebih tertib dalam proses penghapusan aset dan surat jawaban Kepala Subbag Manajemen BMN yang menyatakan kesediaan melaksanakan perintah Sestama untuk lebih tertib dalam proses penghapusan aset - Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan telah menyampaikan surat tanggapan tanggal 4 Juni 2024 atas membuat rekomendasi membuat analisis secara komprehensif dalam pemilihan jenis dan lokus. - Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan telah memberikan dokumen pemberian akreditasi kepada penyelenggara diklat PIP pada Pemda, Lembaga Negara dan K/L
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	Perolehan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPIP Tahun 2024 yang belum mencapai maksimal masih terdapat permasalahan pada unsur Penetapan Tujuan	Pelaksanaan reviu atas pengelolaan manajemen risiko di lingkungan BPIP dengan memperhatikan pada tahap penilaian risiko

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	sehingga berdampak ada kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis	berupa penetapan tujuan yang secara garis besar mengacu pada Keputusan Kepala BPIP nomor 28/2023 tentang proses bisnis. BPIP perlu segera menetapkan penentuan selera risiko oleh pemilik risiko pada unit kerja serta unit organisasi.
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	1. Keterbatasan SDM Teknis 2. Teknologi yang terus berkembang dengan cepat. 3. Terjadi serangan ransomware pada 20 Juni 2025 pada Pusat Data Nasional yang mengakibatkan aplikasi BPIP tidak dapat diakses	1. Perlu penambahan SDM Teknis 2. Perlu melakukan pengembangan kompetensi SDM 3. Melakukan rapat koordinasi untuk pembahasan langkah dan tindakan kedepannya

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan Sasaran Program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- a) Perlu adanya penguatan area perbaikan melalui koordinasi antar unit kerja dan/atau unit organisasi di lingkungan BPIP serta penguatan kompetensi APIP dalam rangka penilaian SPIP selaku tim penjamin kualitas;
- b) Pada tindak lanjut dari temuan BPK perlu adanya kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c) Perlu peningkatan koordinasi, komunikasi dan perhatian yang lebih dari para pengelola Keuangan (PPK) dalam penyediaan data Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa serta TP3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) sehingga data yang didapat menjadi representatif dalam menghasilkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh BPKP untuk pelaporannya kepada Presiden RI;

- d) Perlu adanya Pembuatan Timeline yang jelas mengenai pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas di BPIP sehingga sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang ditentukan oleh BPKP serta Pelaksanaan monitoring dan pendampingan secara berkala oleh Biro Pengawasan Internal atas penyampaian data dukung SPIP Terintegrasi sehingga proses Penilaian Mandiri oleh Manajemen tidak mengalami kendala;
- e) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, perlunya untuk BPIP melakukan monitoring beserta evaluasi secara berkala terhadap perencanaan kinerja sampai ke realisasi sehingga dapat memastikan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program, Target Kinerja mendukung Sasaran Strategis, Hal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan dokumentasi secara lebih tertib terhadap pelaksanaan monitoring tersebut.
- f) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala.
- g) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala.

- h) Pengelolaan arsip aktif pada beberapa Unit Kerja belum optimal, dan belum adanya NSPK Kearsipan sebagai syarat pelaksanaan kearsipan Internal. Oleh karena itu, tindak lanjut yang diusulkan mencakup identifikasi unit dengan performa kearsipan rendah, implementasi NSPK Kearsipan, serta evaluasi dampak pelatihan dan implementasi NSPK terhadap kinerja pengelolaan arsip aktif. Langkah-langkah tindak lanjut diarahkan pada penetapan jadwal rutin untuk pengawasan internal dan eksternal, dukungan tim pengawasan dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan, serta analisis mendalam terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi melibatkan pembentukan tim internal untuk memastikan pengawasan berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem manajemen mutu.
- i) Salah satu unsur penilaian Manajemen Risiko Indeks yakni adalah penguatan kompetensi penjaminan mutu dan kualitas pelaksanaan MRI melalui pelaksanaan sertifikasi pengelola risiko lingkup BPIP dengan kompetensi pelatihan serta bimbingan teknis Manajemen Risiko sektor Publik baik melalui penyelenggaraan BPKP maupun internal BPIP.
- j) Keamanan Administrasi, berupa Aset BMN untuk diberikan nomor urut pendaftaran barang inventaris, serta kelengkapan dokumen Aset pinjam berupa Berita Acara Serah Terimanya
- k) Diperlukan Kerja Sama dan sinergi dari semua unit kerja dan pegawai untuk mendukung peningkatan indeks maturitas SPBE tahun 2025. Dukungan dari pemangku kebijakan juga diperlukan untuk penguatan dari sisi regulasi dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan data dan informasi di lingkungan BPIP.

BAB V | PENUTUP

Kinerja BPIP harus lebih memberikan dampak dan manfaat dimasa-masa mendatang. Gerak langkah Aktualisasi Pancasila harus dapat sampai pada masyarakat, agar dapat memunculkan rasa percaya diri dan ketangguhan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Indikator kinerja BPIP harus dapat diukur agar Akuntabilitas Kinerja terjaga diiringi dengan pengelolaan anggaran yang makin bijaksana dan mengedepankan asas kepatutan.

SALAM PANCASILA!

Jakarta, 17 April 2025

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI



LAPORAN CAPAIAN BPIP | **2025**



BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

LAPORAN **TRIWULAN II** CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

WWW.BPIP.GO.ID



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PEMETAAN SASARAN STRATEGIS	1
BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II.....	5
A. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	5
A.1. Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif.....	6
A.2. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif	11
A.3. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	20
B. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	30
B.1. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti.....	31
B.2. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan	38
B.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	44
C. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	49
C.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan yang dimanfaatkan	50
C.2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Materi yang dimanfaatkan 63	
C.3. Persentase Rekomendasi Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	71
D. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila .	78
D.1. Persentase Tenaga Pengajar Pancasila yang Tersertifikasi.....	79
D.2. Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi.	83
D.3. Persentase Peserta Diklat Berkepribadian Pancasila Dengan Tingkat Baik	87
E. Terlaksananya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.....	94



E.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	94
E.2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	99
E.3. Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan	104
F. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima berbasis Elektronik.....	110
F.1. Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja.....	111
F.2. Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	119
F.3. Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja	140
F.4. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan	150
F.5. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP	163
F.6. Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	169
BAB III REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	179
BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN	182
BAB V PENUTUP	210



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP	3
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	5
Tabel 2. 2 Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Organisasi Sosial Politik dan Komponen Masyarakat lainnya	7
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya	7
Tabel 2. 4 Tahapan Penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	8
Tabel 2. 5 Aktivitas Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya	10
Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa	12
Tabel 2. 7 Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan	13
Tabel 2. 8 Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan	16
Tabel 2. 9 Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan	17
Tabel 2. 10 Aktivitas Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa	18
Tabel 2. 11 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila	21
Tabel 2. 12 Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	23
Tabel 2. 13 Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	26
Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	30
Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila	31
Tabel 2. 16 Rekomendasi rancangan produk hukum yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila	32
Tabel 2. 17 Aktivitas Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila	33
Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	38
Tabel 2. 19 Aktivitas Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	41
Tabel 2. 20 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila	44
Tabel 2. 21 Aktivitas Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila	47
Tabel 2. 22 Indikator Kinerja Program Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	50

Tabel 2. 23 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	51
Tabel 2. 24 Validasi usulan kegiatan kepada 47 Kementerian/Lembaga	53
Tabel 2. 25 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	59
Tabel 2. 26 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	63
Tabel 2. 27 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	68
Tabel 2. 28 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	72
Tabel 2. 29 Aktivitas Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	75
Tabel 2. 29 Indikator Kinerja Program Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	79
Tabel 2. 30 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	80
Tabel 2. 31 Aktivitas Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	81
Tabel 2. 33 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	84
Tabel 2. 34 Aktivitas Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	86
Tabel 2. 35 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila	88
Tabel 2. 36 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila	89
Tabel 2. 37 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	92
Tabel 2. 38 Aktivitas Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	93
Tabel 2. 39 Indikator Kinerja Program Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila	94
Tabel 2. 40 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	95
Tabel 2. 41 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengendalian PIP	98
Tabel 2. 42 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	99
Tabel 2. 43 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	102
Tabel 2. 44 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	104
Tabel 2. 45 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila	107
Tabel 2. 46 Indikator Kinerja Program Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik	110
Tabel 2. 47 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja	112



Tabel 2. 48 Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja.	117
Tabel 2. 49 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi.....	119
Tabel 2. 50 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi.....	124
Tabel 2. 51 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi.....	136
Tabel 2. 52 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja.....	140
Tabel 2. 53 Aktivitas Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja	146
Tabel 2. 54 Indikator Kinerja Kegiatan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan.....	150
Tabel 2. 55 Aktivitas Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan	160
Tabel 2. 56 Indikator Kinerja Kegiatan pengawasan internal di lingkungan BPIP ..	163
Tabel 2. 57 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	165
Tabel 2. 58 Aktivitas Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP	167
Tabel 2. 59 Indikator Keluaran Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	169
Tabel 2. 60 Aktivitas Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	178
Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja	180
Tabel 4. 1 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, serta Pembudayaan PIP	182
Tabel 4. 2 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	187
Tabel 4. 3 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP	191
Tabel 4. 4 Kendala dan Tindak Lanjut Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	194
Tabel 4. 5 Kendala dan Tindak Lanjut Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi PIP.....	197
Tabel 4. 6 Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen	204



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP.....	2
Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total	179
Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program.....	180

DAFTAR ISTILAH

ADKASI	: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ARJUNA	: Akreditasi Jurnal Nasional
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BerAKHLAK	: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BIN	: Badan Intelijen Negara
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BTU	: Buku Teks Utama
CPMK	: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DKT	: Diskusi Kelompok Terpumpun
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
IDEA	: <i>Indonesian E-Commerce Association</i>
IKU	: Indikator Kinerja Utama
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenPANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Medsos	: Media Sosial
MKWK	: Mata Kuliah Wajib Kurikulum
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskbiraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PDN	: Pusat Data Nasional
PDP	: Purnapaskibraka Duta Pancasila



PEMDA	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PJK	: Pancasila Jurnal Keindonesiaan
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PN	: Prioritas Nasional
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PSP	: Pusat Studi Pancasila
PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
RAPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	: Rencana Strategis
RO	: Rincian <i>Output</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBKU	: Standar Biaya Keluaran Umum
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SINTA	: <i>Science and Technology Index</i>
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
TTIS/CSIRT	: Tim Tanggap Insiden Siber/ <i>Computer Security Incident Response Team</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UKPBJ	: Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNDANA	: Universitas Nusa Cendana
UNWIRA	: Universitas Katolik Widya Mandira
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Program & Kegiatan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bahwa Kepala dan Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan Capaian Program & Kegiatan Triwulan II Tahun 2025 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) terhadap penggunaan anggaran BPIP periode Januari-Juni 2025. Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, mewujudkan Pancasila sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia, juga sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam laku hidup rakyat Indonesia.

Jakarta, 21 Juli 2025

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

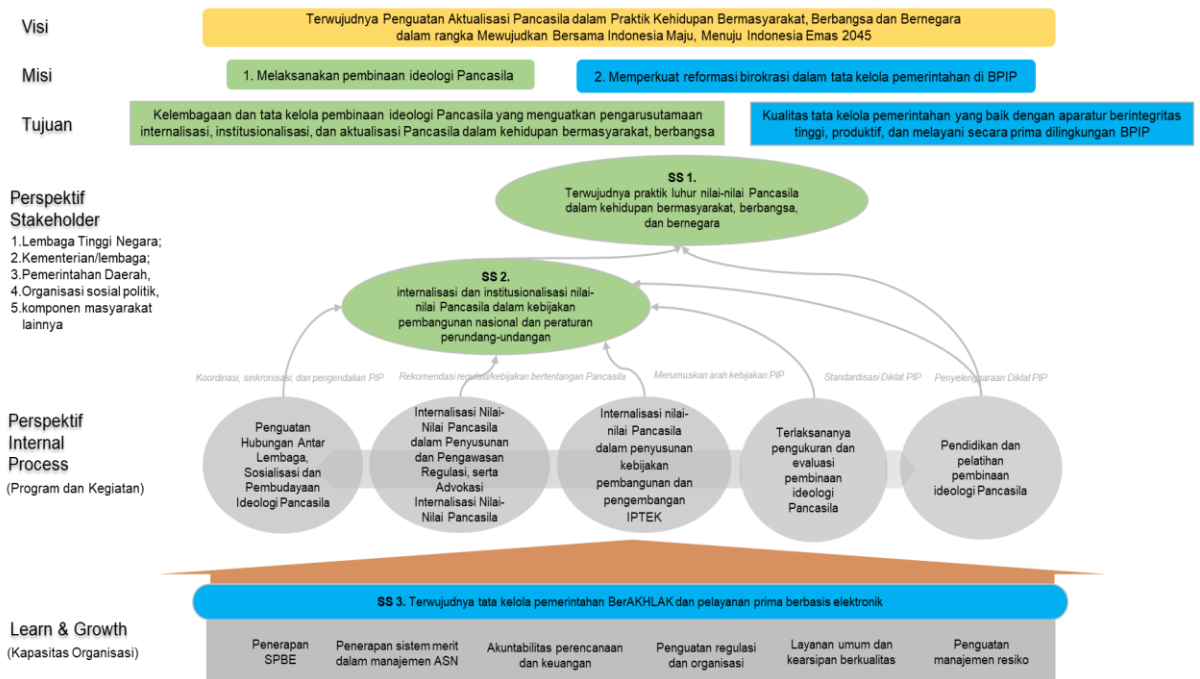
RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dimandatkan dalam Rencana Strategis BPIP 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ketiga sasaran strategis tersebut dapat terwujud dengan dukungan Sasaran Program Kedeputan dan Sekretariat Utama. Sasaran Program dicapai dengan berbagai kegiatan teknis. Hubungan sasaran strategis dan Sasaran Program PIP dipetakan berikut ini:

PETA STRATEGIS BPIP



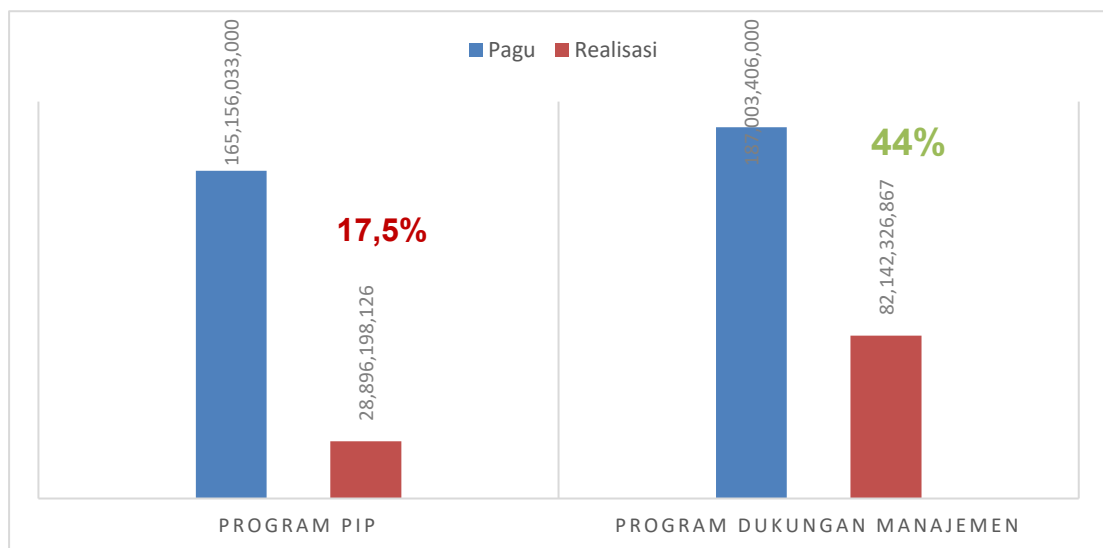
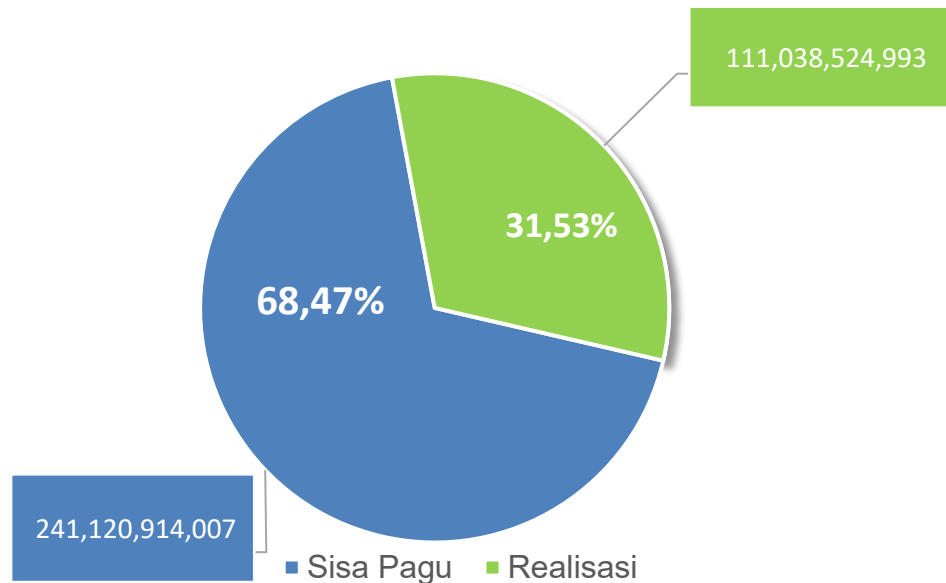
PETA STRATEGIS BPIP

Capaian kinerja sasaran program merupakan kinerja pelaksanaan kegiatan yang melekat pada masing-masing sasaran. Pelaksanaan kegiatan periode Triwulan II Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila;
 - a. Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif dengan capaian 29%;
 - b. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif dengan capaian 45,7%;
 - c. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif dengan capaian 24%.
2. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti dengan capaian 45%;
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan dengan capaian 50%;
 - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 45%.
3. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan dengan capaian 32,5%;
 - b. Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan dengan capaian 64,6%;
 - c. Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan dengan capaian 36,7%.
4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - a. Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi dengan capaian 43,6% ;
 - b. Persentase lembaga penyelenggara diklat Pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi dengan capaian 62%;

- c. Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik 58,5%;
- 5. Terlaksananya pengukuran dan evaluasi Pembinaan ideologi Pancasila;
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 64,5%;
 - b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 25%;
 - c. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 50%.
- 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.
 - a. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja dengan capaian 50%;
 - b. Layanan pengawasan intern di lingkungan BPIP dengan capaian 50%;
 - c. layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja dengan capaian 50%;
 - d. Layanan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan dengan capaian 50%;
 - e. Layanan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi dengan capaian 50%;
 - f. Layanan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 50 %.

Pada Triwulan Tahun 2025, berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 Juni 2025 realisasi anggaran BPIP adalah 31,53% atau sebesar 111.038.524.993,00 dari alokasi pagu DIPA TA 2025 sebesar Rp352.159.439.000,00 Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode Tahun 2025:



Realisasi Anggaran BPIP

Beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025, antara lain adalah (i) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas; (ii) mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang ada untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya; (iii) Menyusun Perpres tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila; (iv) Pembangunan sistem manajemen terintegrasi diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (v) Mendorong Rancangan Undang-Undang BPIP.



Pada Triwulan II Tahun 2025 optimalisasi pelaksanaan kegiatan diupayakan sesuai dengan *timeline* kegiatan, bila terdapat kendala teknis dan non teknis yang ada pada pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan perbaikan sesuai rencana aksi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai guna terus membangun penguatan akuntabilitas kinerja, BPPI akan terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan dengan lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta aturan, arahan dan praktek yang tepat dalam revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.

BAB I

PEMETAAN SASARAN STRATEGIS

Pancasila telah menjadi konsensus para pendiri bangsa sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup yang menaungi tata peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan negara dengan kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan terkonstruksi secara menyebar ke dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila menjadi jiwa dalam tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila selalu menjadi dasar dalam setiap proses pembangunan semenjak Indonesia berdiri. Saat ini sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dalam melaksanakan misi pembangunan Indonesia Emas 2025, kebijakan terkait ideologi Pancasila diarahkan pada:

1. Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara;
2. Pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan, serta penguatan karakter dan identitas bangsa.

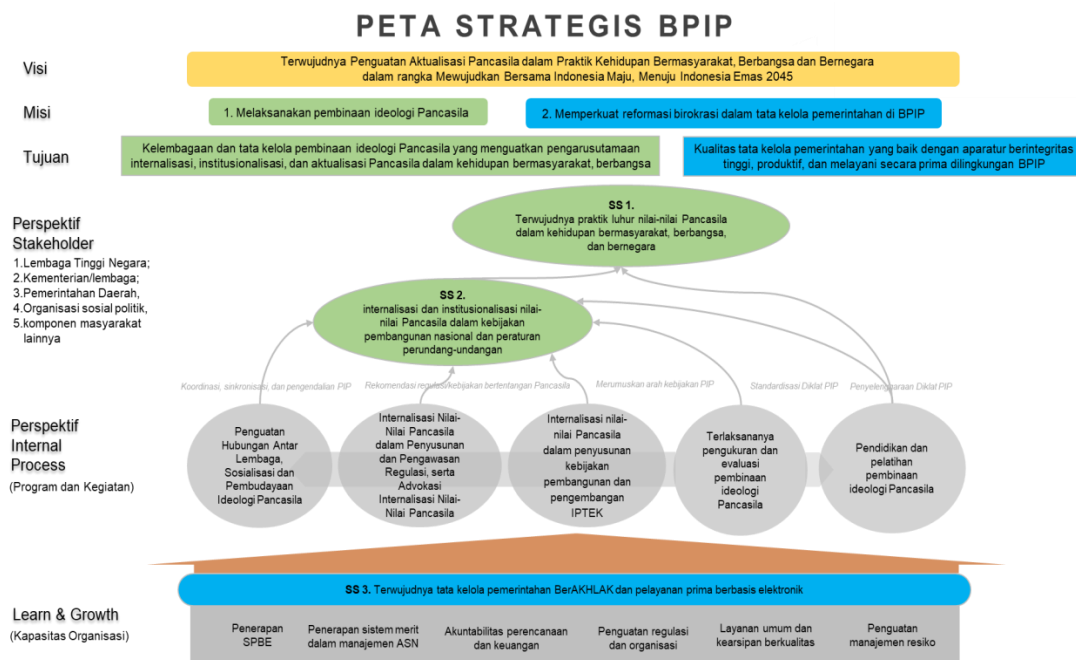
BPIP mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. BPIP dengan program PIP tahun 2025-2029 berfokus pada Asta Cita I atau Agenda Pembangunan Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan program pembangunan

Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional.

Rencana strategis pelaksanaan Program PIP diarahkan mewujudkan 3 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ketiga sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui dukungan Sasaran Program Kedeputan teknis dan Sekretariat Utama dukungan kapasitas organisasi. Sasaran program dicapai dengan berbagai kegiatan. Peta strategis keterkaitan sasaran-sasaran melalui pendekatan perspektif *Stakeholder*, pelaksanaan program dan kegiatan, serta dukungan kapasitas organisasi tampak pada Peta Strategis BPIP berikut ini:



Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP

Tujuan sasaran-sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dipetakan di atas, yaitu:

1. Kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
2. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dilingkungan BPIP;

Ukuran keberhasilan sasaran strategis BPIP adalah, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila	79,37
	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan	Persentase implementasi peta jalan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	40%
Kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi	77,32
		Kategori SAKIP	B

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dilingkungan BPIP	BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik	Nilai Sistem Merit	333
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
		Indeks SPBE	4
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83%

Kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Program PIP dan Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program, yaitu:

1. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila;
2. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
3. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Terlaksananya pengukuran dan evaluasi Pembinaan ideologi Pancasila;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II

A. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Sebagai Lembaga yang diberi mandat dalam PIP maka fungsi koordinasi dan sinkronisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif	100%	29%	 29%
Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif	100%	45,7%	 45,7%
Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	100%	24%	 24%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

A.1. Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif

Indikator Keberhasilan Program:

Target Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif pada Tahun 2025 adalah 100%.

Jika dilihat perkembangannya selama triwulan kedua di tahun 2025 Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan telah berupaya secara maksimal menjadi salah satu Koordinator dalam memfasilitasi dan menghubungkan kegiatan-kegiatan yang berdampak dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.

Hingga Triwulan II Tahun 2025 dukungan Deputi I terhadap capaian IKU tersebut Belum Efektif. Hal ini dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dan program untuk optimalisasi kerja sama pembinaan ideologi Pancasila belum tercapai. Melalui monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat 24 target optimalisasi pada tahun ini, kerja sama pembinaan ideologi Pancasila yang harus dimonitoring pelaksanaannya.

Untuk Triwulan II Tahun 2025 ini upaya telah dilakukan untuk dapat mencapai target tersebut Kedeputan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Kerjasama, melalui Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama optimalisasi terhadap Organisasi Sosial dan Politik serta Organisasi Masyarakat sebanyak 1 mitra kerja. Sedangkan untuk optimalisasi yang dilakukan terhadap K/L/Instansi di Pemerintah Pusat & Daerah sebanyak 6 Mitra.

Maka pelaksanaan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah dilakukan dari hasil MoU ataupun PKS yang telah ditandatangani tahun lalu secara total capaian per triwulan II 2025 telah mencapai capaian sebesar 29% atau dengan rincian sebanyak 7 mitra telah menindaklanjuti dalam minimal satu kegiatan dari 24 target mitra yang harus melaksanakan kegiatan. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Organisasi Sosial Politik dan Komponen Masyarakat lainnya

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda
1.	Kementerian Dalam Negeri
2.	Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Kab Samosir)
3.	Pemerintah Kabupaten Magelang
4.	TNI AD
5.	BNPP (PLBN SKOW DAN PLBN SOTA)
6.	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
7.	Universitas Negeri Semarang

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	4 Rekomendasi Kebijakan	40%	40% (Tahapan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

Penyusunan dokumen Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila dalam lima tahap yaitu:

Tabel 2. 4 Tahapan Penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda
1.	Tahap Perencanaan dan Identifikasi Masalah, Tahap awal ini bertujuan untuk mengenali isu, permasalahan, atau kebutuhan kebijakan yang mendesak atau strategis dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Identifikasi dilakukan berdasarkan data, laporan, pengamatan, atau masukan dari mitra-mitra BPIP yang telah menandatangani Kerjasama.
2.	Pengumpulan Data dan Informasi, Setelah masalah diidentifikasi, dilakukan pengumpulan data yang relevan dan akurat, baik berupa data primer (hasil riset, survei, wawancara) maupun data sekunder (laporan, dokumen resmi, kajian akademis) kepada mitra-mitra BPIP yang telah bekerjasama.
3.	Analisis Masalah dan Perumusan Alternatif Solusi, Data yang sudah dikumpulkan dianalisis untuk memahami akar penyebab, dampak, tren, dan potensi risiko. Analisis ini bisa bersifat kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya, tergantung pada sifat masalahnya. Berdasarkan hasil analisis, disusun beberapa opsi atau alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Setiap alternatif perlu disertai dengan kelebihan, kekurangan, risiko, dan dampaknya.
4.	Penyusunan Naskah Rekomendasi, Merupakan proses penyusunan naskah formal yang akan diajukan kepada Kepala BPIP. Naskah disusun dengan gaya bahasa resmi, struktur yang baku, dan mencakup ringkasan eksekutif, rekomendasi utama, dan lampiran data pendukung.
5.	Penyampaian Rekomendasi kepada Kepala, Tahap akhir adalah pengajuan rekomendasi secara resmi kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Hubungan antar lembaga, sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan. Penyampaian dilakukan melalui Nota Dinas yang disampaikan kepada Kepala BPIP dengan dilampirkan naskah rekomendasi.

Pada Periode Triwulan II Tahun 2025 ini Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama jika dilihat berdasarkan Tahapan untuk menyelesaikan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila masih dalam tahapan kedua, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi sehingga Direktorat Hubungan

Antar Lembaga baru dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut yaitu:

1. Tahap perencanaan dan identifikasi masalah telah dilakukan pembahasan dan rapat-rapat internal dalam rangka perencanaan dan melakukan identifikasi masalah terkait dengan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila.
2. Telah dilakukan pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan-kegiatan kunjungan kerja serta koordinasi optimalisasi kerjasama PIP terhadap kerjasama yang telah ditandatangani pada kegiatan antara lain;
 - Kunjungan kerja ke PLBN SKOW dan SOTA
 - Tindak lanjut kerjasama dengan TNI AD
 - Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada mahasiswa UNNES
 - Kegiatan sarasehan pembahasan geopolitik dunia dengan MPR

Sehingga dapat disimpulkan capaian pada tahap pertama dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{tahap} \text{ hingga } TW \text{ I}}{(1 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$
$$= \frac{2}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 40\%$$

Sehingga melalui kegiatan ini Direktorat Hubungan antar lembaga dan kerja sama saat ini dalam tahap pengumpulan data primer untuk selanjutnya dilakukan analisis masalah dan perumusan alternatif solusi.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut telah menghasilkan rumusan masalah dan masukan-masukan dari mitra untuk menjadi data awal dalam penyusunan rekomendasi serta identifikasi awal oleh Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama dalam penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Dengan Lembaga

tinggi negara, K/L, Pemda dan Orsospol, serta komponen masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti.

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

Tabel 2. 5 Aktivitas Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penandatanganan kerjasama dengan DPRD Wonosobo sekaligus penguatan PIP (Wonosobo, tanggal 3 Mei 2025)	
2.	Sarasehan Bahas Perubahan Geopolitik Dunia dengan MPR (Jakarta, tanggal 21 Mei 2025)	
3.	Kegiatan Pancasila dalam tindakan bersama TNI AD (Kalimantan Timur, tanggal 5 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Penguatan Pancasila di PLBN Skow Papua dan PLBN Sota Papua (Papua, tanggal 11 s.d. 13 Juni 2025)	
5.	Penandatanganan PKS dengan Universitas Musamus (Marauke, tanggal 13 Juni 2025)	

A.2. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif

Indikator Keberhasilan Program

Target Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 45,7% (rata-rata capaian hasil Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif dan Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti):

$$\frac{\text{Capaian hingga TW II}}{3} \times 100\% = \frac{57\% + 20\% + 60\%}{3} \times 100\% = 45,7\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif.	Jumlah Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan	7	57%	57% (Layanan)
	Jumlah Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan	5	20%	20% (Layanan)
Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan	1	60%	60% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

a. Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan

Untuk mencapai 7 Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila maka presentase perhitungan saat ini sekitar 57% dengan rincian layanan yaitu:

$$\frac{\text{Capaian hingga TW II}}{7 \text{ Layanan Sosialisasi}} \times 100\% = \frac{4 \text{ Layanan tercapai}}{7} \times 100\% = 57\%$$

Tabel 2. 7 Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan

No	Layanan	Keterangan	Output
1.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Politik dan Keamanan	Tercapai (3 Kegiatan)	Total 2.000 orang yang dicapai dalam kegiatan masing-masing bidang
2.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Dalam Proses	
3.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Perekonomian	Dalam Proses	
4.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Tercapai (4 Kegiatan)	
5.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Dalam Proses	
6.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Tercapai (1 Kegiatan)	
7.	Layanan Sosialisasi PIP Bidang Pangan	Tercapai (1 Kegiatan)	

Hingga Triwulan II kegiatan yang sudah dilakukan untuk memenuhi 7 Layanan dimaksud yaitu:

1) Sosialisasi Pancasila Bidang Politik dan Keamanan

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pelajar bekerjasama dengan BNPT di Kabupaten Tasikmalaya: "Memperkuat Semangat Kebangsaan dengan Spirit Pancasila dan Ramadhan untuk Mewujudkan Generasi Muda Berkarakter Pancasila"	Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 13 Maret 2025	300 peserta komponen Masyarakat, Pemda, dan Pelajar secara luring
2.	Sarasehan Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang	Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025	700 peserta unsur Lembaga Tinggi Negara,

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
	Menuju Indonesia Raya “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Perubahan Geopolitik Dunia Menuju Indonesia Raya”		Kementerian/Lembaga dan Pemda secara luring
3.	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila “Pancasila Untuk Dunia (Menjawab Tantangan Global dan Geopolitik Dunia) di Kota Palembang	Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 12 Juni 2025	550 peserta unsur akademisi dan mahasiswa secara luring

2) Sosialisasi Pancasila Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Wilayah Purwokerto “Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa”	Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 24 Maret 2025	300 peserta mahasiswa dan pelajar secara luring
2.	Pancasila Virtual Expo Tahun 2025	Jakarta, pada tanggal 01 Juni s.d. 18 Agustus 2025	7.500 orang (sementara)
3.	Pembinaan Ideologi Pancasila “Memperkuat Karakter Bangsa dengan Nilai-Nilai Pancasila Untuk Menuju Indonesia Raya” di Kota Balikpapan	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tanggal 04 Juni 2025	550 peserta unsur tokoh masyarakat, mahasiswa dan pelajar secara luring
4.	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah “Aktualisasi Nilai Ketuhanan Dalam Kebangsaan: Menjaga Moderasi Beragama di	Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2025	500 peserta unsur akademisi, pemda dan organisasi masyarakat

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
	Indonesia”		secara luring

3) Sosialisasi Pancasila Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masyarakat Pesisir dan Nelayan: "Memperkuat Ideologi Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa" di Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta	Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, pada tanggal 26 Maret 2025	300 peserta unsur nelayan dan masyarakat maritim secara luring

4) Sosialisasi Pancasila Bidang Pangan

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	Pembinaan Ideologi Pancasila “Melalui Ekonomi Pancasila Kita Wujudkan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Bangsa”	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 03 Juni 2025	550 peserta untur pemda, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya secara luring

b. Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan

Untuk mencapai 5 Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila maka presentase perhitungan saat ini sekitar 20% dengan rincian layanan yaitu:

$$\frac{\text{Capaian hingga TW II}}{5 \text{ Layanan Komunikasi}} \times 100\% = \frac{1 \text{ Layanan tercapai}}{5} \times 100\% = 20\%$$

Tabel 2. 8 Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila yang diselesaikan

No	Layanan	Keterangan	Output
1.	Layanan Komunikasi PIP di Televisi Nasional / Swasta	Tercapai (1 Kegiatan)	50.000 jangkauan orang yang dicapai dalam program masing-masing bidang
2.	Layanan Komunikasi PIP di Radio Nasional/Swasta	Dalam Proses	
3.	Layanan Komunikasi PIP di Media Online	Dalam Proses	
4.	Layanan Komunikasi PIP di Media Luar Ruang milik Pemerintah	Dalam Proses	
5.	Layanan Komunikasi PIP di Media Luar Ruang milik BUMN/BUMD	Dalam Proses	

Hingga Triwulan II kegiatan yang sudah dilakukan untuk memenuhi 5 Layanan dimaksud yaitu:

1) Komunikasi PIP di Televisi Nasional/Swasta

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	<i>Blocking Time</i> Penyiaran Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 bersama SEA Today di Jakarta pada tanggal 02 Juni 2025	Jakarta, pada tanggal 02 Juni 2025	TV: 2.700 view Youtube: 1.924 view

c. Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan

Untuk mencapai 1 dokumen rekomendasi kebijakan hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila maka presentase perhitungan saat ini sekitar 60% dengan alur proses sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian hingga TW II}}{5 \text{ Tahapan}} \times 100\% = \frac{3 \text{ Tahapan tercapai}}{5} \times 100\% = 60\%$$

Tabel 2. 9 Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan

No	Tahapan	Uraian	Keterangan
1.	Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Konsinyering internal dalam hal pemetaan sosialisasi dan komunikasi Pancasila	Tercapai (1 Kegiatan)
2.	Pengumpulan dan Analisis Data yang melibatkan pakar, <i>stakeholder</i> , dsb	Pembuatan instrument survei kegiatan luring /daring	Tercapai (1 Kegiatan)
3.	Perumusan Strategi dan Alternatif Pendekatan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Perhitungan hasil survei, diskusi komprehensif dengan pihak terkait	Dalam Proses (1 Kegiatan)
4.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Perancangan strategi sosialisasi dan komunikasi	Proses
5.	Hasil Rekomendasi Kebijakan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Melakukan harmonisasi pedoman dan implementasi alur kebijakan	Proses

Hingga Triwulan II kegiatan yang sudah dilakukan untuk memenuhi Tahap 2 dan 3 alur proses dimaksud yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	<i>Focus Group Discussion</i> Optimalisasi Strategi Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025	Jakarta pada tanggal 21 s.d. 24 Januari 2025	50 peserta
2.	<i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta	Jakarta pada tanggal 06 s.d. 09 Mei 2025	50 peserta
3.	Sinkronisasi serta Perumusan Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta	Jakarta pada tanggal 23 s.d. 26 Juni 2025	50 peserta

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

Tabel 2. 10 Aktivitas Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	<i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 6 s.d. 9 Mei 2025)	
2.	<i>Forum Group Discussion</i> Kegiatan <i>User Acceptance Test (UAT)</i> Pancasila <i>Virtual Expo</i> Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 14 s.d. 17 Mei 2025)	
3.	Sarasehan Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Perubahan Geopolitik Dunia Menuju Indonesia Raya” (Jakarta, tanggal 20 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Pancasila <i>Virtual Expo</i> Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 1 Juni s.d. 18 Agustus 2025)	
5.	<i>Blocking Time</i> Penyiaran Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 bersama SEA Today (Jakarta, tanggal 2 Juni 2025)	
6.	Pembinaan Ideologi Pancasila “Melalui Ekonomi Pancasila Kita Wujudkan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Emas” (Balikpapan, tanggal 3 Juni 2025)	
7.	Pembinaan Ideologi Pancasila “Memperkuat Karakter Bangsa dengan Nilai-Nilai Pancasila untuk Menuju Indonesia Raya” (Balikpapan, tanggal 4 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila “Pancasila Untuk Dunia (Menjawab Tantangan Global dan Geopolitik Dunia) (Palembang, tanggal 12 Juni 2025)	
9.	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah “Aktualisasi Nilai Ketuhanan Dalam Kebangsaan: Menjaga Moderasi Beragama di Indonesia” (Pekalongan, tanggal 18 Juni 2025)	
10.	Sinkronisasi serta Perumusan Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 26 Juni 2025)	

A.3. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif

Indikator Keberhasilan Program

Target Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 24% $(20\%+28\%)/2$ (rata-rata capaian Persentase

Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti dan Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila):

$$\frac{\text{Capaian hingga TW II}}{2} \times 100\% = \frac{20\% + 28\%}{2} \times 100\% = 24\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila yang Diselesaikan	2	20%	20% (Rekomendasi)
Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila	Jumlah Fasilitas Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	217	60	28% (Kelompok Masyarakat)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

a. Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti

Tersusunnya Rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti, yaitu saat ini masih dalam tahap pertama yaitu tahap perencanaan dari target lima tahapan untuk menyelesaikan dua rekomendasi Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila. Sehingga Jumlah Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila yang Diselesaikan, telah tercapai 20% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rekomendasi} = \frac{\text{capaian tahapan}}{5 \text{ tahapan}}$$

$$\frac{1 \text{ tahapan}}{5 \text{ tahapan}} = 20\%$$

Adapun tahapan-tahapan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Identifikasi Masalah

Tahap awal ini bertujuan untuk mengumpulkan hasil pembudayaan Pancasila dari berbagai FGD yang sudah dilakukan dan menentukan rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti.

2. Penetapan Prioritas

Setelah penentuan rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti, maka perlu menyusun skala prioritas untuk pelaksanaan berdasarkan sumber daya, waktu, dan target capaian.

3. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Setelah menetapkan prioritas, perlu untuk menyusun rencana aksi (action plan) yang jelas dan terukur: tujuan, langkah kerja, waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab dan melibatkan pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan media.

4. Implementasi Program

Pada tahap ini Direktorat Jaringan dan Pembudayaan melaksanakan pembudayaan Pancasila sesuai dengan rencana tindak lanjut.

5. Menyusun Rekomendasi Hasil Pembudayaan yang Ditindaklanjuti

Setelah dari implementasi program pembudayaan yang ditindaklanjuti, maka tahap terakhir adalah menyusun rekomendasi hasil pembudayaan yang ditindaklanjuti.

b. Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila

Tahun 2025 ini target dari Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila yaitu 217 Jaringan Relawan. Untuk Triwulan II Tahun 2025 tercapai 60 Jaringan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila atau sebesar 28% dari total keseluruhan capaian dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jaringan relawan yang melakukan Aktualisasi}}{217 \text{ Jaringan Relawan}}$$
$$= \frac{60 \text{ Jaringan Relawan}}{217 \text{ Jaringan Relawan}} = 28\%$$

Adapun Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila

No.	Nama Komunitas/Kelompok Masyarakat	Asal Komunitas
1.	Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI)	Jakarta
2.	Yayasan Puan Amal Hayati	Jakarta
3.	Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI)	Jakarta
4.	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta	Jakarta
5.	FPK Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jakarta
6.	Pemuda Mengajar "Cakrawala Intelektual"	Klaten, Jawa Tengah
7.	Kelompok Budidaya Kambing Arpago	Klaten, Jawa Tengah
8.	Ketoprak Mudo Utomo	Klaten, Jawa Tengah
9.	Karang Taruna Bina Taruna Tama	Klaten, Jawa Tengah
10.	Kelompok Tani Marsudi Kismo	Klaten, Jawa Tengah
11.	Pemuda Reasand	Klaten, Jawa Tengah
12.	Pemuda Karisma	Klaten, Jawa Tengah

No.	Nama Komunitas/Kelompok Masyarakat	Asal Komunitas
13.	Pemuda Soprayan	Klaten, Jawa Tengah
14.	Formais	Klaten, Jawa Tengah
15.	Gapoktan Marsudi Kismo I	Klaten, Jawa Tengah
16.	Gapoktan Marsudi Kismo II	Klaten, Jawa Tengah
17.	Akfiris	Klaten, Jawa Tengah
18.	Sanggar Tari Raksa Budaya	Serang, Banten
19.	WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia) Bengkayang	Bengkayang, Kalimantan Barat
20.	Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia (GPIBI) Bengkayang	Bengkayang, Kalimantan Barat
21.	Persatuan Pemuda Perbatasan Kalimantan Barat	Bengkayang, Kalimantan Barat
22.	Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Medan, Sumatera Utara
23.	Rumah Qur'an Hiraa Center	Tasikmalaya, Jawa Barat
24.	Yayasan Bina Insan Bahagia	Tasikmalaya, Jawa Barat
25.	Badan Koordinasi Majelis Ta'lim Masjid Tasikmalaya	Tasikmalaya, Jawa Barat
26.	Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia – PGRI Tasikmalaya	Tasikmalaya, Jawa Barat
27.	RUBIK (Ruang Berkarya Inspiratif Kreatif Kota Tasikmalaya)	Tasikmalaya, Jawa Barat
28.	Komunitas Warga Jatiwaras	Tasikmalaya, Jawa Barat
29.	Komunitas Warga Gunungtanjung	Tasikmalaya, Jawa Barat
30.	Tamyiz Online	Tasikmalaya, Jawa Barat
31.	Warga Komunitas Tasikmalaya	Tasikmalaya, Jawa Barat
32.	OR Solid Tasikmalaya	Tasikmalaya, Jawa Barat
33.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	Medan, Sumatera Utara
34.	Perhimpunan mahasiswa HTN & HAN (pertahanan)	Medan, Sumatera Utara
35.	KPS (Komunitas Peradilan Semu) UMSU	Medan, Sumatera Utara

No.	Nama Komunitas/Kelompok Masyarakat	Asal Komunitas
36.	Komunitas Debat Hukum UMSU	Medan, Sumatera Utara
37.	Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Rakyat Indonesia Maju	Yogyakarta, DIY
38.	LPP NATURE SINERGY	Medan, Sumatera Utara
39.	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Deli Serdang	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
40.	Naposo Punguan Raja Sitanggang dohot Boruna (Purasitabor) Medan	Medan, Sumatera Utara
41.	Yayasan Katalisator Keadilan Indonesia	Medan, Sumatera Utara
42.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Deli Serdang	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
43.	HIMPAUDI Kabupaten Deli Serdang	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
44.	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nommensen	Medan, Sumatera Utara
45.	HIMPAUDI Tanjung Morawa	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
46.	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Deli Serdang	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
47.	BKM Masjid Lahmuddin Dalimunthe	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
48.	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Unika St. Thomas SU Medan	Medan, Sumatera Utara
49.	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirtosari	Medan, Sumatera Utara
50.	Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Deli Serdang	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
51.	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Medan	Medan, Sumatera Utara
52.	Pengurus Anak Cabang (PAC) Medan Maimun PDI Perjuangan	Medan, Sumatera Utara
53.	Pengurus Anak Cabang (PAC) Kutalimbaru PDI Perjuangan	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
54.	Pengurus Anak Cabang (PAC) Galang PDI Perjuangan	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
55.	Pengurus Anak Cabang (PAC) Beringin PDI Perjuangan	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

No.	Nama Komunitas/Kelompok Masyarakat	Asal Komunitas
56.	Pengurus Anak Cabang (PAC) Kec. Pagar Marbau PDI Perjuangan	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
57.	Pengurus Anak Cabang (PAC) Medan Sunggal PDI Perjuangan	Medan, Sumatera Utara
58.	Pengurus Anak Cabang (PAC) Batang Kuis PDI Perjuangan	Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
59.	Brain Indonesia	Medan, Sumatera Utara
60.	Yayasan DKN	Medan, Sumatera Utara

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 13 Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Rapat Pembahasan Perubahan Kategori Ikon Prestasi Pancasila Dan Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila (Jakarta, tanggal 23 s.d. 25 April 2025)	
2.	Survei dan Koordinasi Penguatan Jaringan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di Kabupaten Merauke (Papua Selatan, tanggal 5 s.d. 8 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Persiapan Kegiatan Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila Bersama DPR RI Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025)	
4.	Rapat Persiapan Kegiatan Relawan Gerakan Pancasila Bersama DPR RI Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 4 Juni 2025)	
5.	Kegiatan Penguatan Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila Bersama DPR RI Tahun 2025 (Bengkayang, tanggal 10 s.d. 13 Juni 2025)	
6.	Kegiatan Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila Bersama DPR RI Tahun 2025 (Serang, tanggal 10 s.d. 13 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2025 (Aceh, tanggal 14 s.d. 16 Juni 2025)	
8.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2025 (Tasikmalaya, tanggal 14 s.d. 16 Juni 2025)	
9.	Kegiatan Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila Bersama DPR RI Tahun 2025 (Medan, tanggal 15 s.d. 18 Juni 2025)	
10.	Kegiatan Goes To School (Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan) Di Sekolah Lanjut Tingkat Atas (Klaten, tanggal 15 s.d. 19 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Rapat Penerimaan Audiensi Kebaya Unesco Go To School (Jakarta, tanggal 23 Juni 2025)	
12.	Kegiatan Pekan “Bung Besar” Bersama Relawan Kabajikan Pancasila (Yogyakarta, tanggal 27 s.d. 30 Juni 2025)	

B. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum tersendiri yang secara terus menerus dilakukan internalisasi dan institusionalisasi. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Indikator Keberhasilan Sasaran Program Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah termanfaatkan dan ditindaklanjutinya capaian keluaran yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI	Ket
Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	100%	45%	 45%
Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan	100%	50%	 50%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	100%	45%	 45%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

B.1. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti dengan Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 45% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Produk Hukum hingga TW II}}{20 \text{ Produk Hukum}} \times 100\% = \frac{9 \text{ Produk Hukum}}{20 \text{ Produk Hukum}} \times 100\% = 45\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Selaras dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	5	45%	45% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

Dalam hal pelaksanaan analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai Pancasila pada tahun anggaran 2025 memiliki target 5 rekomendasi dengan 20 keluaran rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila. Hingga Triwulan II (Januari s.d. Juni), Direktorat Analisis dan Penyelarasan telah menyelesaikan 9 analisis dan penyelarasan dari 20 keluaran rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Rekomendasi rancangan produk hukum yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana	Selesai diselaraskan 100%
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pelayanan Advokasi Hukum	Selesai diselaraskan 100%
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum	Selesai diselaraskan 100%
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan Pengelola Rumah Susun	Selesai diselaraskan 100%
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Selesai diselaraskan 100%
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Selesai diselaraskan 100%

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
7.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Selesai diselaraskan 100%
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Selesai diselaraskan 100%
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Selesai diselaraskan 100%

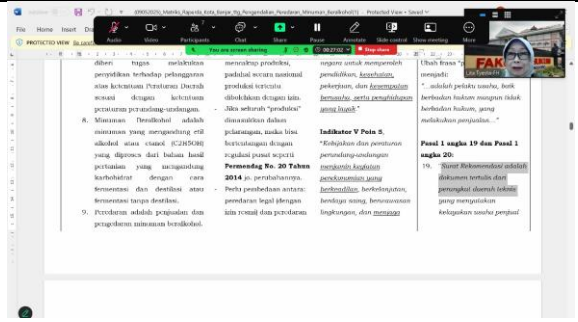
Sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 45 % dengan rincian perhitungan:

$$\frac{\text{Produk Hukum hingga TW I}}{20 \text{ Produk Hukum}} \times 100\% = \frac{9 \text{ Produk Hukum}}{20 \text{ Produk Hukum}} \times 100\% = 45\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

Tabel 2. 17 Aktivitas Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Dialog Kinerja dan Simulasi Penerapan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN melalui Aplikasi SINERGI di BPIP (Jakarta, tanggal 16 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Penguatan Penerapan Indikator Nilai Pancasila bagi Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Wonosobo, tanggal 2 s.d. 4 Mei 2025)	
3.	Konsultasi Ahli Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di BPIP (Jakarta, tanggal 9 Mei 2025)	
4.	Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat dalam rangka membahas Penyampaian Aspirasi Masyarakat terkait Pembentukan RUU KUHAP dan Dukungan Kinerja Kejaksaan di BPIP (Jakarta, tanggal 15 Mei 2025)	
5.	Koordinasi kebutuhan pembangunan hukum di bidang Pancasila pada penyusunan DPHN (Dokumen Pembangunan Hukum Nasional) Tahun 2025 di Badan Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta, tanggal 20 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila di Kantor Biro Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 27 Mei 2025)	
7.	Koordinasi penyelarasan rancangan peraturan dan penjajakan kerjasama penyelenggaraan diklat terkait materi ajar Indikator Nilai Pancasila di Kantor Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 28 Mei 2025)	
8.	Koordinasi penyelarasan rancangan peraturan perundang-undangan dan penjajakan kerjasama penyelenggaraan diklat terkait materi ajar Indikator Nilai Pancasila di Kantor Ditjen PP Kementerian Hukum Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 4 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Bimbingan Teknis dalam rangka Penguatan Nilai Ideologi Pancasila dalam Regulasi dan Kebijakan Pembangunan bagi Anggota dan Eksekutif DPRD Kabupaten OKU Selatan (Jakarta, tanggal 10 s.d. 11 Juni 2025)	
10.	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Monitoring Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.5 tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Pemalang dan Tegal (Jawa Tengah, tanggal 16 s.d. 19 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Konsultasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis tentang Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Jakarta, tanggal 26 Juni 2025)	
12.	Institusionalisasi Penguatan Indikator Nilai Pancasila dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Dalam Rangka Penyusunan dan Perumusan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Rencan Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2045 di Palu dan Parigi Moutong (Sulawesi Tengah, tanggal 23 s.d. 26 Juni 2025)	

B.2. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 50% $(60\%+40\%)/2$ (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian hingga TW II}}{2} \times 100\% = \frac{60\%+40\%}{2} \times 100\% = 50\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap LTN/K/L/D yang Diselesaikan	1	60%	60% (Rekomendasi Kebijakan)
	Jumlah Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Diselesaikan	4	40%	40% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

a. Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap LTN/K/L/D yang Diselesaikan

Pada Triwulan II, capaian rekomendasi hasil advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap LTN/K/L/D mencapai 60%. Nilai ini diperoleh dari penyelesaian tiga dari lima tahapan penyusunan satu rekomendasi yang finalisasi dokumen rekomendasi. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan dengan rincian layanan yaitu:

$$\frac{\text{Capaian tahapan hingga TW II}}{(1 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$
$$= \frac{3}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 60\%$$

No.	Rekomendasi	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
		inventarisasi masalah dan kendala	perumusan substansi dan arah kebijakan	finalisasi dokumen rekomendasi	penyerahan dan penetapan hasil kajian	monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
1	Rekomendasi Advokasi PIP Kepada Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya	✓	✓	✓		

b. Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Diselesaikan

Pada Triwulan II, capaian tahapan penyusunan Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap organisasi sosial dan komponen masyarakat lainnya mencapai 40%. Persentase ini dihitung dari satu tahapan yang berupa inventarisasi masalah dan kendala dalam pelaksanaan PIP dari total lima tahapan yang direncanakan untuk total sembilan rekomendasi. Capaian ini menunjukkan bahwa proses advokasi telah dimulai dan diharapkan

terus meningkat seiring berjalannya waktu dan penyelesaian tahapan-tahapan selanjutnya secara bertahap dan terstruktur.

Berikut adalah deskripsi mendetail mengenai tabel persentase yang menunjukkan progres dokumen rekomendasi Direktorat Advokasi:

Dalam rangka penyusunan Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), terdapat lima tahapan utama yang harus dilalui secara sistematis, yaitu: (1) inventarisasi masalah dan kendala dalam pelaksanaan PIP; (2) perumusan substansi dan arah kebijakan dalam bentuk rekomendasi advokasi PIP; (3) finalisasi dokumen rekomendasi berdasarkan hasil konsultasi dan uji kelayakan; (4) penyerahan dan penetapan hasil kajian kepada Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, atau organisasi terkait; serta (5) monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Setiap rekomendasi disusun dengan pola kerja yang serupa, yaitu menargetkan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagai pihak yang diharapkan dapat memanfaatkan serta mengimplementasikan rekomendasi tersebut secara nyata dalam kebijakan atau program kerja. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat relevansi dan keberterimaan rekomendasi di tingkat pelaksana. Persentase capaian yang tercantum dalam laporan menunjukkan sejauh mana tahapan penyusunan rekomendasi telah dilakukan dan direspons oleh pihak-pihak terkait, baik dalam bentuk pengakuan, integrasi ke dalam kebijakan, maupun tindak lanjut konkret di lapangan, yang seluruhnya menjadi tolok ukur keberhasilan proses advokasi PIP. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan dengan rincian layanan yaitu:

$$\frac{\text{Capaian tahapan hingga TW II}}{(4 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{20 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 40\%$$

No.	Rekomendasi	Tahap 1 inventarisasi masalah dan kendala	Tahap 2 perumusan substansi dan arah kebijakan	Tahap 3 finalisasi dokumen rekomendasi	Tahap 4 penyerahan dan penetapan hasil kajian	Tahap 5 monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
1	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Kegamaan	✓	✓			
2	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Kemanusiaan	✓	✓			
3	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Sosial dan Ekonomi	✓	✓			
4	Rekomendasi Advokasi PIP Bidang Hukum dan Politik	✓	✓			

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

Tabel 2. 19 Aktivitas Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Rapat Pembahasan Program Prioritas Direktorat Advokasi Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 16 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 21 April 2025)	
3.	Kegiatan Konsinyering Advokasi dalam rangka Pembahasan Problematika Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Warga Negara atas Keyakinan Beragama (Jakarta, tanggal 29 April s.d. 1 Mei 2025)	
4.	Kegiatan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kebijakan dan Regulasi mengenai Perlindungan Masyarakat Adat (Semarang, tanggal 14 s.d. 16 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Konsinyering Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 20 s.d. 22 Mei 2025)	
6.	Rapat Penyusunan Instrumen Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 13 Juni 2025)	
7.	Kegiatan “Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kebijakan dan Regulasi mengenai Perlindungan Masyarakat Adat” (Semarang, tanggal 23 s.d. 26 Mei 2025)	

B.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025 adalah 100%

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 45% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	2	45%	45% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

Pada Tahun Anggaran 2025 Dukungan Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 2 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti yakni Rekomendasi hasil kajian regulasi/kebijakan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi. Capaian dari 2 rekomendasi tersebut dijelaskan melalui rincian berikut:

$$\frac{\text{Capaian hingga TW II}}{\text{Target Jumlah Rekomendasi}} \times 100\% = \frac{40\% + 50\%}{2} \times 100\% = 45\%$$

a. Dokumen rekomendasi hasil kajian regulasi/kebijakan

Sampai Triwulan II Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam tahapan Penetapan regulasi yang akan dikaji (aduan masyarakat, inventarisasi internal, permohonan K/L lain). Dalam hal ini capaian tahapan pembentukan rekomendasi diukur dengan 5 Tahapan yaitu:

1. Penetapan regulasi yang akan dikaji (aduan masyarakat, inventarisasi internal, permohonan K/L lain).
2. Proses pengkajian dengan melibatkan akademisi Perguruan Tinggi, *stakeholder* dan praktisi.
3. Penyusunan rekomendasi bekerjasama dengan para pakar, *stakeholder* dan akademisi.
4. Penyampaian hasil rekomendasi kepada Presiden melalui pimpinan serta kepada *stakeholder* terkait.
5. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disusun melalui proses monitoring dan evaluasi.

Pada Triwulan II, capaian rekomendasi mencapai 40%. Nilai ini diperoleh dari penyelesaian dua dari lima tahapan penyusunan satu rekomendasi yang berupa Proses pengkajian dengan melibatkan akademisi Perguruan Tinggi, *stakeholder* dan praktisi. Artinya, proses masih berjalan dan menunjukkan progres yang positif. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan. Berikut adalah metode perhitungannya:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Capaian tahapan hingga TW I}}{(1 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% \\ &= \frac{2}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 40\% \end{aligned}$$

b. Dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

Sampai Triwulan II Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam tahapan Pembahasan rekomendasi tingkat pimpinan, Dalam hal ini capaian tahapan pembentukan rekomendasi diukur dengan 4 Tahapan yaitu:

1. Pembahasan rekomendasi Tingkat pimpinan, yang ditindaklanjuti tingkat pimpinan telah dilaksanakan ditingkat Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi. Selanjutnya, Pembahasan penyampaian rekomendasi hasil kajian untuk di tindaklanjuti dibahas di tingkat Pimpinan dan Dewan Pengarah untuk mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah berdasarkan Pasal 55 Perpres No 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Setelah mendapat persetujuan, arahan dan disposisi pimpinan dan dewan pengarah, Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti kepada K/L, Pemprov, Pemkot, dan Pemkab berdasarkan Perban BPIP No 5 Tahun 2020 dan Perpres No 7 Tahun 2018.
3. Penyampaian rekomendasi, Deputi menyampaikan hasil rekomendasi kepada lembaga tinggi negara, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah berdasarkan Pasal 16 Perban No 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
4. Penyampaian hasil rekomendasi kepada Presiden melalui pimpinan serta kepada *stakeholder* terkait.

Pada Triwulan II, capaian rekomendasi mencapai 50%. Nilai ini diperoleh dari penyelesaian dua dari empat tahapan penyusunan satu rekomendasi yang berupa proses persetujuan.

Artinya, proses masih berjalan dan menunjukkan progres awal yang positif. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan. Berikut adalah metode perhitungannya:

$$\frac{\text{Capaian tahapan hingga TW I}}{(1 \text{ rekomendasi} \times 4 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{4 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 50\%$$

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 21 Aktivitas Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Strategi Rencana Kerja (Timeline) Kajian Kebijakan Regulasi dan Monitoring Evaluasi Hasil Kajian Rekomendasi Tahun 2025 (Jakarta, 2 Mei 2025)	
2.	DKT dalam identifikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila (Jakarta, 14 s.d. 16 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Koordinasi dalam rangka Pemantauan Rekomendasi Hasil Kajian Kebijakan/Regulasi yang ditindaklanjuti berdasarkan Indikator Nilai Pancasila di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemendiknas RI (Jakarta, 26 Mei 2025)	
4.	Koordinasi dalam rangka Pemantauan Rekomendasi Hasil Kajian Kebijakan/Regulasi yang ditindaklanjuti berdasarkan Indikator Nilai Pancasila di Lembaga Administrasi Negara (Jakarta, 28 Mei 2025)	
5.	DKT Dalam Rangka Identifikasi Lanjutan UU Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila (UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UU) (Jakarta, 23 s.d. 26 Juni 2025)	

C. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagai lembaga PIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya penyelenggaraan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP, diantaranya adalah:

1. Intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
2. Kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
3. Masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
4. Rendahnya tingkat ke dalam literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
5. Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

Berdasarkan urgensi atas tugas yang diemban oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, maka Sasaran Program Deputi Bidang Pengkajian dan Materi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPIP Tahun 2025-2029 adalah berupa Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah:

Tabel 2. 22 Indikator Kinerja Program Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	Ket
Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan	100%	32,5%	 32,5%
Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan	100%	64,6%	 64,6%
Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan	100%	36,7%	 36,7%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

C.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 32,5% (proses penyusunan kajian) (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis PIP yang diselesaikan	2	32,5%	32,5% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis PIP yang diselesaikan. Capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\
 &= \frac{(25\% + 40\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\
 &= \frac{65\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 32,5\%
 \end{aligned}$$

Sebagai catatan, rekomendasi yang telah ditetapkan sebagai *output* Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP adalah 1) Rekomendasi Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan 2) Rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara.

Berikut merupakan detail capaian kinerja Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP pada Triwulan II tahun 2025, dengan mempertimbangkan

kalender rencana kerja Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP yang telah disusun:

1) Penyusunan Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

- Rekomendasi Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila

Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kajian kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila berupa dokumen Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tahun 2025, kajian ini berfokus pada Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penyusunan dokumen rekomendasi Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melakukan penyusunan sejak 2023 dengan keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan matriks usulan peta jalan. Sampai dengan akhir tahun 2024, telah melibatkan 41 Kementerian/Lembaga (K/L) dan lembaga negara (LN) dalam penyusunan Peta Jalan PIP 2025-2029. Proses penyusunan ini telah menghasilkan sebuah matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 yang berisi usulan-usulan kegiatan K/L dan LN berserta keluarannya yang dinilai relevan dapat mencapai sasaran-sasaran dari setiap isu strategis Arah Kebijakan PIP. Tetapi mengingat terjadi perubahan dan penambahan susunan organisasi K/L pada kabinet pemerintah 2025-2029, serta selesainya dokumen-dokumen perencanaan periode tahun 2024 dan terbitnya dokumen-dokumen perencanaan baru seperti RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pada tahun 2025 ini terhadap usulan-usulan kegiatan dalam Matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 yang telah diterima pada tahun 2024.

Dalam proses penyusunan rekomendasi Peta Jalan PIP, maka dilakukan empat tahap yaitu:

1. Identifikasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Negara yang mengalami penyesuaian pada tahun 2025;
2. Validasi usulan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Negara yang mengalami penyesuaian pada tahun 2025;
3. Penyusunan lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2025-2029;
4. Akseptasi internal BPIP.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari penyusunan Peta Jalan PIP yang telah dilakukan, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP telah melaksanakan tahapan berupa identifikasi usulan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Negara yang terjadi penyesuaian pada tahun 2025. Selanjutnya, telah dilakukan validasi usulan kegiatan kepada 47 Kementerian/Lembaga yang telah melakukan penyesuaian pengusulan kegiatan. Sebanyak 47 K/L tersebut adalah:

**Tabel 2. 24 Validasi usulan kegiatan kepada 47
Kementerian/Lembaga**

No.	Kementerian/Lembaga
1.	Mahkamah Agung RI.
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4.	Kementerian Dalam Negeri.
5.	Kementerian Agama.
6.	Kementerian Hukum.
7.	Kementerian Sosial.
8.	Kementerian Pertanian.
9.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
10.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.



**LAPORAN CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN II
TAHUN 2025**



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

No.	Kementerian/Lembaga
11.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
12.	Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13.	Arsip Nasional Republik Indonesia.
14.	Badan Kepegawaian Nasional.
15.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
16.	Lembaga Administrasi Negara.
17.	Lembaga Ketahanan Nasional.
18.	Kementerian Luar Negeri.
19.	Kementerian Pertahanan.
20.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
21.	Kementerian Kesehatan.
22.	Kementerian Ketenagakerjaan.
23.	Kementerian Perindustrian.
24.	Kementerian Perdagangan.
25.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
26.	Kementerian Kelautan dan Perikanan.
27.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
28.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
29.	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
30.	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
31.	Komisi Pemilihan Umum.
32.	Ombudsman.
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional.
34.	Perpustakaan Nasional.
35.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
36.	Kementerian Kehutanan.
37.	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

No.	Kementerian/Lembaga
38.	Kementerian Koperasi.
39.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
40.	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
41.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
42.	Badan Pangan Nasional.
43.	Badan Gizi Nasional.
44.	Kementerian Kebudayaan.
45.	Kementerian Komunikasi dan Digital.
46.	Kementerian Pemuda dan Olahraga.
47.	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Hingga bulan Juni 2025, masih dilakukan proses validasi usulan kegiatan kepada pemerintah daerah provinsi. sehingga berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan PIP tahun 2025-2029 pada Triwulan II 2025 adalah sebesar:

$$\frac{\text{tahapan hingga TW II}}{(1 \text{ dokumen} \times 4 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{4 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 25\%$$

Pada triwulan II, penyusunan dokumen rekomendasi Penyesuaian Kebijakan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila masuk pada tahap II, yaitu validasi usulan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi namun tahap ini belum terselesaikan. Maka telah dilaksanakan 1 dari 4 tahapan keseluruhan, sehingga dapat dihitung capaian kinerja yang dicapai terkait penyusunan dokumen rekomendasi Peta Jalan PIP tahun 2025-2029 adalah sebesar 25%. Tahapan Validasi usulan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi ditargetkan selesai pada bulan Agustus.

- Rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP dalam hal perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pada tahun 2025 Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP akan menyusun Rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara. Penyusunan Rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara merupakan bentuk akhir dari upaya diselesaikannya dokumen Naskah Sumber Dasar Negara yang telah dimulai pada tahun 2024.

Berkenaan dengan kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara, dibagi menjadi 3 rangkaian kronologis yaitu:

1. Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945;
2. Naskah Sumber Arsip Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)-Masa Reses dan Sidang Kedua 10 s.d. 17 Juli 1945;
3. Naskah Sumber Arsip Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945

Pada Tahun anggaran 2024, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi bekerjasama dengan Deputy Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Perlindungan Arsip telah menyelesaikan penyusunan “Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945”. Sementara itu terkait dua seri lainnya akan diselesaikan pada tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan Rekomendasi Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara diperlukan tahapan:

1. Identifikasi dan validasi Naskah Sumber Arsip Badan

- Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)-Masa Reses dan Sidang Kedua 10 s.d. 17 Juli 1945;
2. Identifikasi dan validasi Naskah Sumber Arsip Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)-Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945
 3. Gelar Naskah dan Ekspose Naskah Sumber Arsip Volume II dan II
 4. Penyusunan Rekomendasi
 5. Akseptasi Internal BPIP.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara, Pada Triwulan II Tahun 2025, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP telah melaksanakan tahapan Gelar Naskah Sumber Arsip Naskah Sumber Arsip Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK. Selanjutnya, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP berencana melakukan penjangkaran masukan dalam rangka penguatan narasi kronologis dan perbaikan Naskah Sumber Arsip Masa Reses dan Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan mulai melakukan identifikasi sumber arsip sidang PPKI.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan dokumen Rekomendasi Hasil Kajian Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara pada Triwulan II 2025 adalah sebesar:

$$\frac{\text{tahapan hingga TW II}}{(1 \text{ dokumen} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$
$$= \frac{2}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 40\%$$

Pada triwulan II, penyusunan dokumen rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara masih dalam tahap 2, yaitu berupa Gelar Naskah Naskah Sumber Arsip Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK. Maka dengan demikian telah dilaksanakan 2 dari 5 tahapan keseluruhan, sehingga dapat

dihitung capaian kinerja yang dicapai terkait penyusunan dokumen rekomendasi Hasil Kajian Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara adalah sebesar 40%.

2) Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Kajian penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penyusunan rekomendasi Kebijakan. Hingga Triwulan II ini, baru dilaksanakan perencanaan terkait dengan sistem penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat.

3) Penerbitan Jurnal Ilmiah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP melakukan beberapa pengelolaan jurnal ilmiah yaitu:

- *Pengelolaan Jurnal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*

Pengelolaan jurnal ilmiah “Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK)” pada tahun 2025, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya akan melaksanakan dua kali penerbitan, yaitu pada periode April 2025 (Volume 5 Nomor 1) dan Oktober 2025 (Volume 5 Nomor 2). Hingga triwulan II tahun 2025, Telah terbit edisi April 2025 dan dalam rangka penerbitan jurnal Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2025 akan dilakukan review internal.

- Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia;

Pengelolaan Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia, pada tahun 2025 akan melaksanakan dua kali penerbitan, yaitu pada periode Mei 2025 (Volume 2 Nomor 1) dan November 2025 (Volume 2 Nomor 2). Hingga Triwulan II tahun 2025, telah dilakukan penerbitan Volume 2 Nomor 1 edisi Mei 2025 dan sedang berlangsung pengumpulan artikel melalui mekanisme *Call For Paper*.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 25 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Pembahasan Usulan Matriks Peta Jalan PIP Bersama Kementerian Hak Asasi Manusia Dan Finalisasi Penyusunan Bahan Tayang Arah Kebijakan PIP (Jakarta, 16 April 2025)	
2.	Konfirmasi dan Verifikasi Arsip Masa Reses dan Arsip Sidang Kedua BPUPK Masa Sidang 10 s.d. 17 Juli 1945 (Jakarta, 24 s.d. 26 April 2025)	
3.	Publikasi Jurnal Ilmiah 'Pancasila : Jurnal Keindonesiaan' Volume 5 Nomor 1 serta Pengajuan Reakreditasi SINTA 2 (Jakarta, 24 s.d. 26 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Rapat Tehnikal Meeting Finalisasi Usulan Kegiatan Matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 Bersama Kementerian/Lembaga (Jakarta, 28 April 2025)	
5.	Rapat Monitoring Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II (Jakarta, 30 April 2025)	
6.	Pembahasan Draf Lampiran Peraturan Presiden Tentang Arah Kebijakan Pip Dan Peta Jalan PIP Serta Finalisasi Usulan Kegiatan Matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 Bersama Kementerian/Lembaga (Jakarta, 7 s.d. 10 Mei 2025)	
7.	Validasi dan Rekonsiliasi Arsip Masa Reses Serta Sidang Kedua BPUPK Masa Sidang 10 s.d 17 Juli 1945 (Jakarta, 15 s.d. 17 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Penyerapan Pandangan Dalam Rangka Konfirmasi Dan Verifikasi Matriks Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Semarang, 25 s.d. 27 Mei 2025)	
9.	Penyerapan Pandangan dan Publikasi Bhinneka Tunggal Ika : Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Semarang, 25 s.d. 27 Mei 2025)	
10.	Rapat Pembahasan Pengaturan Arah Kebijakan 2025-2045 dan Peta Jalan PIP 2025-2029 (Jakarta, 12 Juni 2025)	
11.	Finalisasi Usulan Kegiatan Matriks Peta Jalan PIP 2025-2029 Bersama Kementerian/Lembaga Dan Penyesuaian Matriks Peta Jalan PIP Daerah (Jakarta, 16 s.d. 20 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Gelar Naskah Arsip Masa Reses Dan Sidang Kedua BPUPK (Jakarta, 16 s.d. 20 Juni 2025)	
13.	<i>Technical Meeting</i> kegiatan Peluncuran “Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume I: Masa Sidang Pertama BPUPK 29 Mei s.d. 1 Juni 1945” dan Penyerahan Buku “Tafsir Karya-karya Sukarno – Telaah Hermeneutis atas Surat dan Tonil di Ende” (Jakarta, 23 Juni 2025)	
14.	Menerima Kunjungan dalam Rangka Pengumpulan Data dan Masukan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN), Serta Pembahasan Rancangan Surat Edaran dan Buku Pedoman Penyusunan Peta Jalan PIP 2025-2029” (Jakarta, 26 Juni 2025)	

C.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Materi yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 64,6% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 26 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	2	64,6%	64,6% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 64,6%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{(62,5\% + 66,7\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{129,2\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 64,6\% \end{aligned}$$

Rincian dari 2 Rekomendasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Hasil Kajian Standarisasi Materi, Metode dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah berupaya untuk berupaya untuk :

- 1) Memastikan keseragaman dan kualitas materi PIP di seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah; dan
- 2) Menyediakan acuan metodologis bagi pendidik dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara efektif dan menarik, serta memperkuat sinergi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam penguatan ideologi Pancasila.

Dalam prosesnya penyusunan Rekomendasi Hasil Kajian Standarisasi Materi, Metode dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dibutuhkan 8 tahapan yaitu:

- 1) *Brainstorming*: pengumpulan gagasan atau ide secara spontan dan kreatif
- 2) Studi Literasi: kajian akademik dan penyiapan draf (I)
- 3) Akseptasi
- 4) Pembahasan dan pengembangan draf hingga mencapai

kesepakatan tim

5) Penelaahan draf (I) oleh pakar dan pemangku kebijakan

6) Penelaahan draf (I) oleh pakar dan pemangku kebijakan

7) Uji publik telaah draf (III) oleh praktisi dan pengguna di lapangan

8) Persetujuan draf (IV) oleh Pimpinan

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melakukan pengumpulan gagasan atau ide secara spontan dan kreatif melalui pertemuan- peremuan internal baik daring maupun luring. Selain itu juga dilakukan koordinasi bersama para pakar di bidangnya khususnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka *Brainstorming* awal penyusunan Pedoman Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Setelah itu, dilakukan kegiatan studi literasi melalui kajian akademik dan penyiapan draf pedoman pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan materi terkait dan sebagai kerangka acuan dalam menyusun draf (I).

Perumusan pedoman standarisasi materi, metode dan bahan ajar ini terdiri dari Standar Isi, Standar Kelulusan, Standar Materi, Standar Metode dan Standar Bahan Ajar. Sementara masih dalam tahap perencanaan yaitu Standar bahan ajar dan metode. Untuk lainnya sudah dirumuskan Bersama instansi terkait.

Hingga TW II ini sudah dilakukan 5 tahapan penyusunan sampai pada tahap Penelaahan Draf oleh para pakar dan pemangku kebijakan. Dalam kegiatan ini juga hadir para penulis pedoman Pendidikan Pancasila yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13 s.d. 14 Juni 2025. Dalam kegiatan ini diharapkan adanya masukan atas draf yang sudah disusun, sehingga bias disempurnakan dan diterima oleh pakar juga

para pemangku kebijakan terkait. Rekomendasi hasil kajian akan disusun setelah naskah pedoman standarisasi materi, metode dan bahan ajar selesai.

Dari tahapan yang sudah dilalui dapat disimpulkan bahwa capaian Rekomendasi Hasil Kajian Standarisasi Materi, Metode dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{8 \text{ Tahapan Penyusunan}} \\ &= \frac{5 \text{ Tahapan}}{8 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 62,5\% \end{aligned}$$

2. Rekomendasi Hasil Kajian CPMK Pendidikan Pancasila sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang dimanfaatkan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 ayat 2 mengisyaratkan BPIP perlu menyusun pedoman tentang materi pembelajaran pendidikan Pancasila dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) bagi perguruan tinggi. Sebagai tindaklanjutnya, Direktorat Pengkajian Materi PIP telah melakukan koordinasi dan pembahasan bersama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil koordinasi dan pembahasan dimaksud, saat ini sedang dilakukan penyusunan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai dasar dalam penyusunan buku dan modul bahan ajar Pendidikan Pancasila pada MKWK.

Proses penyusunan CPMK ini dilakukan dengan kolaborasi antara Direktorat Pengkajian Materi PIP dengan

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan diharapkan akan segera difinalisasi mengingat saat ini tengah disusun buku Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi oleh Dit. Belmawa dengan para penulis buku Perguruan Tinggi. Pedoman ini juga sekaligus menjadi salah satu rekomendasi dari Dit. Pengkajian Materi sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.

Hingga akhir TW II Dalam penyusunan CPMK telah dilakukan finaliasi CPMK Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, telah dirumuskan uraian pembelajaran metode (sebagai metode dalam RPS) dan telah diajukan outline materi buku Pendidikan Pancasila kepada Diktisaintek.

Adapun beberapa *output* berupa materi yang sudah diselesaikan yaitu:

- Penyusunan bahan tayang tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1965;
- Penyusunan bahan tayang Pidato 1 Juni 1945;
- Reviu materi PIP bagi Polri
- Reviu atas materi BTU Pendidikan Pancasila

Dengan Tahapan:

- 1) Identifikasi permasalahan, pengumpulan data primer/sekunder, dan studi literasi;
- 2) Pengolahan data;
- 3) Akseptasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- 4) Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK); dan
- 5) Persetujuan bersama terhadap draf CPMK.
- 6) Perumusan Pedoman Pembelajaran Pancasila
- 7) Persetujuan bersama rumusan Pedoman dan CPMK sebagai regulasi
- 8) Reviu bahan ajar Pendidikan Pancasila jenjang Diploma

dan Sarjana.

9) Persetujuan bersama bahan ajar Pendidikan Pancasila jenjang Diploma dan Sarjana.

Dari capaian diatas dapat disimpulkan bahwa Rekomendasi Hasil Kajian CPMK Pendidikan Pancasila sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang dimanfaatkan dalam penyusunan CPMK telah dilakukan finaliasi CPMK Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, telah dirumuskan uraian pembelajaran metode (sebagai metode dalam RPS) dan telah diajukan outline materi buku Pendidikan Pancasila kepada Diktisaintek, sehingga dapat disimpulkan capaian adalah sebesar:

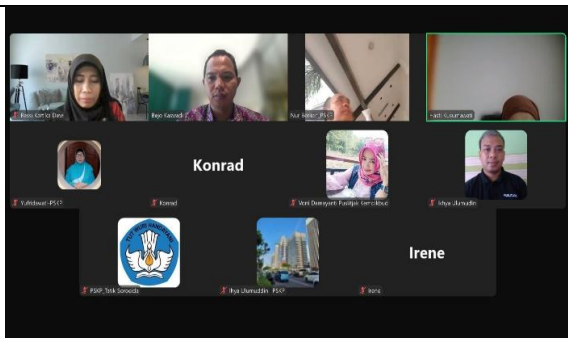
$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{9 \text{ Tahapan Penyusunan}}$$

$$= \frac{6 \text{ Tahapan}}{9 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 66,7\%$$

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 27 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyusunan Capaian Pembelajaran (CPMK) Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi (Sebagai Telaah CPMK Eksisting) dan Diskusi Terbatas Topik Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) (Jakarta, 21 s.d. 24 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Pembahasan Dan Penyempurnaan Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila Jenjang Dasar Dan Menengah Sebagai Tindak Lanjut Sinkronisasi Kebijakan <i>Deep Learning</i> Kemendikdasmen (Jakarta, 30 April 2025)	
3.	Rapat Pembahasan Pendidikan Pancasila Jenjang Dasar Dan Menengah Sebagai Tindak Lanjut Sinkronisasi Kebijakan <i>Deep Learning</i> Kemendikdasmen (Jakarta, 2 Mei 2025)	
4.	Perumusan Pedoman Pembelajaran Pancasila Di Perguruan Tinggi Pada Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) (Jakarta, 5 s.d. 7 Mei 2025)	
5.	Rapat Daring Finalisasi Standar Isi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta, 6 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Kegiatan Pengumpulan Data/Informasi Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Di Perguruan Tinggi (Jakarta, 20 Mei 2025)	
7.	Konsultasi Rancangan Awal Pedoman Pembelajaran Pancasila di Perguruan Tinggi sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) (Jakarta, 1 s.d. 3 Juni 2025)	
8.	Penguatan Pengajar-Pengajar Pancasila di Perguruan Tinggi dalam kegiatan seminar serta pembentukan Perhimpunan Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (PDPKN) (Jakarta, 1 s.d. 3 Juni 2025)	
9.	Audiensi Penguatan Instrumen Uji Keterbacaan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Menengah (Jakarta, 10 s.d. 12 Juni 2025)	
10.	Kegiatan Koordinasi Rencana Reviu Materi Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Calon Paskibraka Ke Provinsi Jawa Barat (Bandung, 11 s.d. 12 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Rapat Penyempurnaan CPMK dalam Penyusunan Buku Pancasila untuk Perguruan Tinggi (Jakarta, 16 Juni 2025)	
12.	Kegiatan Penelaahan Draf Standar Materi Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta, 13 s.d. 14 Juni 2025)	
13.	Uji Coba Instrumen Uji Keterbacaan Buku Teks utama (BTU) Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Menengah (Bandung, 19 s.d. 21 Juni 2025)	

C.4. Persentase Rekomendasi Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 36,7% $(40\% + 33,3\%) / 2$ (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian hingga TW II}}{2} \times 100\% = \frac{40\% + 33,3\%}{2} \times 100\% = 36,7\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 28 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	2	36,7%	36,7% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan yaitu rekomendasi Kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan rekomendasi Kajian Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila. Capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{(40\% + 33,3\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{73,3\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 36,7\% \end{aligned}$$

Rincian dari 2 Rekomendasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila

Dalam prosesnya Penyusunan rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila, dilaksanakan dalam lima tahap yaitu:

- 1) Penyusunan sistematika (Penentuan metodologi, lokus kajian identifikasi permasalahan pengumpulan data primer/skunder dan studi literasi, penyusunan daftar pertanyaan Pengolahan data pemetaan *stakeholder*);
- 2) Pengolahan data, koordinasi dan sinkronisasi *stakeholder* (penentuan sampling, narasumber) ;
- 3) Pelaksanaan Kajian (diskusi, penyebaran kuisisioner, observasi lapangan dan wawancara mendalam);
- 4) Akseptasi;
- 5) Perumusan naskah rekomendasi.

Pelaksanaan kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila pada Triwulan II tahun 2025 ini sudah melakukan tahapan penyusunan sistematika pengkajian, yang dilakukan dengan kegiatan rapat direktorat pengkajian implementasi. Selanjutnya direktorat pengkajian implementasi juga telah melakukan Rapat Identifikasi Hambatan Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada Satuan Pendidikan di Bawah Kementerian Agama Jawa Barat. Beberapa kegiatan yang tersebut dilakukan untuk pemetaan dan penyusunan sistematika untuk menentukan lokus dan keterwakilan permasalahan dalam penyusunan kajian implementasi PIP.

Pelaksanaan kajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila bertujuan untuk memahami dan menguraikan permasalahan penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila pada satuan Pendidikan, Menghimpun masukan dari satuan Pendidikan, Merumuskan strategi implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada satuan pendidikan

yang menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah/K/L terkait.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila pada Triwulan II 2025 adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{5 \text{ Tahapan Penyusunan}} \\ &= \frac{2 \text{ Tahapan}}{5 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 40\% \end{aligned}$$

2. Rekomendasi Pengkajian Identifikasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila menyusun Naskah Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila. Penyusunan naskah Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila dilaksanakan dalam beberapa tahap. Dalam prosesnya Penyusunan Pengkajian Identifikasi Pembinaan Ideologi Pancasila, dilaksanakan dalam enam tahap yaitu:

- 1) Penentuan metodologi dari data primer, studi literasi, dan pengolahan data;
- 2) Perumusan konsep, dimensi, dan penjabaran calon indikator yang dapat terukur;
- 3) Penetapan indikator berbasis isu strategis dan indikator IPOLEKSOSHANKAM;
- 4) Mengaktualkan dimensi dengan metode *Quivy* (dilakukan dengan observasi lapangan)
- 5) Penyusunan dan akseptasi naskah identifikasi nilai ideologi Pancasila;
- 6) Perumusan naskah rekomendasi

Proses penyusunan draft perumusan konsep nilai ideologi, dimensi, dan variabel dilakukan dengan membedah

arsip-arsip dokumen, mendapatkan masukan dari sejarawan dan staf khusus ketua dewan pengarah. Pada Triwulan kedua, draft perumusan konsep nilai ideologi, dimensi, dan variabel akan dikomparasikan nilai ideologi Pancasila, tujuan bernegara, dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)-Asta Cita. Tujuan dari naskah rekomendasi kajian Identifikasi Nilai Pembinaan Ideologi Pancasila adalah mendapatkan makna esensial nilai ideologi Pancasila.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja penyusunan rekomendasi Pengkajian Identifikasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan II 2025 adalah sebesar:

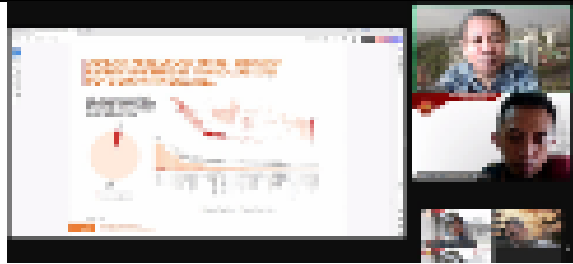
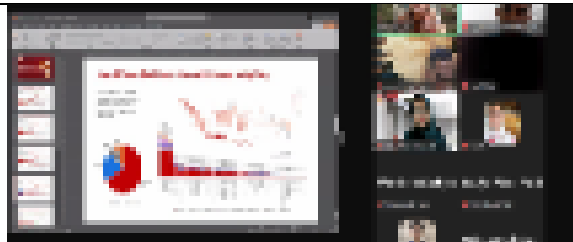
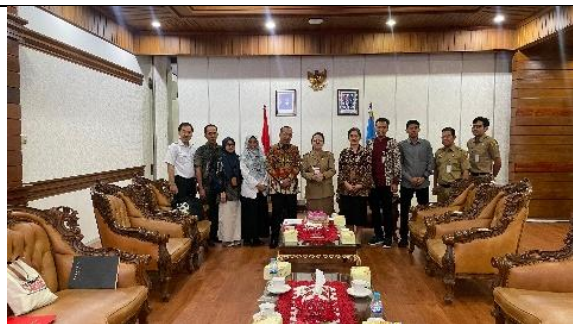
$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{6 \text{ Tahapan Penyusunan}}$$

$$= \frac{2 \text{ Tahapan}}{6 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 33,3\%$$

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 29 Aktivitas Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Akseptasi Data Satuan Pendidikan Di Bawah Kementerian Agama Provinsi Banten (Banten, 16 s.d. 18 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Pembahasan Penetapan Lokus Kajian Implementasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Berdasarkan Hasil Pemetaan Data Dapodik, BPS dan Kemenag RI (Jakarta, 29 April 2025)	
3.	Rapat Pembahasan Sebaran Pengguna Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila pada Satuan Pendidikan di Indonesia (Jakarta, 30 April 2025)	
4.	Perumusan Awal Indikator Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila pada Kebijakan Program dan kegiatan Lima Sasaran Kelompok PIP (Jakarta, 9 Mei 2025)	
5.	Pemetaan Kronologis Historis Lahirnya Pancasila s.d. Pengesahan Hukum Dasar 1945 (Jakarta, 19 Mei 2025)	
6.	Temu Wicara dan <i>Monitoring</i> Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah (Jakarta, 22 s.d. 25 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Pembahasan Prinsip Mufakat Atau Demokrasi Dan Kesejahteraan Sosial Sebagai Proses Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila Berbasis Pidato 1 Juni 1945 (Jakarta, 2 s.d. 5 Juni 2025)	
8.	Pendalaman Aktualisasi Ekonomi Kerakyatan sebagai salah satu aspek Penting dalam Identifikasi NIP berbasis Pidato Pancasila 1 Juni 1945 (Jakarta, 18 Juni 2025)	
9.	Temu Wicara dan Monitoring Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat (Bandung, 19 s.d. 21 Juni 2025)	
10.	Pendalaman Aktualisasi Ekonomi Kerakyatan sebagai salah satu aspek Penting dalam Identifikasi NIP berbasis Pidato Pancasila 1 Juni 1945 (Bandung, 24 Juni 2025)	

D. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Pengembangan kebijakan/regulasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Sistem Nasional Pendidikan dan PIP yang terstruktur, sistemik, dan masif sehingga perlu dirumuskan pengaturan yang komprehensif. Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan PIP merupakan implementasi dari Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan. Perumusan program teknis dilakukan untuk memastikan advokasi kebijakan strategis yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni terwujudnya pembumian Pancasila sebagai dasar negara sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kehidupan bermasyarakat. Program teknis tersebut perlu dielaborasi dalam program jangka panjang Sistem Nasional Diklat PIP dalam rangka mendukung terwujudnya pembumian Pancasila bagi aparatur negara dan seluruh komponen bangsa menuju sumber daya manusia unggul pada saat Indonesia Emas Tahun 2045. Sedangkan program teknis jangka menengah, jangka pendek, serta tahunan dielaborasi secara komprehensif dan *cascading* dimana secara agregat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang tersebut.

Sumber daya manusia Indonesia Emas tahun 2045 diharapkan mempunyai kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain untuk mendukung Indonesia sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban dunia. Pembangunan SDM unggul tersebut perlu dilakukan secara paripurna, tidak hanya membangun kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga membangun iman dan taqwa serta budaya sehingga menjadi insan-insan pembangunan yang religius, menguasai IPTEK, serta berbudaya luhur.

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah:

Tabel 2. 30 Indikator Kinerja Program Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi	100%	43,6%	 43,6%
Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi	100%	62%	 62%
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik	100%	58,5%	 58,5%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

D.1. Persentase Tenaga Pengajar Pancasila yang Tersertifikasi

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 43,6% proses pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$IKK = \frac{n}{x} \times 100\%$$

$$IKK = \frac{120}{275} \times 100\% = 43,6\%$$

Keterangan:

IKK = persentase capaian indikator kinerja kegiatan

n = capaian kinerja jumlah Pengajar Diklat PIP yang Tersertifikasi

x = target kinerja Pengajar Diklat PIP yang Tersertifikasi (275 orang)

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 31 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET CAPAIAN		KET
Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat	Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	275	120	43,6% (orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh yaitu:

a. Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat

Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat dengan rincian *output* Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila dari target 275 orang. Berdasarkan capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2025 dapat dilaporkan sudah tercapai 120 orang atau 43,6%, yaitu:

1. Pelaksanaan pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP Kualifikasi Utama Tahun 2024 sebanyak 128 orang terkonfirmasi 120 orang akan

mengikuti kegiatan tersebut yang awalnya diagendakan pada 2 – 5 Juni 2025 sesuai arahan pimpinan, kegiatan tersebut di undur pada tanggal 8 s.d. 10 Juli 2025 di Jakarta.

2. Pembukaan Pendaftaran sertifikasi pengajar Diklat PIP tahun 2025 pada tanggal 18 Juni 2025 s.d. 4 Juli 2025. Pada saat ini sudah terdata sebanyak 1.273 akun dengan rincian 720 akun maheswara dan 553 akun penceramah. Berdasarkan data tersebut, pendaftar yang telah melengkapi berkas yaitu 639 akun dengan rincian sebanyak 411 akun maheswara dan 228 akun penceramah dapat dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Akan dilaksanakan pelatihan bagi pengajar Diklat PIP tahun 2024 sebanyak 444 orang peserta pada triwulan III tahun 2025 dengan rincian pelaksanaan pelatihan bagi pengajar Diklat PIP kualifikasi Madya sebanyak 238 orang pada tanggal 28 Juli s.d. 1 Agustus 2025 dan pelatihan bagi pengajar Diklat PIP kualifikasi Pratama sebanyak 206 orang pada tanggal 4 s.d. 8 Agustus 2025.
4. Akan dilaksanakan pada TW III asesmen sertifikasi pengajar Diklat PIP tahun 2025 dan penelusuran rekam jejak bagi setiap peserta yang lolos asesmen.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 32 Aktivitas Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Persiapan Kegiatan Pemutakhiran Sertifikasi Pengajar Diklat PIP Bagi Maheswara Kualifikasi Utama, Madya, Dan Pratama 2023 (Peserta Eksternal Dan Internal BPIP) di Ruang Rapat BPIP Lt. 3 (Jakarta, tanggal 11 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Pemutakhiran Materi Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP Angkatan Tahun 2023 (Internal BPIP) (Jakarta, tanggal 21 s.d. 25 April 2025)	
3.	Pemutakhiran Sertifikasi Pengajar Diklat PIP Bagi Maheswara Kualifikasi Utama, Madya, dan Pratama 2023 (Peserta Eksternal BPIP) (Jakarta, tanggal 28, 29 April, dan 2 Mei 2025)	
4.	Rapat Koordinasi Persiapan Sertifikasi Pengajar Diklat PIP Tahun 2025 bersama Tim Asesor (Jakarta, tanggal 26 s.d. 28 Mei 2025)	
5.	Verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran calon Pengajar Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2025 (Jakarta, tanggal 30 Juni s.d. 4 Juli 2025)	

D.2. Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi.

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi pada Tahun 2025 adalah 100%.

Hingga Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 62% dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\left(a = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right) + \left(b = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right)}{2}$$
$$IKK = \frac{a + b}{2}$$
$$IKK = \frac{53\% + 71\%}{2} = 62\%$$

Keterangan :

IKK = persentase capaian indikator kinerja kegiatan

a = Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

b = Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan:

- Terlaksananya Akreditasi Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
- Tersedianya Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 33 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	Jumlah Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang terakreditasi	15	8	53% (Lembaga)
Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	Jumlah NSPK Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	7	5	71% (NSPK)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

1. Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi, yaitu:
 - a. Visitasi lapangan telah dilakukan kepada 8 lembaga calon penyelenggara Diklat PIP selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai akhir sebelum ditetapkan hasil Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP.
 - b. Akreditasi penyelenggara Diklat PIP akan membukan gelombang II tahun 2025 dan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 dengan agenda pertama bimbingan teknis kepada lembaga calon penyelenggara Diklat PIP.
2. Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan, yaitu:

Berdasarkan target kinerja sebanyak 7 NSPK, telah disusun dan menunggu persetujuan pimpinan sebanyak 5 NSPK, yaitu:

 - a. Kurikulum Diklat PIP bagi Kepala Desa;
 - b. Kurikulum Diklat PIP bagi Komunitas;

- c. Kurikulum Diklat PIP bagi PGRI;
- d. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- e. Buku panduan petunjuk pelaksanaan pembelajaran pelatihan bagi calon pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

Pada Triwulan III tahun 2025 akan dilakukan penyusunan sebanyak 4 NSPK Diklat PIP, yaitu: (1) Kurikulum Diklat PIP bagi Hakim, Jaksa, dan Pengacara; (2) Kurikulum Diklat PIP bagi Purnapaskibraka; (3) Kurikulum Diklat PIP bagi Organisasi Perempuan; dan (4) Kurikulum Diklat PIP bagi Anggota Partai Politik dengan melibatkan akademisi, kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, serta sasaran Diklat PIP. Pelibatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan yang membangun dalam menyusun NSPK Diklat PIP. Juknis yang disusun tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam pelaksanaan Diklat PIP. Petunjuk teknis tersebut memuat cara pelaksanaan Diklat PIP sesuai sasarannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pemantauan dan evaluasi Diklat PIP. Untuk mengetahui bagaimana kebermanfaatan dokumen petunjuk teknis yang telah disusun, dalam beberapa kegiatan pelaksanaan Diklat, akan dimonitoring dan evaluasi menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang merupakan lampiran dari Dokumen Petunjuk Teknis Diklat PIP. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam pelaksanaan Diklat PIP berikutnya.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah:

**Tabel 2. 34 Aktivitas Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat
Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi**

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Kerja Tim Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 16 April 2025)	
2.	Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP Periode Pertama Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 21 s.d. 23 Mei 2025)	
3.	Penyusunan Kurikulum Diklat PIP bagi Purnapaskibraka (Surabaya, tanggal 2 s.d. 5 Juni 2025)	
4.	Rapat Verifikasi Dan Penilaian Data Akreditasi Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Periode I Tahun 2025 (Bandung, tanggal 10 s.d. 13 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Penyusunan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Hakim, Jaksa, dan Pengacara (Jakarta, tanggal 18 s.d. 21 Juni 2025)	
6.	Visitasi Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP Periode I Tahun 2025 di PPSPDM Kementerian Perhubungan, Pusdiklat Mahkamah Agung, PPSPDM BKN, BPSPDM Provinsi Sumatera Utara, BPSPDM Provinsi Bangka Belitung, BPSPDM Sumatera Barat, BPSPDM Sumatera Selatan, dan BPSPDM Provinsi DKI Jakarta (Jakarta, tanggal 23 s.d. 30 Juni 2025)	

D.3. Persentase Peserta Diklat Berkepribadian Pancasila Dengan Tingkat Baik

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik pada Tahun 2025 adalah 100%.

Hingga Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 58,5% dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\left(a = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right) + \left(b = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right)}{2}$$
$$IKK = \frac{a + b}{2}$$
$$IKK = \frac{98,8\% + 18,18\%}{2} = 58,5\%$$

Keterangan :

IKK = persentase capaian indikator kinerja kegiatan

a = Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila

b = Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan:

- Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila
- Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 35 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila	6732	6657	98,8% (Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh Tahun 2025 yaitu:

- Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila, yaitu:
Paskibraka menjalankan penugasan sebanyak dua kali, yaitu pada HUT RI 17 Agustus pada tahun berjalan dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni pada tahun berikutnya. Setelah menjalankan penugasan pada Hari Lahir Pancasila, baru bisa disebut sebagai Purnapaskibraka. Purnapaskibraka ini selanjutnya akan mendapatkan pendidikan dan

pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) dan lulus diklat. Purnapaskibraka yang lulus diklat baru bisa diangkat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila (PDP). Diklat PIP untuk Purnapaskibraka dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui system *Learning Management System* (LMS). Tahun 2025 ini, jumlah Purnapaskibraka yang sudah difasilitasi dan dilakukan pembinaan adalah sejumlah 6657 orang.

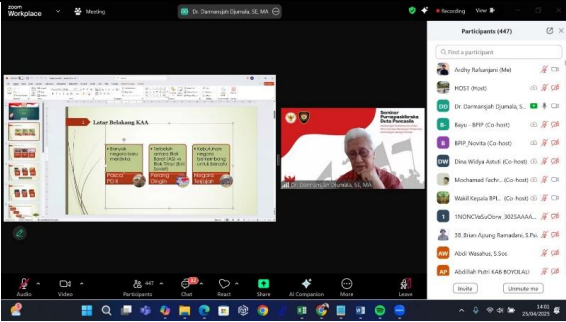
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Purna Paskibraka yang lulus}}{\text{Target Purnapaskibraka Duta Pancasila}} \times 100$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{6657 \text{ orang}}{6732 \text{ orang}} \times 100\% = 98,8\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 36 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Persiapan Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 April 2025)	
2.	Rapat Koordinasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 22 s.d. 25 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Seminar Purnapaskibraka Duta Pancasila, Memperingati Konferensi Asia Afrika, Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 25 April 2025)	
4.	Rapat Koordinasi Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Pusat Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 29 April s.d. 1 Mei 2025)	
5.	Monitoring dan Evaluasi Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2025 (Seluruh Provinsi di Indonesia, tanggal 4 Mei s.d. 5 Juni 2025)	  

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam rangka Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 22 Mei s.d. 5 Juni 2025)	 
7.	Persiapan Verifikasi Tingkat Pusat dan Review Hasil Medical Check Up Seleksi Provinsi Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 11 s.d. 14 Juni 2025)	
8.	Rapat Lanjutan Persiapan Verifikasi Tingkat Pusat Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 18 s.d. 20 Juni 2025)	
9.	Verifikasi Tingkat Pusat Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 24 Juni s.d. 1 Juli 2025)	

Tabel 2. 37 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila	Jumlah Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP	11.568	2.104	18,18% (Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh Tahun 2025 yaitu:

1. Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila, yaitu:

Berdasarkan pengukuran hasil capaian IKK pada Triwulan II Tahun 2025 untuk Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila sebesar 2.104 orang dari target RO 11.568 orang peserta sebesar 18,18%.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP}}{\text{Target Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP}} \times 100$$
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2.104 \text{ orang}}{11.568 \text{ orang}} \times 100\% = 18,18\%$$

Penyebab rendahnya tingkat capaian ini disebabkan oleh :

- 1) Efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan dan penjadwalan ulang waktu pelaksanaan diklat; dan
- 2) Penyusunan mekanisme dan prosedur pelaksanaan Diklat PIP sesuai dengan kurikulum dan standar Diklat PIP sehingga pelaksanaan diklat sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Diklat PIP.
- 3) Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini akan dilaksanakan pada periode triwulan III dan IV tahun 2025.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 38 Aktivitas Kegiatan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Guru Pendidikan Pancasila Jenjang Dasar dan Menengah (Jakarta, tanggal 21 s.d. 22 April 2025)	
2.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Purnapaskibraka Tingkat Pusat tahun 2024 (Jakarta, tanggal 23 s.d. 26 Mei 2025)	

E. Terlaksananya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila adalah:

Tabel 2. 39 Indikator Kinerja Program Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KINERJA
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	64,5%	 64,5%
Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	25%	 25%
Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	50%	 50%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

E.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 64,5% (rata-rata hasil capaian *output*).

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 40 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	1	64,5%	64,5% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

a. Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai dan menyelesaikan Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (100%) dibutuhkan 5 dokumen laporan penyusunan metode pengendalian (33%), 18 dokumen laporan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila internal dan eksternal (33%), dan 2 dokumen laporan penyampaian usulan langkah dan strategi(33%).

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025, laporan Rekomendasi dari kegiatan yang terkumpul adalah sebagai berikut:

1. Laporan Penyusunan Metode Pengendalian Program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)
2. Laporan Penyusunan Desain Metode Pengendalian PIP/ metode tahap II
3. Laporan rekomendasi IAP Provinsi Lampung Tahun 2023
4. Laporan Pengendalian Internal Program Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Lingkungan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

5. Laporan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Tema: “Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa” di Purwokerto
6. Laporan Kegiatan Pengendalian Pendidikan dan Peiatihan Pembinaan ideologi Pancasila bagi Guru Pendidikan Pancasila Jenjang Dasar dan Menengah, Penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Bersama dengan Universitas Suitan Ageng Tirtayasa, dan Kuliah Umum PIP bagi sivitas akademika Universitas Suitan Ageng Tirtayasa di Provinsi Banten.
7. Laporan Pengendalian Internal Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Banten
8. Laporan Pengendalian Internal Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Bali
9. Laporan Pengendalian Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur
10. Laporan Pengendalian Internal Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Tema: Pancasila untuk Dunia (Menjawab Tantangan Global dan Geopolitik Dunia) di Palembang
11. Laporan penyampaian usulan langkah dan strategis Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Perilaku Toleran dan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat
12. Laporan Pengendalian Internal Kegiatan Seminar Aktualisasi Nilai Ketuhanan dalam Kebangsaan tema Menjaga moderasi Beragama di Indonesia di Kabupaten Pekalongan

13. Laporan Pengendalian PIP melalui Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia di Magelang
14. Penyusunan Usulan langkah dan strategis Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Thema: Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perilaku Toleran dan kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat
15. Kegiatan Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi Arah Kebijakan PIP dengan tema “Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dalam Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama” di Provinsi Jakarta

Adapun perhitungan capaian adalah sebagai berikut:

$$\text{Metode pengendalian} = \frac{\text{Laporan Metode Pengendalian hingga TW I}}{(1 \text{ dokumen} \times 5 \text{ Laporan Metode Pengendalian})} \times 33\%$$

$$\text{Metode pengendalian} = \frac{2}{5} \times 33\% = 13,2\%$$

$$\text{Pengendalian int dan ext} = \frac{\text{Laporan Pengendalian In dan Ex hingga TW I}}{(1 \text{ dokumen} \times 18 \text{ Laporan Rekomendasi Kegiatan})} \times 33\%$$

$$\text{Pengendalian int dan ext} = \frac{10}{18} \times 33\% = 18,3\%$$

$$\text{Usulan langkah strategis} = \frac{\text{Laporan kegiatan dan rekomendasi hingga TW I}}{(1 \text{ dokumen} \times 2 \text{ Laporan Rekomendasi Kegiatan})} \times 33\%$$

$$\text{Usulan langkah strategis} = \frac{2}{2} \times 33\% = 33\%$$

$$\text{Total akhir keseluruhan} = 13,2\% + 18,3\% + 33\% = 64,5\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka kegiatan pengendalian pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 41 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengendalian PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi Arah Kebijakan PIP dengan tema “Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dalam Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama” (Jakarta, tanggal 6 s.d. 8 Mei 2025)	
2.	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Banten (Banten, tanggal 19 s.d. 22 Mei 2025)	
3.	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Bali (Bali, tanggal 20 s.d. 23 Mei 2025)	
4.	Penyusunan Desain Metode Pengendalian/ metode tahap II (Jakarta, tanggal 20 s.d. 23 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Pengendalian PIP melalui Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia (Jakarta, tanggal 27 s.d. 30 Juni 2025)	

E.2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 25% telah dilakukannya Penyusunan Draf Pedoman Pengendalian dan Evaluasi (penyusunan metoda) dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{25\%}{1 (\text{rekomendasi})} \times 100\% = 25\%$$

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 42 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	1 25%	25% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

- a. Persentase rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam tahapannya rekomendasi evaluasi pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti butuh melewati 5 tahapan dengan bobot masing-masing tahapan sebesar 25% dan hingga Triwulan II capaian sudah mencapai 25% dimana dalam pelaksanaan telah dilaksanakan:

1. Penyusunan sistematika pedoman pengendalian dan evaluasi;
2. Penyusunan tujuan pedoman pengendalian dan evaluasi dan kerangka pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan PIP;
3. Penyusunan deskripsi dan mekanisme pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan PIP dan PIP Prioritas;
4. Rapat Pembahasan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi(PPE) PIP Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dengan Seluruh Unit Kerja Deputi 5;
5. Rapat Pembahasan PPE PIP dengan BHO dan Renkeu;
6. Rencana pembentukan Pokja evaluasi pelaksanaan PIP;
7. Penyusunan butir pertanyaan Instrumen Evaluasi Implementasi PIP.

Adapun pedoman penilaian (*scoring*) capaian rincian *output* Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti, yaitu:

Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
25%	Tahap 1 : Penyusunan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi (penyusunan metoda): a. Rapat Pembahasan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi(PPE) PIP Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dengan Seluruh Unit Kerja Deputi 5 b. Rapat Pembahasan PPE PIP dengan BHO dan Renkeu	Proses Pelaksanaan

Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
	c. Uji coba PPE PIP d. Evaluasi Uji coba dan Penetapan Peraturan PPE PIP $= \text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{4} \times 25\%$ $= 12,5 \%$	
25%	Tahap 2 : Pemuktahiran Instrumen Evaluasi: a. Koordinasi internal BPIP dalam Rangka Perumusan Indikator Instrumen b. Penyusunan Instrumen Evaluasi c. Uji coba Instrumen Evaluasi d. Evaluasi Uji coba dan Penetapan Instrumen Evaluasi $= \text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{4} \times 25\%$ $= 12,5 \%$	Proses Pelaksanaan
25%	Tahap 3 : Evaluasi Implementasi PIP a. Evaluasi Implementasi PIP di Indonesia Bagian Barat b. Evaluasi Implementasi PIP di Indonesia Bagian Tengah c. Evaluasi Implementasi PIP di Indonesia Bagian Timur	Belum terlaksana
25%	Tahap 4 : Penyusunan Rekomendasi a. Analisis dan Interpretasi Data Hasil Evaluasi b. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi c. Exspose Hasil Evaluasi Implementasi PIP dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi PIP	Belum terlaksana

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 43 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Lanjutan Penyusunan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PIP (Jakarta, tanggal 10 April 2025)	
2.	Rapat Pembahasan Draft Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 11 April 2025)	
3.	Rapat Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi (Jakarta, tanggal 15 April 2025)	
4.	Rapat Penyusunan Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) (Jakarta, tanggal 23 s.d. 25 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Bidang Pendidikan Dan Pelatihan PIP (Jakarta, tanggal 5 Mei 2025)	
6.	Rapat Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) (Jakarta, tanggal 14, 21, dan 26 Mei 2025)	
7.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 23, 27, dan 28 Mei 2025)	
8.	Rapat Koordinasi Penyusunan Instrumen Evaluasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 20 Juni 2025)	

E.3. Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2025 adalah 100%.

Pada Tahun 2025 capaian target tersebut adalah sebesar 50% $((62,5\% + 37,5\%) / 2) \times 100\%$ rata-rata capaian indikator.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(62,5\% + 37,5\%)}{2 (\text{rekomendasi kegiatan})} \times 100\% = 50\%$$

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 44 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang Diselesaikan	1	37,5%	100% (Rekomendasi)
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang Diselesaikan	1	62,5%	100% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Tahun 2025 yaitu:

- Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang Diselesaikan

Dalam tahapannya Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang diselesaikan sudah mencapai 37,5% dimana saat telah melaksanakan 3 dari 8 tahapan dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{8 \text{ tahapan rekomendasi kebijakan}}$$
$$= \frac{3}{8 \text{ tahapan}} = 37,5\%$$

1. Melaksanakan Penyusunan Pedoman dan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila dengan menyelenggarakan
 - Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Pengukuran Pelembagaan Pancasila (3 Maret 2025)
 - Rapat Koordinasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (6 Maret 2025)
 - Rapat Koordinasi Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (19 Maret 2025)
 - Rapat Koordinasi Konsep Pengukuran Pelembagaan Pancasila (13 Februari 2025)
 - Rapat Koordinasi Awal Instrumen Penilaian Mandiri Pengukuran Pelembagaan Pancasila (17 Maret 2025)
 - Koordinasi Awal Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (8-10 Mei 2025)
 - Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (22-24 Mei 2025)
 2. Perencanaan Pembangunan Sistem Informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila/Aplikasi :
 - Koordinasi Awal Penyesuaian Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila dan Kegiatan Mendukung Hari Lahir Pancasila (1-4 Juni 2025)
 3. Koordinasi Perhitungan Pelembagaan Pancasila:
 - Koordinasi Penilaian Mandiri Pengukuran Pelembagaan Pancasila Provinsi Papua Barat Daya (25-27 Juni 2025)
- b. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang Diselesaikan

Dalam pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Hasil pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang diselesaikan sudah mencapai 62,5% dimana saat telah melaksanakan 5 dari 8 tahapan dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{8 \text{ tahapan rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{5}{8 \text{ tahapan rekomendasi kebijakan}} = 62,5\% \end{aligned}$$

1. Melaksanakan Penyusunan Pedoman IAP dan SK Pendelegasian IAP dengan menyelenggarakan :
 - Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila dan Pedoman Pengukuran Pelembagaan Pancasila (14 Februari 2025)
 - Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (24 Februari 2025)
2. Melaksanakan Penghitungan IAP dan penyusunan Laporan IAP dengan menyelenggarakan :
 - Penyusunan Rekomendasi Hasil Indeks Aktualisasi Pancasila Provinsi Lampung Tahun 2023 (23 s.d. 25 Januari 2025)
 - Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Podes (4 Indikator) pada IAP (18 Maret 2025)
 - Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas MSBP (5 Indikator Sila Pertama pada IAP) pada tanggal 17 April 2025
 - Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas MSBP (2 Indikator Sila Kedua dan 4 Indikator Sila Ketiga) pada IAP pada tanggal 24 April 2025
 - Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas MSBP (4 Indikator Sila Ketiga) pada IAP pada tanggal 2 Mei 2025
 - Rapat Penyusunan Metodologi pada Laporan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2025 tanggal (15-17 Mei 2025)
 - Rapat Penyusunan Bab Profil IAP Nasional pada Laporan IAP Tahun 2025 (10 s.d 14 Juni 2025)
3. Melaksanakan Pengembangan Metodologi IAP dengan menyelenggarakan :
 - Rapat Penyusunan Indikator IAP Mandiri (15 -17 Januari 2025)
 - Rapat Penyusunan Indikator Indeks Aktualisasi Pancasila Mandiri sila 3 dan 4 (7 Maret 2025)
 - Rapat Penyusunan Indikator Indeks Aktualisasi Pancasila Mandiri Sila 5 (11 Maret 2025) Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Kor (5 Indikator) pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (14 Maret 2025)

- Rapat Finalisasi Penyusunan Indikator IAP Mandiri Sila 1 s.d. 5 (20 Maret 2025)
- 4. Koordinasi Penghitungan IAP dengan menyelenggarakan :
 - Koordinasi Pemanfaatan Indeks Aktualisasi Pancasila di Provinsi Papua Barat Daya (25 s.d 27 Juni 2025)
- 5. Diseminasi Hasil Capaian IAP dengan menyelenggarakan :
 - Pemanfaatan Indeks Aktualisasi Pancasila di Provinsi Sumatera Barat (7 s.d 20 Juni 2025)

Tabel 2. 45 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas MSBP (5 Indikator Sila Pertama) pada IAP (Jakarta, tanggal 17 April 2025)	
2.	Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas MSBP (2 Indikator Sila Kedua dan 4 Indikator Sila Ketiga) pada IAP (Jakarta, tanggal 24 April 2025)	
3.	Rapat Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas MSBP (4 Indikator Sila Ketiga) pada IAP (Jakarta, tanggal 2 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Koordinasi Awal Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 8 s.d. 10 Mei 2025)	
5.	Rapat Penyusunan Metodologi pada Laporan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Mei 2025)	
6.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 22 s.d. 24 Mei 2025)	
7.	Koordinasi Awal Penyesuaian Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila dan Kegiatan Mendukung Hari Lahir Pancasila (Jakarta, tanggal 1 s.d. 4 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Rapat Penyusunan Bab Profil IAP Nasional pada Laporan IAP Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 10 s.d. 14 Juni 2025)	
9.	Pemanfaatan Indeks Aktualisasi Pancasila di Provinsi Sumatera Barat (Jakarta, tanggal 17 s.d. 20 Juni 2025)	
10.	Koordinasi Pemanfaatan Indeks Aktualisasi Pancasila di Provinsi Papua Barat Daya (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Juni 2025)	
11.	Koordinasi Penilaian Mandiri Pengukuran Pelembagaan Pancasila Provinsi Papua Barat Daya (Sorong, tanggal 25 s.d. 27 Juni 2025)	

F. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima berbasis Elektronik

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya meliputi kegiatan Kesekretariatan yang diarahkan pada Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik adalah:

Tabel 2. 46 Indikator Kinerja Program Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KET
Nilai Reformasi Birokrasi	77,32	77,32	Penilaian atas periode T.A. 2024
Kategori SAKIP	B	-	Capaian Indeks Sistem merit Tahun 2025 belum dilakukan
Nilai Sistem Merit	333	-	Capaian Indeks Sistem merit Tahun 2025 belum dilakukan
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	Opini atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 oleh BPK
Indeks SPBE	4	-	Penilaian atas indeks SPBE 2025 belum dilakukan
Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	-	Survei terhadap <i>Stakeholder</i> 2025 belum dilakukan

Fokus layanan yang dilakukan dalam rangka dukungan manajemen BPIP diberikan kepada pihak internal BPIP dan K/L Pembina sebagai mitra BPIP dalam upaya penguatan kelembagaan BPIP adalah:

1. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja;

2. Layanan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
3. Layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja;
4. Layanan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan;
5. Layanan pengawasan Internal; dan
6. Layanan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik menjadi perhatian: (i) Kementerian PAN dan RB, BKN dengan Nilai Reformasi Birokrasi, Kategori implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks SPBE, Nilai Sistem Merit, dan Indeks Kepuasan Masyarakat; (ii) Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini pada laporan keuangan, dan (iii) Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait perencanaan, keuangan, dan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.

Beberapa perkembangan capaian strategis tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik Triwulan II Tahun 2025, dicapai melalui kegiatan yaitu:

F.1. Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja

Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1	50%	50% (Dokumen)
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	50%	50% (Dokumen)
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Layanan Manajemen Keuangan	1	50%	50% (Dokumen)
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Layanan Penyusunan Laporan Monev	4	50%	50% (Dokumen)
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	50%	50% (Dokumen)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada periode Triwulan II Tahun 2025 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%. Layanan yang telah dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab atas proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPIP secara menyeluruh. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan program dan kegiatan, perumusan sasaran, serta penyelarasan dengan prioritas nasional dan kebijakan pembangunan jangka menengah. Melalui layanan ini, biro memastikan bahwa seluruh rencana kerja terstruktur secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kerangka regulasi perencanaan pembangunan nasional. Berikut adalah dokumen dan Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah diselesaikan Pada Tahun Anggaran 2025 sampai Triwulan II:

1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja K/L T.A. 2026;
2. Rapat Dengar Pendapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2025;
3. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2025;
4. Forum Penyesuaian Renstra BPIP Tahun 2025-2029 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 15 April 2025;
5. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026;

6. Finalisasi Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Penguatan Penyusunan Renstra Tingkat Unit Organisasi.

b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Biro Perencanaan melakukan kegiatan koordinasi dan integrasi antara perencanaan strategis dengan penganggaran berbasis kinerja. Biro merumuskan strategi alokasi sumber daya secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan BPIP. Layanan ini juga memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, dan sinergi antarprogram. Dokumen Perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Biro Perencanaan dan Keuangan sudah melakukan layanan Perencanaan sebaik mungkin misalnya dari Revisi DIPA dan revisi POK dalam rangka optimalisasi anggaran. Berikut adalah dokumen dan layanan perencanaan dan penganggaran yang telah diselesaikan Pada Tahun Anggaran 2025 sampai Triwulan II adalah:

1. Revisi DIPA 5 kali;
2. Revisi POK 7 kali;
3. Rapat Penelaahan Efisiensi Anggaran T.A. 2025 bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas;
4. Rapat Dengar Pendapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025;
5. Rapat Konfirmasi Usul Anggaran Belanja Tambahan (ABT) BPIP Tahun Anggaran 2025;

6. Penandaan Rencana Aksi Unit Kerja BPIP pada Peta Jalan PIP;
7. Pembahasan Kelembagaan DPPI.

c. Layanan Manajemen Keuangan

Sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPIP, Biro Perencanaan dan Keuangan menjalankan fungsi perbendaharaan dan akuntansi, termasuk perencanaan kas, pengelolaan belanja, hingga penyusunan laporan keuangan. Layanan ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Dalam menjalankan Layanan Manajen Keuangan Biro Perencanaan dan keuangan pada tahun 2025 Tahun 2025 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Pelaksanaan Layanan Keuangan;
3. Pelaksanaan audit keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Audited di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

d. Layanan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dalam mendukung fungsi pengendalian dan akuntabilitas kinerja, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan layanan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui layanan ini, biro menyediakan data dan informasi berbasis hasil yang menjadi dasar perbaikan kebijakan, penyusunan laporan kinerja, serta

pengambilan keputusan manajerial secara berkelanjutan. Dalam menjalankan Layanan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan II Tahun 2025 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Tahun 2024;
2. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Triwulan II 2025
3. Pemenuhan Monev Pelaksanaan Anggaran melalui e-monev Bappenas dan smart-dja;
4. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2024;
5. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan;
6. Penyusunan Laporan Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Wilayah Sumatera dalam Rangka Penyusunan Renstra BPIP;

e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan layanan ini untuk menilai sejauh mana program, kegiatan, dan penggunaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana serta mencapai *output* dan *outcome* yang ditetapkan. Biro melakukan pemantauan secara berkala serta evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan guna peningkatan kualitas program BPIP secara keseluruhan. Dalam menjalankan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan II Tahun 2025 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025;
2. Koordinasi dan penyusunan laporan pada SISMONEV KP KSP setiap triwulan;
3. Pelaksanaan Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Wilayah Sumatera dalam Rangka Penyusunan Renstra BPIP;
4. Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi bersama dengan BAPPENAS.
5. Pemutakhiran Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi di Lingkungan BPIP; dan
6. Mengumpulkan dan mengevaluasi aspirasi Masyarakat untuk membangun rencana Strategis BPIP tahun 2025-2029.

Aktivitas dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan, dan kinerja pada Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 48 Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Kerja BPIP Tahun 2025 (Jakarta, 28 s.d. 29 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026 (Jakarta, 5 Mei 2025)	
3.	Rapat Finalisasi Masukan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (Jakarta, tanggal 8 s.d. 9 Mei 2025)	
4.	Rapat Penandaan Rencana Aksi Unit Kerja BPIP pada Peta Jalan PIP (Jakarta, tanggal 22 Mei 2025)	
5.	Pembahasan Kelembagaan DPPI (Jakarta, tanggal 23 Mei 2025)	
6.	Rapat Finalisasi Renstra BPIP Tahun 2025-2029 pada tanggal 16 Juni 2025 (Jakarta, tanggal 16 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Rapat Finalisasi Dokumen Renstra BPIP Tahun 2025-2029 dan Penguatan Penyusunan Renstra Tingkat Unit Organisasi (Eselon I) (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Juni 2025)	
8.	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan II pada Program Dukungan (Jakarta, tanggal 26 s.d. 27 Juni 2025)	

F.2. Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi Pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 49 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	Layanan Hukum	1	50%	50% (Layanan)
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	1	50%	50% (Layanan)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
birokrasi yang ditindaklanjuti	Internal			

Perhitungan kinerja pelaksanaan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada periode Triwulan II Tahun 2025 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%. Uraian capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

1. Persentase rancangan produk hukum dilaksanakan dengan rincian *output* layanan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan hukum meliputi 2 (dua) klasifikasi utama sebagai berikut:
 - a. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP; dan
 - b. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penelaahan hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun masing-masing layanan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum

Rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan BPIP, sedangkan produk hukum BPIP

meliputi Keputusan Dewan Pengarah/Kepala/Sekretaris Utama/Deputi BPIP, selain juga instruksi dan surat edaran.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tahapan kegiatan penyusunan Peraturan BPIP meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan. Dalam perencanaan akan ditetapkan Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala BPIP. Tahap penyusunan dilakukan oleh pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan penyelarasan internal oleh Biro Hukum dan Organisasi. Tahap pembahasan merupakan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelahnya Rancangan Peraturan BPIP akan ditetapkan oleh Kepala BPIP untuk selanjutnya diundangkan melalui pencatatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tahap penyusunan keputusan dan produk hukum lainnya meliputi penyusunan dan pembahasan internal. Dalam tahap penyusunan dan pembahasan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, ahli, dan atau pihak lain yang terkait dengan materi produk hukum. Dalam beberapa penyusunan produk hukum memerlukan kegiatan studi banding dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintahan daerah sehingga produk hukum yang disusun

tepat tujuan dan tepat sasaran serta dapat diimplementasikan.

b. Penelaahan Hukum dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1) Penelaahan hukum merupakan kegiatan untuk melakukan kajian terhadap produk hukum dan berbagai permasalahan hukum, yang terdiri atas analisis hukum, evaluasi produk hukum, mediasi, dan pendampingan hukum serta asistensi penyusunan naskah Kerja Sama berupa nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, kemitraan, dan naskah Kerja Sama lainnya.

Objek kajian penelaahan adalah lembaga (BPIP) maupun individual (Pegawai BPIP), termasuk juga kajian terhadap produk hukum BPIP dalam kerangka pembentukan atau evaluasi produk hukum BPIP. Sedangkan mediasi dan pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum yang memerlukan penanganan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Asistensi penyusunan naskah Kerja Sama dilaksanakan dalam rangka menguatkan materi Kerja Sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, kemitraan, dan naskah Kerja Sama lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

2) Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum di lingkungan BPIP meliputi pendokumentasian, penyebarluasan, dan pemeliharaan dokumen hukum. Dalam kaitan

pengelolaan informasi hukum tersebut telah diundangkan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP, dimana BPIP diproyeksikan JDIH BPIP menjadi sentra informasi dan dokumentasi hukum terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum merupakan kegiatan pengelolaan produk hukum BPIP meliputi pendokumentasian, inventarisasi, dan penyediaan informasi produk hukum. Pendokumentasian produk hukum BPIP dilakukan secara manual dan elektronik dalam JDIH BPIP yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Sedangkan penyediaan informasi hukum dilakukan melalui berbagai sarana, yaitu dapat melalui pencetakan/penjilidan produk-produk hukum BPIP, pamflet, *standing banner*, dan berbagai media lain serta media elektronik, selain juga melakukan sosialisasi dan/atau internalisasi produk hukum yang telah diterbitkan BPIP. Pengembangan pendokumentasian dan penyebaran informasi hukum juga memerlukan pembangunan perpustakaan *offline* dan *online*.

Sebagai salah satu sarana penyediaan informasi hukum berbasis elektronik, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan terhadap JDIH secara berkala sehingga seluruh produk hukum BPIP dan segala dokumen berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila dapat terinformasikan dan diakses oleh masyarakat luas dengan serta-merta.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian Layanan Hukum dilakukan melalui berbagai tahapan yang harus dibangun secara bertahap, berkelanjutan dan

perlu melibatkan koordinasi serta Kerja Sama dengan instansi lain (K/L/Pemda) serta didukung dengan tersedianya infrastruktur (sarana prasarana) yang memadai.

Pada Triwulan II Tahun 2025 BPIP telah menerbitkan 49 Produk Hukum terdiri dari:

- a. SK Kepala BPIP = 27 Dokumen
- b. SK Sekretaris Utama BPIP = 10 Dokumen
- c. SK Deputi 1 = 1 Dokumen
- d. SK Deputi 3 = 1 Dokumen
- e. Perjanjian Kerja Sama = 3 Dokumen
- f. SE Kepala BPIP = 5 Dokumen
- g. SE Sekretaris Utama BPIP = 1 Dokumen

Penyusunan rancangan Peraturan BPIP dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

Tabel 2. 50 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

PRODUK HUKUM BPIP		Tanggal Terbit
Keputusan Kepala BPIP		
1.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	6 Januari 2025
2.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1.1 Tahun 2025 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025	6 Januari 2025
3.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2.1 Tahun	6 Januari 2025



**LAPORAN CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN II
TAHUN 2025**



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

PRODUK HUKUM BPIP		Tanggal Terbit
	2025 tentang Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025	
4.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2025	13 Januari 2025
5.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2025 tentang Panitia Penyelenggara Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2025	3 Februari 2025
6.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2025	3 Februari 2025
7.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 8 Tahun 2025 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023	3 Februari 2025
8.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025	3 Februari 2025
9.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tim Penghapusan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025	3 Februari 2025
10.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	7 Februari 2025

PRODUK HUKUM BPIP		Tanggal Terbit
11.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	7 Februari 2025
12.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	7 Februari 2025
13.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025	7 Februari 2025
14.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Bulan Ramadan 1446 Hijriah	28 Februari 2025
15.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pengembangan Inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025	28 Februari 2025
16.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	10 Maret 2025
17.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 18 Tahun 2025 tentang Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Pusat	17 Maret 2025
18.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tim Sistem Akuntabilitas	26 Maret 2025



**LAPORAN CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN II
TAHUN 2025**



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

PRODUK HUKUM BPIP		Tanggal Terbit
	Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025	
19.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 21 Tahun 2025 tentang Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025	28 April 2025
20.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 22 Tahun 2025 tentang Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025	19 Mei 2025
21.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tim Pengkaji Pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	22 Mei 2025
22.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Pancasila	22 Mei 2025
23.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 25 Tahun 2025 tentang Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025	22 Mei 2025
24.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	27 Mei 2025
25.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tingkat Pusat Tahun 2024	2 Juni 2025
26.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2 Juni 2025

PRODUK HUKUM BPIP		Tanggal Terbit
27.	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	10 Juni 2025
Keputusan Sekretaris Utama BPIP		
28.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025 (KPA)	2 Januari 2025
29.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	2 Januari 2025
30.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	15 Januari 2025
31.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025	15 Januari 2025
32.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	14 Maret 2025



PRODUK HUKUM BPIP		Tanggal Terbit
33.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025	18 Maret 2025
34.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025	21 Mei 2025
35.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tim Pendukung Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025	22 Mei 2025
36.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Kerugian Negara berupa Barang Milik Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	22 Mei 2025
37.	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	23 Juni 2025
Keputusan Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP		
38.	Keputusan Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara	27 Maret 2025

PRODUK HUKUM BPIP		Tanggal Terbit
	Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila Tahun Anggaran 2025	
Keputusan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP		
39.	Keputusan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Identifikasi Kegiatan/Subkegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi	10 Februari 2025
Perjanjian Kerja Sama BPIP		
40.	Perjanjian Kerjasama Antara Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor PKS.04/BPIP/SU/04/2025 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan Bagi Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2025	25 April 2025
41.	Perjanjian Kerja Sama Antara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta dengan Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor PKS.05/BPIP/D.1/05/2025 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Jakarta	2 Juni 2025
42.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Universitas Musamus Nomor PKS.08/BPIP/D.1/06/2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	13 Juni 2025
Surat Edaran Kepala BPIP		



**LAPORAN CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN II
TAHUN 2025**



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

PRODUK HUKUM BPIP		Tanggal Terbit
43.	Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Kantor (Work From Office/WFO), dari Rumah (Work From Home/WFH), Dan/Atau Lokasi Lain (Work From Anywhere/WFA) Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	14 Maret 2025
44.	Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	6 April 2025
45.	Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025	28 April 2025
46.	Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025	21 Mei 2025
47.	Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025	30 Mei 2025
Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP		
48.	Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Badan	2 Januari 2025

PRODUK HUKUM BPIP		Tanggal Terbit
	Pembinaan Ideologi Pancasila Periode Pelaporan Tahun 2024	
Surat Edaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP		
49.	Surat Edaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2025	15 Januari 2025

2. Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang di tindaklanjuti dilaksanakan dengan rincian *output* Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal meliputi 4 (empat) klasifikasi utama sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penataan Organisasi

Penataan organisasi menurut Peraturan Menteri PANRB terbaru, seperti PermenPANRB No. 7 Tahun 2023, diarahkan pada penyederhanaan birokrasi agar instansi pemerintah menjadi lebih lincah, efisien, dan adaptif. Salah satu langkah utamanya adalah penyederhanaan struktur organisasi dengan mengurangi jenjang jabatan struktural dan mengalihkan sebagian besar jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat profesionalisme ASN, serta meningkatkan kinerja berbasis hasil (*output* dan *outcome*).

Selain itu, penataan organisasi juga mencakup penerapan sistem kerja berbasis tim dan proyek (*team-based working*), pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan peran jabatan fungsional. Instansi pemerintah didorong untuk membentuk tim kerja lintas unit yang fleksibel dan berbasis target, sekaligus memanfaatkan sistem digital untuk mendukung fleksibilitas dan transparansi. dengan pendekatan ini, diharapkan struktur organisasi pemerintah lebih dinamis dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Draft Dokumen Tindak Lanjut Kelembagaan dan Dokumen Perencanaan Reformasi Birokrasi
2. Menyusun Draft Laporan Rencana Tindak Lanjut Kelembagaan

b. Pelaksanaan Tata Kelola Internal

1. Tata Kelola Administrasi Biro Hukum dan Organisasi

Kinerja yang dilakukan terkait ketatusahaan adalah urusan tata usaha dan rumah tangga serta penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Hukum dan Organisasi.

Biro Hukum dan Organisasi di dalam Korespondensi yang terdiri Surat Masuk dan Surat Keluar mengalami perubahan terdiri dari Jumlah Kualitas dan Kuantitas. Didalam surat masuk yang

meliputi nota dinas, memorandum, undangan, surat perintah, surat edaran, surat keputusan, intruksi atau surat edaran dari unit kerja lain. Surat Keluar terdiri dari nota dinas, memorandum, sprint, undangan, dan surat keluar biasa.

2. Kepuasan Layanan Biro Hukum

Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Hukum dan Organisasi sebagai salah satu penyedia dukungan manajemen di Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu diselenggarakan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penilaian pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil Survei Kepuasan *Stakeholder* yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan *Stakeholder* dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat *Stakeholder*, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

c. Perencanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur negara agar lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Untuk memperkuat arah dan pelaksanaan reformasi ini, pemerintah telah menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 melalui Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020,

yang kemudian disempurnakan dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan fokus reformasi dengan kondisi aktual, memperjelas hubungan sebab-akibat antara program reformasi dan dampaknya terhadap pembangunan nasional, serta mendorong birokrasi yang lebih adaptif dan berdaya saing.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah mengeluarkan PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Peraturan ini menggantikan PermenPANRB No. 26 Tahun 2020 dan menetapkan kerangka evaluasi yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil. Melalui evaluasi ini, instansi pemerintah diharapkan dapat secara berkala menilai kemajuan reformasi yang telah dilakukan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien. Capaian Triwulan II Tahun 2024 adalah:

1. Draft Laporan Hasil Pelaksanaan RB BPIP Tahun 2024;
 2. Draft *Road Map* Reformasi Birokrasi BPIP Tahun 2025-2029;
 3. Draft Peta Proses Bisnis BPIP;
 4. Draft Laporan Rencana Tindak Lanjut Kelembagaan;
 5. Dokumen Tindak Lanjut Kelembagaan dan Dokumen Perencanaan Reformasi Birokrasi masih dalam bentuk draft;
- d. Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPIP

Evaluasi SAKIP BPIP oleh Kementerian PAN-RB baru sudah dilakukan sejak tahun 2021. Pada Tahun 2025 ini berdasarkan hasil evaluasi yang diakses melalui sistem informasi lembar kerja evaluasi RB pada aplikasi portal.rb, menunjukkan penilaian RB periode Tahun 2024 BPIP dimana BPIP memperoleh Nilai Reformasi 77,32 atau predikat “BB”. Nilai ini menunjukkan kenaikan 10,5 poin dibandingkan pada Tahun 2023 BPIP memperoleh nilai 66,82 dan peningkatan predikat “B” menjadi “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun Selama Triwulan II Tahun 2025 telah disusun Draft SK TIM Reformasi Birokrasi 2025

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi pada Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 51 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Penyelarasan Internal Pedoman Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (Jakarta, tanggal 11 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila BPIP (Jakarta, tanggal 16 April 2025)	
3.	Finalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 24 April 2025)	
4.	Sosialisasi Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 2 Mei 2025)	
5.	Penyelarasan Internal Keputusan Kepala BPIP, Internalisasi Indikator Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Jakarta, tanggal 7 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pembentukan Produk Hukum BPIP (Jakarta, tanggal 14 s.d. 16 Mei 2025)	
7.	Penyusunan Draf Jawaban atas Pertanyaan dari Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta, tanggal 19 Mei 2025)	
8.	Koordinasi Konsultasi terkait Penyusunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 3 Juni 2025)	
9.	Pembentukan Undang-Undang Inisiatif DPR, Penerapan Hukum Acara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Kebijakan Evaluasi Kelembagaan (Jakarta, tanggal 3 s.d. 5 Juni 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Evidence Indeks Reformasi Hukum (IRH) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokrasi di Lingkungan BPPI Tahun 2025 (Bandung, tanggal 10 s.d.13 Juni 2025)	
11.	Verifikasi Awal Bukti Pendukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 23 s.d. 26 Juni 2025)	
12.	Sosialisasi Peraturan BPPI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 30 Juni 2025)	
13.	Konfirmasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Hukum Terkait Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 30 Juni 2025)	

F.3. Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja Pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 52 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan kepada unit kerja atas layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	Layanan Manajemen Aset	1	50%	50% (Layanan)
	Layanan BMN	1	50%	50% (Layanan)
	Layanan Umum	1	50%	50% (Layanan)
	Layanan Perkantoran	1	50	50% (Layanan)
	Layanan Sarana Internal	40	50%	50% (unit)
	Layanan Manajemen SDM	441	50%	50% (Layanan)
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	95	174	183% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan II Tahun 2025 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%. Beberapa capaian tersebut didukung sebagai berikut:

a. Barang Milik Negara dan Layanan BMN

Merupakan layanan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengendalian, serta pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, layanan BMN telah melakukan penyusunan beberapa laporan seperti Laporan Barang Pengguna Unaudited Tahun Anggaran 2024, Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2025, dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2024. Laporan Barang Pengguna Unaudited Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang berisi tentang akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan akuntansi Barang Milik Negara yang meliputi Neraca, Laporan Barang Milik Negara, dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara. Sedangkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian merupakan laporan pemantauan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, dan Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya.

Penyusunan Laporan yang telah dilakukan pada tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan manajemen dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara.

b. Layanan Umum

Pengelolaan Barang Milik Negara yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimulai dari tahap

perencanaan kebutuhan khususnya Kendaraan dan anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Negara yang saat ini berada pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

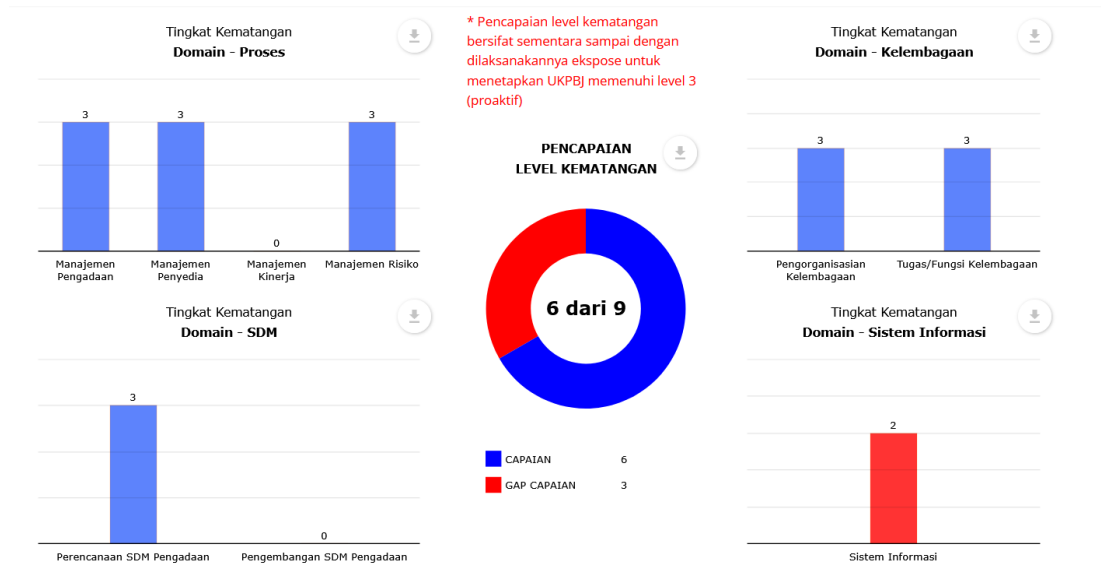
Pada Triwulan II Tahun 2025, Layanan Umum masih berusaha untuk meningkatkan nilai Pencapaian Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dimana pada hasil dari Penilaian ITKP Tahun 2024 masih kurang memuaskan.

Beberapa Rencana dalam peningkatan nilai ITKP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kuota Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ)
2. Peningkatan kompetensi SDM Pengadaan melalui pelatihan pengelolaan e-katalog bagi pelaku PBJ pada bulan Mei 2025
3. Peningkatan Tingkat Kematangan UKPBJ dengan memenuhi standar SPSE *Admin Agency*
4. Peningkatan produk dalam negeri di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Untuk tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPPI yang merupakan tingkat kesiapan dan kemampuan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa. Kematangan UKPBJ diukur menggunakan Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ. Model ini mencakup empat domain dan sembilan variabel. Tujuan dari pengukuran kematangan UKPBJ adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kemampuannya dalam menyesuaikan diri. Pengukuran ini juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah korupsi.

UKPBJ BPPI saat ini telah mencapai tingkat kematangan proaktif pada 6 dari 9 variabel.



Beberapa langkah yang dilaksanakan oleh UKPBJ BPPI untuk meningkatkan level kematangan UKPBJ BPPI sebagai berikut:

1. Mengusulkan pendirian LPSE mandiri ke LKPP agar menjadi Service Provider dari yang sebelumnya Agency pada LPSE Kementerian Hukum dan HAM;
2. Membuat perencanaan dan laporan kinerja UKPBJ sebagai laporan kinerja tahunan;
3. Membuat laporan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan personal UKPBJ, serta memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi pelaku pengadaan.

c. Layanan Perkantoran

Pada Triwulan II Tahun 2025, layanan perkantoran melakukan dukungan perkantoran seperti proses pembayaran gaji dan tunjangan/hak keuangan pejabat dan pegawai BPPI dari Dewan Pengarah hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Layanan perkantoran juga memberikan layanan berupa dekorasi kantor dan proses dukungan pemeliharaan peralatan dan mesin sehingga menunjang tugas dan fungsi pegawai.

Pengelolaan kendaraan dinas seperti pemeliharaan dan pembayaran pajak dilakukan sehingga pejabat atau pegawai yang menggunakan fasilitas tersebut terasa aman pada saat menggunakan dan tidak mengalami hambatan.

d. Layanan Manajemen SDM

Pada Triwulan II Tahun 2025, Layanan manajemen SDM telah melakukan Layanan bagi seluruh Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang rutin dilaksanakan, Dimana telah dilakukan. Selain itu pada Triwulan II tahun 2025 memiliki beberapa pencapaian yaitu:

- a. Pengintegrasian Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi (SINERGI);
- b. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMANTEN);
- c. Pelaksanaan seleksi pejabat fungsional Auditor, Pranata Komputer, Perencana, dan Statistisi melalui mekanisme mutasi;
- d. Koordinasi dengan BPSDM Regional Bandung terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai;
- e. Koordinasi dengan Universitas Pendidikan Indonesia terkait dengan mekanisme mutasi pegawai sebagai dosen;
- f. Koordinasi dengan BKD Provinsi Jawa Barat terkait dengan penerapan manajemen talenta.
- g. Pelantikan PPPK sebanyak 38 orang, Kenaikan pangkat sebanyak 25 orang, Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 1 orang, Pensiun sebanyak 2 orang

e. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

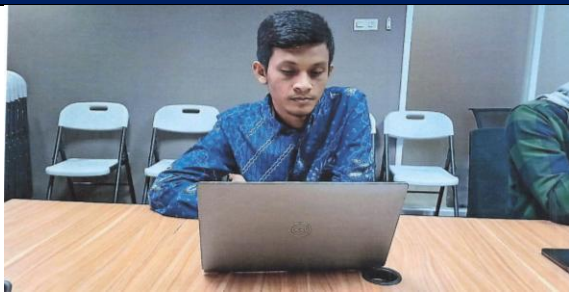
Pada Triwulan II Tahun 2025, Layanan Pendidikan Pelatihan yang telah dilakukan yaitu pelatihan teknis dan pelatihan fungsional kepada 97 orang dengan detail sebagai berikut:

1. Pelatihan Jarak Jauh Pemanfaatan Google Workspace untuk Administrasi Perkantoran dengan jumlah 54 pegawai;
2. Pelatihan Jarak Jauh Desain Grafis dengan jumlah 36 pegawai;
3. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama dengan metode *E-Learning* dengan jumlah 1 pegawai;
4. Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan III Tahun 2025 dengan jumlah 6 orang;
5. Pelatihan Pembinaan Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Kementerian/Lembaga Golongan II dengan jumlah 23 pegawai;
6. Pelatihan Pembinaan Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Pegawai BPIP TA 2025 dengan jumlah 50 pegawai;
7. Pelatihan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan jumlah 2 pegawai;
8. Pelatihan Keprotokolan Batch II PPKASN Kemensetneg dengan jumlah 2 orang.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja pada Triwulan Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 53 Aktivitas Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
2.	Kegiatan Layanan Dukungan Voucher Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
3.	Perekaman data, Pemberkasan Penggajian, dan Pembekalan Teknis CPNS BPIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal. 21 April 2025)	
4.	Penyusunan <i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i> di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 22 April 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Pengembangan/ Pemutakhiran Aplikasi SIATAP (Jakarta, tanggal 23 April 2025)	
6.	Bimbingan Teknis pelaksanaan <i>E-Purchasing</i> pada ekatalog versi 6 (Inaproc) bersama dengan LKPP (Jakarta, tanggal 23 April 2025)	
7.	Pembekalan Materi dan Teknis CASN BPIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 29 s.d. 30 April 2025)	
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara ASN BPIP (Jakarta, tanggal 5 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Seleksi Kompetensi PPPK BPIP Tahun 2024 Tahap II (Jakarta, tanggal 7 Mei 2025)	
10.	Rapat Penilaian Kinerja BPIP di Jakarta (Jakarta, tanggal 9 Mei 2025)	
11.	Rapat Pengembangan/ Pemutakhiran Aplikasi SIATAP (Jakarta, tanggal 20 Mei 2025)	
12.	Penyusunan Rumpun Jabatan dan Pemutakhiran SIMANTEN (Jakarta, tanggal 22 s.d. 24 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Koordinasi Pengadaan Jabatan Fungsional Auditor dan Pranata Komputer serta <i>Mental Health</i> di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 26 Mei 2025)	
14.	Pelantikan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK Tahap I BPIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 3 Juni 2025)	
15.	Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 11 s.d. 13 Juni 2025)	
16.	Pemenuhan Bukti Dukung Kematangan UKPBJ dan Evaluasi Kinerja UKPBJ BPIP 2025 (Jakarta, tanggal 23 Juni 2025)	

F.4. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 54 Indikator Kinerja Kegiatan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Layanan Protokoler	1	50%	50% (Layanan)
Predikat keterbukaan informasi publik BPIP	Layanan Tata Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik	1	50%	50% (Layanan)
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	50%	50% (Layanan)
Kategori Nilai pengawasan kearsipan	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	50%	50% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat, dan administrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada tahun 2025 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%. Adapun layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Layanan Protokoler secara khusus bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada Pimpinan, dengan berfokus pada

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan stake holder sehingga mewujudkan tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan, pengamanan, dan administratif yang diberikan. Beberapa aktifitas kegiatan yang diberikan dalam layanan protokoler meliputi:

1. Pengkoordinasian Layanan Tata Usaha;
2. Pengkoordinasian Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan;
3. Penyusunan Agenda Pimpinan;
4. Fasilitasi dan Pendampingan Acara Pimpinan;
5. Penyusunan Materi Pimpinan;
6. Penyelenggaraan Rapat Unsur Pimpinan;
7. Fasilitasi Penerimaan Tamu Pimpinan;
8. Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila;
9. Pelatihan Layanan Keprotokolan; dan
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Layanan Protokoler.

Layanan Protokoler telah dilaksanakan Triwulan II Tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi di wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Adapun layanan yang dilakukan berfokus pada pendampingan Unsur Pimpinan, Pengurusan tata usaha dan rumah tangga, serta pembuatan materi (berupa *speech notes* dan/atau bahan paparan), rapat pimpinan dan protokol kegiatan Unsur Pimpinan yang sejalan dengan pendampingan unsur pimpinan.

Beberapa kegiatan Triwulan II dalam bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokoleran untuk pemenuhan dari pencapaian tata usaha dan administrasi adalah penyelenggaraan Rapat Pimpinan, Rapat Terbatas dan Rapat Pleno. Adapun rapat-rapat tersebut dilaksanakan pada:

RAPAT	TANGGAL
Rapat Pimpinan	24 Mei 2025
Rapat Terbatas	19 Mei 2025
Rapat Pleno	21 Mei 2025
Rapat Terbatas	10 Juni 2025
Rapat Pleno	11 Juni 2025

b. Layanan Tata Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik

Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah suatu metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana lembaga publik, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, memenuhi prinsip transparansi dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Penilaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa publik memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, dan proses administrasi negara, yang pada akhirnya mendukung akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan publik.

Penilaian IKIP berlandaskan pada berbagai aturan hukum yang mengatur hak akses informasi publik, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut. Selain itu, aturan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi juga diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (KIP) seperti Peraturan KIP No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Secara umum, penilaian IKIP dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana badan publik memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Indikator-indikator tersebut dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan Informasi: Mengukur sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara terbuka, baik melalui website atau media lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP.
2. Aksesibilitas Informasi: Menilai kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi yang disediakan, termasuk kemudahan navigasi pada situs web badan publik, serta cara dan prosedur untuk mendapatkan informasi.
3. Kualitas Informasi: Mengevaluasi kelengkapan, kejelasan, dan ketepatan waktu informasi yang disediakan oleh badan publik, apakah informasi tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Informasi.
4. Pelayanan Permohonan Informasi: Mengukur responsivitas dan efisiensi dalam menangani permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat, serta apakah prosedur yang diikuti transparan dan tidak berbelit-belit.
5. Partisipasi Masyarakat: Mengidentifikasi sejauh mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan atau pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan publikasi informasi.
6. Sanksi dan Pengawasan: Melihat sejauh mana badan publik mematuhi aturan keterbukaan informasi, serta adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang diberlakukan jika badan publik gagal memenuhi kewajibannya.

Penilaian terhadap indikator-indikator tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi atau lembaga independen yang ditunjuk, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang tingkat keterbukaan informasi suatu badan publik. Hal ini juga

bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna memperkuat demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

Adapun beberapa hal yang sudah dilakukan oleh BPIP dalam proses penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik meliputi:

1. Penilaian atas sarana dan prasarana BPIP;
2. Penilaian atas kualitas informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
3. Penilaian atas jenis informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
4. Penilaian atas komitmen BPIP melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Penilaian atas inovasi dan strategi dalam BPIP; dan
6. Penilaian atas digitalisasi di lingkungan BPIP.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025 sampai saat ini masih belum dilakukan.

- c. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan sebagai pengukuran indeks kinerja.

Tujuan dari pengukuran ini mencakup:

1. Perencanaan dan Pengambil Keputusan:
Memastikan data dan informasi arsip yang akurat untuk mendukung perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang efektif .
2. Dukungan Pelayanan Publik:

Menyediakan akses yang cepat dan akurat terhadap informasi arsip yang diperlukan untuk mendukung pelayanan publik.

3. Pelindungan Terhadap Hak Keperdataan Rakyat:

Memastikan keamanan dan integritas dokumen penting seperti buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, ijazah, dan sertifikat.

4. Bahan Pertanggungjawaban:

Menyediakan basis data yang dapat diandalkan untuk pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan organisasi.

5. Pelindungan Aset dan Kekayaan Intelektual:

Menjaga keberlanjutan dan keutuhan informasi yang berharga sebagai aset dan kekayaan intelektual organisasi.

6. Pembelajaran Bagi Generasi Sekarang dan yang Akan Datang:

Menyimpan dan menyajikan informasi yang berharga sebagai sumber pembelajaran bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

7. Identitas dari Memori Kolektif:

Menyajikan dan memelihara arsip sebagai identitas dan memori kolektif masyarakat.

8. Pelindungan Eksistensi Bangsa (Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa):

Menggunakan arsip sebagai alat pemersatu dan penjaga eksistensi bangsa.

9. Sebagai Alat Bukti Hukum:

Menyediakan arsip sebagai bukti hukum yang sah dan dapat diandalkan.

dengan mengukur indeks kinerja Layanan Penyelenggaraan Kearsipan melalui indikator ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem kearsipan berkontribusi secara positif pada tujuan-tujuan strategis yang lebih luas. Pencapaian Layanan

Penyelenggaraan Kearsipan pada tahun 2025 secara pengukuran Nasional masih belum dilakukan, sedangkan capaian tahun 2024 BPIP telah berhasil mendapatkan nilai hasil Pengawasan Kearsipan yaitu 81,32 Kategori A (Memuaskan) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu kategori BB (Sangat Baik).

Pengawasan kearsipan tahun 2025 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan adalah Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan. Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Akumulasi nilai hasil pengawasan kearsipan tersebut diatas akan diterapkan dalam pengawasan kearsipan di BPIP. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada BPIP.

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di pengelolaan arsip dinamis di lingkungan penciptaan lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari:

No	Kegiatan	Ringkasan Capaian	Tindak Lanjut
1	Pengawasan Kearsipan Eksternal	Penyempurnaan kebijakan terkait arsip vital, penyelenggaraan JIKN sesuai ketentuan yang berlaku serta mensosialisasikan	a. Revisi Kep. Kepala BPIP Nomor 40 Tahun 2023 tentang Panduan Penyelenggaraan Kearsipan yang memuat SIKN dan JIKN. b. Pembentukan SK Kepala tentang Tim SIKN dan JIKN Tahun 2025
		Pengelolaan Arsip Vital melalui identifikasi, pemberkasan, pembuatan daftar dan perlindungan arsip vital	1. Keputusan Kepala BPIP Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Daftar Arsip Vital Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2. Data identifikasi arsip vital (BHO sudah, Umum SDM sudah, HAKER belum)
		Pelaksanaan seluruh sasaran tertib arsip Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip	1. Laporan Kegiatan GNSTA tanggal 21 s.d. 22 November 2024. 2. Laporan GNSTA. 3. Bukti Pelaksanaan GNSTA: a. Kebijakan TND, SKKAD, JRA dan Kode Klasifikasi; b. Kebijakan terkait Penyelenggara kearsipan dan Penggunaan SRIKANDI c. Kebijakan terkait Penyelenggara Kearsipan d. Draft Laporan Record Centre e. Kebijakan terkait Panduan Penyelenggaraan kearsipan; f. POK Revisi Terakhir Tahun 2024. - Kendala : a. Tertib prasarana dan sarana kearsipan, karena BPIP belum

No	Kegiatan	Ringkasan Capaian	Tindak Lanjut
			memiliki record center kearsipan sesuai ketentuan; b. Tertib pengelolaan arsip dinamis, karena belum melaksanakan pemusnahan dan penyerahan arsip statis ke ANRI.
		Intensitas penyusutan arsip yang meliputi pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis termasuk penanganan Covid-19 ke ANRI	Belum melaksanakan pemusnahan arsip dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Daftar Hasil Identifikasi Arsip Vital Pada Unit Pengolah Tahun 2024. 1. Pendataan dan Identifikasi Daftar Arsip COVID-19 Penataan dan Pendaftaran; a. Verifikasi/Penilaian arsip; dan b. Penyerahan arsip dan pengamanan arsip.
		Pemberkasan seluruh naskah dinas yang tercipta pada SRIKANDI oleh seluruh unit pengolah	1. Unit Pengolah Daftar Arsip Aktif yang sudah dikumpulkan periode 2024 dari tarikan SRIKANDI (Maximal tanggal 14 Mei 2025); 2. Daftar Arsip Inaktif yang tersimpan di Record Centre
		Melaksanakan seluruh tugas dan fungsi kearsipan sesuai ketentuan	Dokumentasi kegiatan yang diambil dari Laporan tahunan bagian TU dan Arsip tahun 2024
		Perbaikan berkelanjutan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan	
		Penyusunan kebutuhan Pengembangan Kompetensi SDM Kearsipan dan implementasinya	1. Analisis Pemetaan JFA Arsiparis BPIP; 2. Surat Pengajuan Pemetaan JFA Arsiparis BPIP; 3. Surat Rekomendasi dari ANRI

No	Kegiatan	Ringkasan Capaian	Tindak Lanjut
			Dokumen Analisa Kebutuhan Arsiparis dari ANRI; dan 4. Data lengkap arsiparis (Per 8 Mei baru 8 orang Arsiparis yang mengisi Google Form)
2	Pengawasan Kearsipan Internal	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis di seluruh unit kerja	Masih terdapat unit kerja yang menciptakan naskah dinas yang belum sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan BPIP Masih terdapat kendala dalam pemantauan naskah masuk pada akun SRIKANDI pimpinan unit kerja di lingkungan BPIP yang mengakibatkan sejumlah naskah belum dibaca, ditindaklanjuti, maupun dikirimkan sebagaimana mestinya Masih terdapat unit kerja yang belum memenuhi target pemberkasan (90%) pada aplikasi SRIKANDI Unit kerja belum melakukan penutupan berkas di aplikasi sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip yang berlaku
		Tersedianya sumber daya kearsipan	Belum tersedianya sumber daya manusia kearsipan yang merata dan kompeten di seluruh unit kerja

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat dan administrasi pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 55 Aktivitas Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pendampingan Kegiatan Unsur Pimpinan-Dewan Pengarah (Protokol, Tata Usaha, dan Peliputan) (Januari s.d. Juni 2025)	
2.	Ratas Terbatas Unsur Pimpinan BPIP (Januari s.d. Juni 2025)	
3.	Rapat Pleno Unsur Pimpinan BPIP (Januari s.d. Juni 2025)	
4.	Pembekalan untuk 45 Finalis Puteri Indonesia 2025 (Jakarta, tanggal 16 April 2025)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat <i>Entry Meeting</i> , Sosialisasi Dan <i>Workshop</i> Instrumen Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 23 April 2025)	
6.	Rapat Persiapan Kelengkapan Instrumen ASKE Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 25 April 2025)	
7.	Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal di BPIP, Penyusunan Rencana Kerja Bagi Jabatan Fungsional Arsiparis (Jakarta, tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025)	
8.	Kegiatan Verifikasi Penyelenggaraan Kearsipan Internal Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Persiapan Penyampaian Form ASKE (Jakarta, Pada Tanggal 14 s.d 16 Mei 2025 di Jakarta)	
9.	Rapat Koordinasi Hari Lahir Pancasila (Jakarta, tanggal 23 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Rapat Optimalisasi Pengembangan Proses Bisnis SIKN dan JIKN di BPIP (Jakarta, tanggal 20 Juni 2025)	
11.	Audiensi ke ANRI (Jakarta, tanggal 23 Juni 2025)	
12.	Kegiatan persiapan Verifikasi ASKI dan ASKE di Lingkungan BPIP serta Sharing Session bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Batu, tanggal 23 s.d. 26 Juni 2025)	
13.	Rapat Optimalisasi SK Penyelenggaran Kearsipan (Jakarta, tanggal 30 Juni 2025)	

F.5. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP Pada Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 56 Indikator Kinerja Kegiatan pengawasan internal di lingkungan BPIP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Layanan Audit Internal	1	50%	50% (Dokumen)
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP	2,5	50%	50% (Nilai)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen pengawasan internal adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%.

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 Organisasi dan tata Kerja BPIP Bahwa dalam melaksanakan tugas Biro Pengawasan Internal mempunyai Tugas dan fungsi melakukan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama. Sebagaimana Keputusan Sekretaris Utama Nomor 5 tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Biro Pengawasan Internal

Tahun 2025 dimana memiliki Program Kerja, antara lain Audit, Reviu, Evaluasi, Pengawasan Lainnya.

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;
2. Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d 5); dan
3. Prosentase Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator atau alat ukur dalam mencapai sasaran kegiatan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan Sasaran Program. Di samping itu indikator kinerja kegiatan digunakan untuk mengukur efektivitas perencanaan pengawasan Biro Pengawasan Internal. Indikator Kinerja Biro pengawasan Internal 2 (dua) sasaran kegiatan Perjanjian Kinerja dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu:

- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;

Pada Triwulan II Tahun 2025 Capaian indikator kinerja kegiatan pelaksanaan manajemen pengawasan internal pada indikator kinerja kegiatan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dimana merupakan hasil pengawasan dari evaluasi BPK yang telah ditindaklanjuti capaian dengan persentase 50%. (Layanan selama 6 bulan).

- b. Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d 5);

Belum terdapat informasi mengenai capaian kinerja atas IKK ini dalam Triwulan II karena pelaksanaan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi baru dapat dilaksanakan pada Bulan Juli 2025. Adapun skor Evaluasi terakhir yang telah disampaikan oleh BPKP selaku Instansi Pembina dan Pengawasan

dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terhadap BPIP adalah 3,009 (Tahun 2024).

Hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Triwulan II hingga Triwulan IIV telah disampaikan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko BPIP Tahun 2025 sesuai Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 4 Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

1. Pemenuhan Area of Improvement atas Pelaksanaan Evaluasi pada tahun sebelumnya;
2. Penyediaan Jasa Konsultansi Pendampingan atas Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan BPIP kepada seluruh Unit Kerja;
3. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan BPIP;
4. Penyediaan Jasa Konsultansi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi; hingga
5. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi.

Adapun detil mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dilakukan oleh Biro Pengawasan Internal yang telah dilakukan sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perencanaan Pengawasan PKPT Januari s.d Maret	Jumlah	
			Target Januari s.d Desember	Realisasi Januari s.d Juni
1.	Jumlah Laporan Evaluasi, Reviu, Audit, Pemantauan dan	Jumlah Laporan Hasil Audit	3 Laporan	-
		Jumlah Laporan Hasil Reviu	10 Laporan	6 Laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perencanaan Pengawasan PKPT Januari s.d Maret	Jumlah	
			Target Januari s.d Desember	Realisasi Januari s.d Juni
	Pengawasan lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan	8 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Lapooran Hasil Evaluasi	6 Laporan	3 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lainnya	13 Laporan	1 Laporan

Rincian lebih Lanjut target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Biro Pengawasan Internal Triwulan II Tahun 2025 telah menghasilkan beberapa dokumen yaitu:

1. Jumlah realisasi laporan hasil Reviu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Laporan Reviu
1.	Laporan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024
2.	Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024 (<i>Unaudited</i>)
3.	Laporan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
4.	Laporan Reviu Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2025
5.	Laporan Reviu Revisi Anggaran Mei BPIP Tahun 2025
6.	Laporan Reviu atas Laporan Keuangan BPIP TA 2024 (<i>Audited</i>)

2. Adapun jumlah realisasi laporan hasil Evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Evaluasi
1.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3.	Laporan Konsultasi Manajemen Risiko

3. Adapun jumlah realisasi laporan hasil pemantauan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemantauan
1.	Laporan Hasil Monitoring Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan BPIP
2.	Laporan TLHRP BPK

4. Adapun jumlah realisasi laporan hasil pengawasan lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pengawasan Lainnya
1.	Laporan Penyusunan Strategi Tindak Lanjut Hasil SPI 2024 dan Persiapan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 58 Aktivitas Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Optimalisasi Kearsipan dalam mendukung Internal <i>Audit Capability Model</i> (IACM), Penatakelolaan Kinerja Pengawasan serta Penguatan Pengawasan Intern (Jakarta, tanggal 28 s.d. 30 April 2025)	
2.	Reviu pada Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024 (<i>Audited</i>) (Jakarta, tanggal 2 s.d. 9 Mei 2025)	
3.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan Semester II Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 6 s.d. 9 Mei 2025)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Koordinasi Penyusunan Strategi Tindak Lanjut Hasil SPI 2024 dan Persiapan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 20 s.d. 23 Mei 2025)	
5.	Penelaahan atas Telaah Sejawat Ekstern DPN AAPII Semester I Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 21 Mei s.d. 11 Juni 2025)	
6.	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Manajemen Risiko Strategis dan Operasional di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Magelang, tanggal 16 s.d. 20 Juni 2025)	
7.	Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian TLRHP Semester I Tahun 2025 dan TLRHP atas LK BPIP Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 24 s.d. s.d. 26 Juni 2025)	

F.6. Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Triwulan II Tahun 2025 adalah:

Tabel 2. 59 Indikator Keluaran Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	Layanan Data dan Informasi	1	50%	50% (Layanan)
	Indeks SPBE	2,50	50%	50% (Nilai)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen data dan informasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Tahun 2025 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%. Berikut adalah Layanan yang telah diberikan Pusat Data dan Teknologi sampai dengan:

Di Triwulan II Tahun 2025 ini, Pusat Data dan Teknologi Informasi, telah melakukan beberapa pencapaian guna mendukung tercapainya nilai indeks SPBE yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Saat ini sudah dilaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi BPPI. Berikut rincian pencapaian hingga bulan Juni 2025, antara lain:

1. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting dalam pemerintahan karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa layanan TIK sangat penting dalam konteks pemerintahan:

- Peningkatan Efisiensi Administrasi

Penggunaan TIK memungkinkan untuk mengotomatiskan banyak proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual, yang mengurangi beban kerja dan meningkatkan kecepatan pemrosesan data

- Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem informasi yang transparan memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran dikelola, bagaimana kebijakan diambil, dan bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.

- Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat dan Akurat

dengan TIK, data yang terkumpul bisa diproses dan dianalisis dengan cepat, memberikan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan.

- Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah

TIK memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai lembaga pemerintahan. Sistem berbasis digital memungkinkan berbagai instansi untuk berbagi informasi dan beKerja Sama dalam menangani isu-isu nasional dengan lebih Efektif . Misalnya, aplikasi SAKTI untuk penganggaran, Srikandi untuk persuratan, aplikasi Transparansi untuk Paskibraka, dan lain sebagainya.

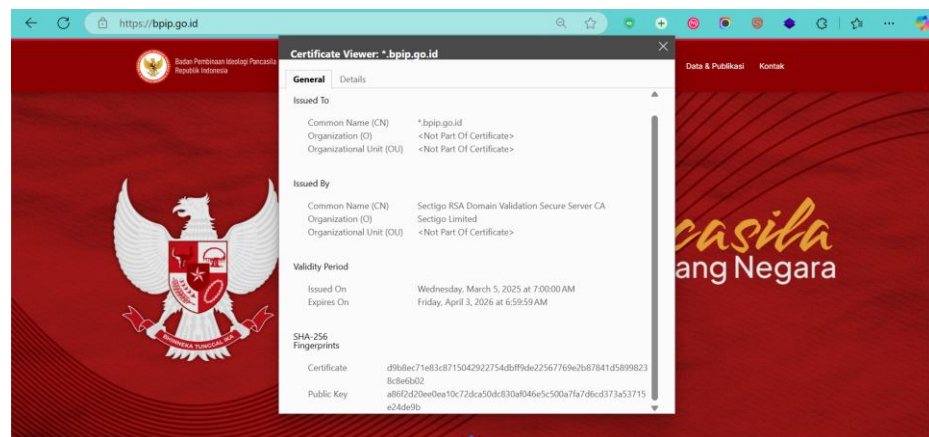
- Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Data

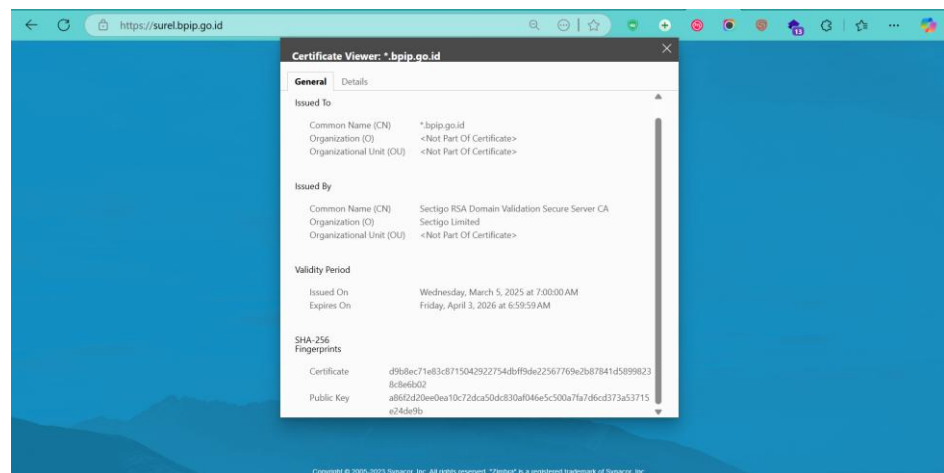
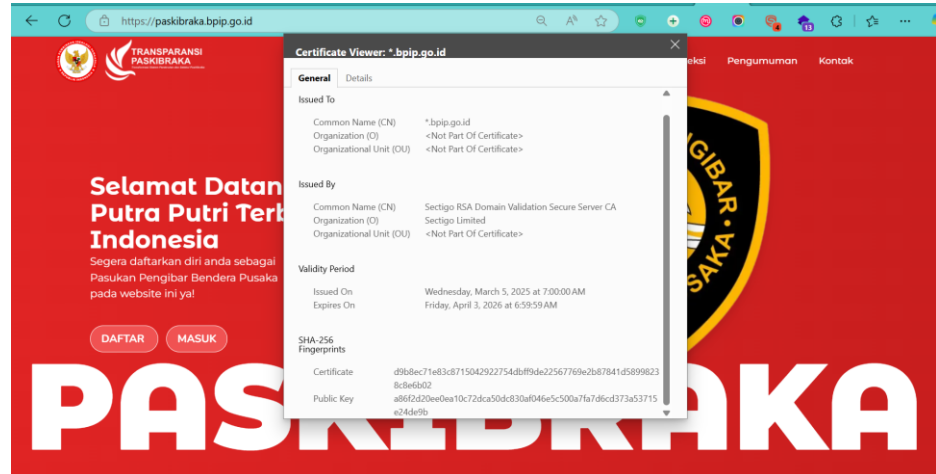
Teknologi memungkinkan pemerintah untuk mengamankan data sensitif. Sistem keamanan yang baik dapat melindungi data dari ancaman peretasan, penyalahgunaan, atau kebocoran informasi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP telah melaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi dalam rangka memenuhi sasaran kinerja layanan TIK. Berikut rincian pencapaian sampai dengan bulan Juni 2025, antara lain:

- a. Pemasangan *Secure Socket Layer (SSL) Website* BPIP Periode 2025-2026

Pusat Data dan Teknologi Informasi telah melakukan pembaharuan periodiasi pada SSL untuk website-website BPIP untuk menjamin keamanan website BPIP:





b. Pemasangan *IT Security Sensor* Kementerian Komunikasi dan Digital pada 75 VM

Permohonan ke Kementerian Komdigi, untuk proses pemasangan di dashboard. Dilakukan melalui portal layanan aduan dan tiket ke <https://pdn.layanan.go.id>. Permohonan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2025. Per Tanggal 8 April 2025 telah di lakukan pemasangan pada 75 VM BPIP yang terdapat di Layanan Pusat Data Nasional milik Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga Pemantauan Keamanan Sistem Server BPIP telah di perkuat.

REQ-KMF-032025-0089179	Permohonan Instalasi EDR pada VM-VM BPIP di PDN 21 Maret 2025	Closed	21 Mar 2025 12:45:31 WIB
------------------------	---	--------	--------------------------

c. Pemasangan *IT Security Sensor* pada *Server-Server* BPIP di PDN

Sensor yang digunakan menggunakan Garuda *Cybereason* dan dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital. Digunakan untuk memantau keamanan pada sisi server dan aplikasi guna menghindari eksploitasi yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Actions Showing 1-75 results Updated a few seconds ago Columns

☐	Machine name	FQDN	Data collection	Site	Sensor version	Last update st...	Last seen	First seen	OS	Internal IP addr...	Fileless Protect...	Last signatures...	Signa
☐	csirpancasila	csirpancasila	Enabled	Primary	23.2.222.0	Succeeded		March 24, 2025 ...	Linux	10.118.0.13	Disabled	April 13, 2025 at...	Preve
☐	localhost.localdomain	localhost	Enabled	Primary	23.2.222.0	Succeeded		March 24, 2025 ...	Linux	10.118.0.53	Disabled	April 13, 2025 at...	Preve
☐	localhost.localdomain	localhost	Enabled	Primary	23.2.222.0	Succeeded		March 24, 2025 ...	Linux	10.118.0.37	Disabled	April 13, 2025 at...	Preve
☐	mail.bpip.go.id	mail.bpip.go.id	Enabled	Primary	23.2.222.0	Succeeded		March 24, 2025 ...	Linux	10.118.0.10	Disabled	April 14, 2025 at...	Preve
☐	surel.bpip.go.id	surel.bpip.go.id	Enabled	Primary	23.2.222.0	Already up to d...		August 27, 2024...	Linux	202.10.51.23	Disabled	April 14, 2025 at...	Preve
☐	vadivokasi	vadivokasi	Enabled	Primary	23.2.222.0	Succeeded		March 24, 2025 ...	Linux	10.118.0.48	Disabled	April 13, 2025 at...	Preve

d. Proses *Backup* Aplikasi dan Server BPIP

Proses *Backup* pada Aplikasi dan Server BPIP di Pusat Data Nasional telah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital diantaranya:

➤ *Backup Server Priority Tahap 2*

REQ-KMF-072024-07510	Nama VM	Keterangan
Tahap 2 Jumlah 15 VM Berhasil Terbackup : 15 VM	VM07SPG-DBPROD	Terbackup
	VM08SPG-SSOPROD	Terbackup
	VM09SPG-APIPROD	Terbackup
	VM23SDMAPP-BPIP	Terbackup
	VM29HELPEDESK-BPIP	Terbackup
	VM37ESIGN-BPIP	Terbackup
	VM39SIMPATI-BPIP	Terbackup
	VM44SELTER-BPIP	Terbackup
	VM54SARPRAS-BPIP	Terbackup
	VM55FILESERVER-BPIP	Terbackup
	VM58DatabaseE-SKP	Terbackup
	VM60StuntingBPIP	Terbackup
	VM63KEHADIRAN	Terbackup
	VM72Evaluasi	Terbackup
	VM73Simata	Terbackup

➤ **Backup Server Priority Tahap 3**

REQ-KMF-072024-07727	Nama VM	Keterangan
Tahap 3 Jumlah 26 VM Berhasil Terbackup : 26 VM	VM01SDI-PRODWEB	Terbackup
	VM02SDI-PRODAPP	Terbackup
	VM03SDI-PRODDDB	Terbackup
	VM11DPPI-BPIP	Terbackup
	VM13CSIRT-BPIP	Terbackup
	VM16PPID-BPIP	Terbackup
	VM18JURNAL-BPIP	Terbackup
	VM20BMN-BPIP	Terbackup
	VM21IKON-BPIP	Terbackup
	VM24LMS-BPIP	Terbackup
	VM28MANRISK	Terbackup
	VM32DIKLAT-BPIP	Terbackup
	VM34RAKER-BPIP	Terbackup
	VM41EAUDIT-BPIP	Terbackup
	VM42SPBE-BPIP	Terbackup
	VM46SNIPPER-BPIP	Terbackup
	VM47HARLAH-BPIP	Terbackup
	VM58DatabaseE-SKP	Terbackup

➤ **Backup Server Priority Tahap 4**

**Report Backup
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**

REQ-KMF-082024-07943		
No	VM Name	Note
1.	VM51ERB-BPIP-AVYV	Terbackup
2.	VM45SIMPUL-BPIP-4pIF	Terbackup
3.	VM17SIPENDEKAR-gR4b	Terbackup
4.	VM49SERDADU-BPIP-4EII	Terbackup
5.	VM30GLPI-BPIP-CIB9	Terbackup
6.	VM40SIPERJADIN-BPIP-xGhn	Terbackup
7.	VM36WAZUH-BPIP-CSIRT-nn4v	Terbackup
8.	VM67RegisDiklat-Prod-hWez	Terbackup
9.	VM04SPG-DBDEV-HIIIm	Terbackup
10.	VM05SPG-SSODEV-e4FR	Terbackup
11.	VM53EsignDev-BPIP-2gcV	Terbackup
12.	VM56E-SKPDEV-BPIP-sPIG	Terbackup
13.	VM62JDIH-DEV-U42w	Terbackup
14.	VM35SIFASPIM-K1mJ	Terbackup
15.	VM48ADVOKASI-BPIP-wmBH	Terbackup
16.	VM33GLPI-DEV-xLAg	Terbackup
17.	VM52PORTALDEV-BPIP-BhA1	Terbackup
18.	VM27SILARAS-cXjK	Terbackup
19.	VM10MAIL-BPIP-FLqV	Terbackup
20.	VM64SDIDEV-BPIP-YrNO	Terbackup
21.	VM50SIPERJADIN-DEV-M3x8	Terbackup
22.	VM06SPG-APIDEV-iS0j	Terbackup
23.	VM19APII-KINERJA-i5QW	Terbackup
24.	VM26CLEAR-HOUSE-IiU0	Terbackup

➤ **Backup Server Priority Tahap 5**

Report Backup

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

REQ-KMF-012025-0088556	Nama VM	Keterangan
Tahap 5 Jumlah 8 VM Berhasil Terbackup : 8 VM	VM75KERJASAMA	Terbackup
	VM77DB-LMSDIKLAT	Terbackup
	VM78PRTG-BPIP	Terbackup
	VM79SINERGI-BPIP	Terbackup
	VM80Paskib2023	Terbackup
	VM81Paskib2024	Terbackup
	VM82Paskib2025	Terbackup
	VM83PaskibDashboard	Terbackup

➤ **Backup Server Priority Tahap 6**

Report Backup Tahap 6

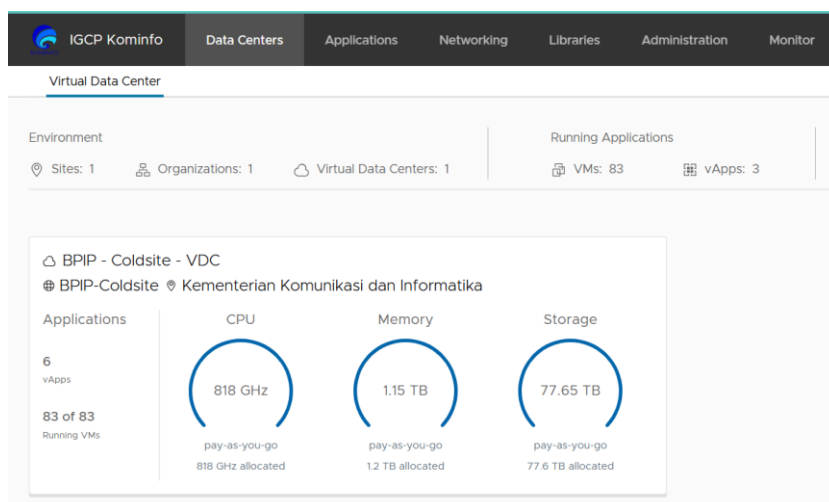
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

REQ-KMF-022025-0088833		
No	VM Name	Note
1.	VM84PusdatinDev	Terbackup
2.	ReverseProxy	Terbackup

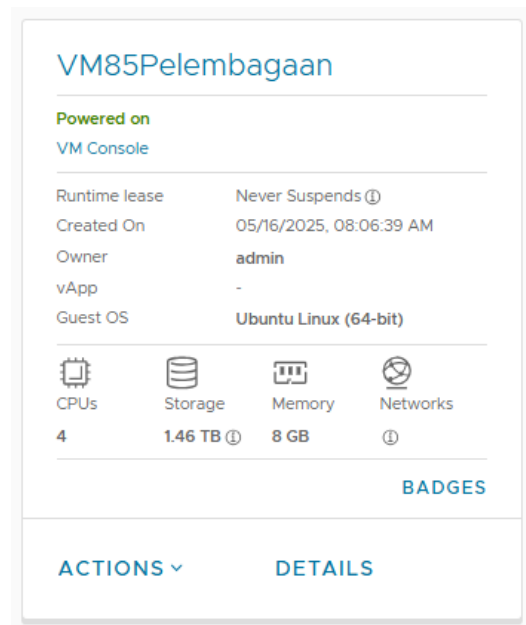
e. Kunjungan website utama BPIP

Penambahan Kapasitas BPIP di PDNS dan instalasi server terbaru BPIP di PDNS untuk keperluan pembuatan Server Baru.

Berikut adalah hasil spesifikasi terbaru pada kapasitas BPIP di PDNS setelah disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital:



Server terbaru yang dilakukan instalasi :



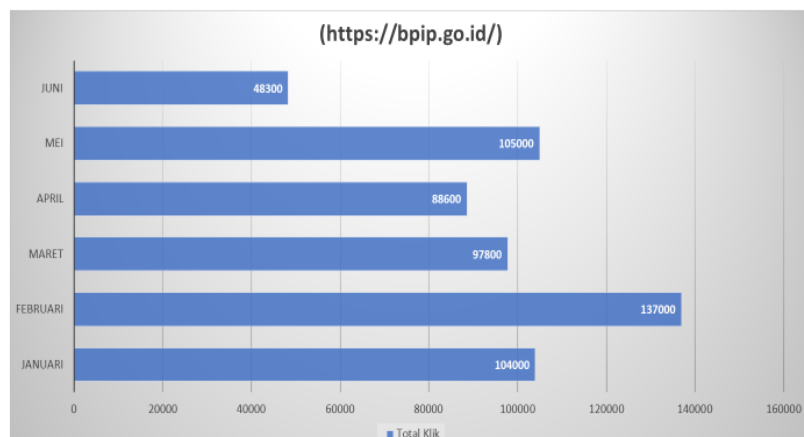
f. Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara

Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dilakukan melalui NDA (Non Disclosure Agreement) dan BAST (Berita Acara Serah terima) terkait Keamanan Siber pada Aset BPIP.

g. Kunjungan website utama BPIP

Selama Triwulan II Tahun 2025 website utama BPIP <https://bPIP.go.id> telah dikunjungi sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Statistik Pengunjung Website BPIP 2025



2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Instansi perlu meningkatkan indeks SPBE karena indeks SPBE merupakan indikator yang penting untuk menilai efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. SPBE membawa sejumlah manfaat signifikan bagi transformasi digital pemerintahan. Salah satunya adalah SPBE dapat meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengotomatisasi proses-proses pemerintahan. Hal ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga membuka jalan untuk proses pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, SPBE memungkinkan publik untuk mengakses informasi pemerintahan dengan lebih mudah dan cepat, menciptakan tingkat transparansi yang tinggi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi, telah melakukan beberapa pencapaian guna mendukung tercapainya nilai indeks SPBE yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada Triwulan II ini masih dalam tahap perencanaan kajian.

Tabel 2. 60 Aktivitas Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengajuan Evaluasi Anggaran SPBE Tahun 2025 di Jakarta 23-25 April 2025 (Jakarta, tanggal 23 s.d. 25 April 2025)	
2.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran dan Peningkatan Keamanan Data Pada Aset Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 11 s.d. 14 Juni 2025)	
3.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data dan Aplikasi di Lingkungan BPIP Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 24 s.d. 26 Juni 2025)	

BAB III REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

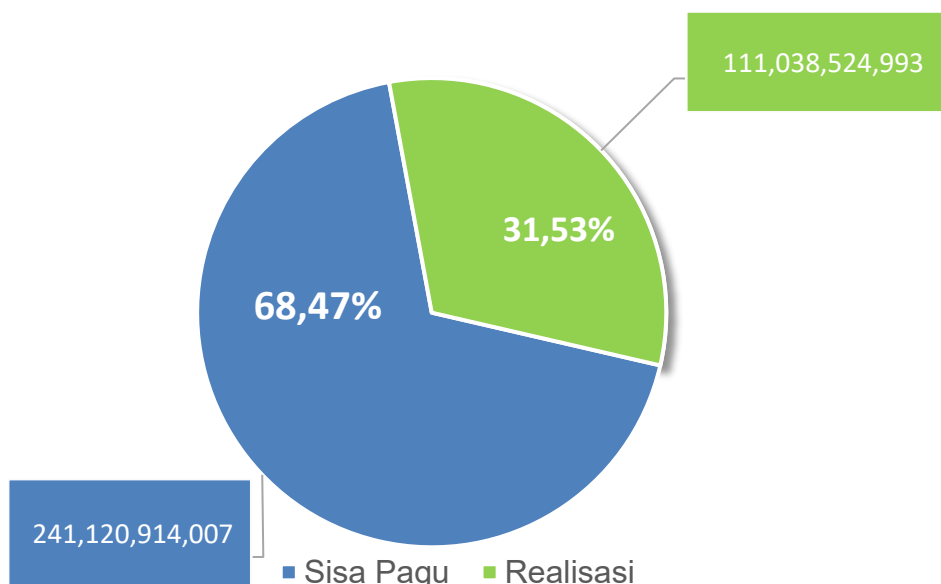
Tahun Anggaran 2025 BPIP mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp352.159.439.000,00 (Tiga ratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

- Program PIP, sebesar Rp 165.156.033.000;
- Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp187.003.406.000,00.

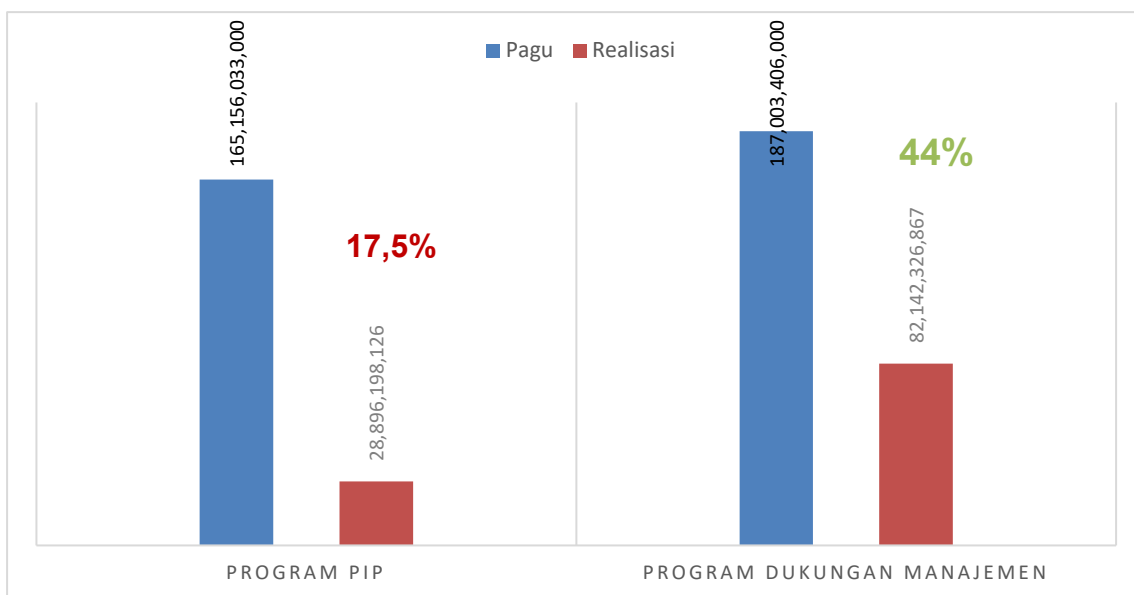
Realisasi Anggaran hingga 30 Juni 2025 (sumber: aplikasi SAKTI) adalah:

Realisasi Anggaran Total: **Rp111.038.524.993,00** (Seratus sebelas miliar tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar 31,53% dari pagu.

Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total



Realisasi anggaran per program:



Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program

Adapun realisasi anggaran berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		187,003,406,000	82,142,326,867	43.93%	104,861,079,133
1	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	17,727,948,000	9,991,292,796	56.36%	7,736,655,204
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	141,806,377,000	68,581,806,500	48.36%	73,224,570,500
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	5,998,347,000	1,679,082,789	27.99%	4,319,264,211
4	Biro Hukum dan Organisasi	16,002,588,000	725,475,880	4.53%	15,277,112,120
5	Biro Pengawasan Internal	3,386,927,000	415,266,443	12.26%	2,971,660,557
6	Pusat Data dan Informasi	2,081,219,000	749,402,459	36.01%	1,331,816,541
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		64,489,783,000	12,489,547,770	19.37%	52,000,235,230
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama	3,030,522,000	770,383,470	25.42%	2,260,138,530

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
2	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi	14,761,145,000	6,279,984,162	42.54%	8,481,160,838
3	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan	46,698,116,000	5,439,180,138	11.65%	41,258,935,862
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		10,807,342,000	570,878,079	5.28%	10,236,463,921
1	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	5,561,262,000	127,336,716	2.29%	5,433,925,284
2	Direktorat Advokasi	2,612,366,000	128,248,696	4.91%	2,484,117,304
3	Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	2,633,714,000	315,292,667	11.97%	2,318,421,333
Deputi Bidang Pengkajian Materi		12,142,397,000	1,620,878,754	13.35%	10,521,518,246
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,808,319,000	677,004,219	14.08%	4,131,314,781
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,802,161,000	523,153,668	13.76%	3,279,007,332
3	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,531,917,000	420,720,867	11.91%	3,111,196,133
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		66,356,965,000	12,724,082,777	19.18%	53,632,882,223
1	Direktorat Perencanaan, Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	9,234,336,000	675,473,506	7.31%	8,558,862,494
2	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	45,056,595,000	11,664,032,232	25.89%	33,392,562,768
3	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	12,066,034,000	384,577,039	3.19%	11,681,456,961
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		11,359,546,000	1,490,810,746	13.12%	9,868,735,254
1	Direktorat Pengendalian	2,443,939,000	445,868,783	18.24%	1,998,070,217
2	Direktorat Evaluasi	2,759,863,000	219,692,221	7.96%	2,540,170,779
3	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	6,155,744,000	825,249,742	13.41%	5,330,494,258
TOTAL		352,159,439,000	111,038,524,993	31.53%	241,120,914,007

BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN

Bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi unit kerja dalam rangka mencapai Sasaran Program dan kegiatan. Terhadap kendala tersebut dilakukan upaya tindak lanjut. Usulan rekomendasi merupakan upaya perbaikan guna peningkatan kinerja di waktu mendatang. Kendala dan tindak lanjut atau rekomendasi atau usulan perbaikan dikelompokkan per Sasaran Program, yaitu:

1. Kendala dan Rekomendasi Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 1 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, serta Pembudayaan PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Efektif	1. Masih Kekurangan SDM 2. Tidak ada penanggung Jawab yang jelas untuk Kerjasama yang telah ditandatangani 3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi atas kerja sama yang telah ditandatangani 4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi antar Lembaga 5. Belum terdapat alat dan panduan dalam penyusunan rekomendasi Hubungan Kerjasama Dengan Lembaga tinggi negara, K/L, Pemda dan Orsospol, serta komponen masyarakat lainnya yang	1. Memaksimalkan SDM yang tersedia 2. Membuka jaringan komunikasi dengan mitra kerja sama BPIP 3. Melakukan sinkronisasi berupa penyusunan rencana aksi nyata kerja sama dengan mitra kerja BPIP 4. Menggunakan semua media/sarana komunikasi dalam melakukan komunikasi dengan lembaga Melakukan kegiatan secara daring 5. Menyusun NSPK terkait petunjuk teknis mekanise penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Dengan Lembaga tinggi negara, K/L, Pemda dan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	ditindaklanjuti. 6. Belum ada penyamaan persepsi di antara unit kerja dalam bentuk alat dan panduan yang akan digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama guna sebagai penyusunan rekomendasi	Orsospol, serta komponen masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti. 6. Penyusunan perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh Unit kerja teknis pelaksana
Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif	1. Masih Belum optimalnya penentuan skala/teritori target peserta berdasarkan data wilayah prioritas, karakteristik masyarakat, dan isu aktual. 2. Sosialisasi dan Komunikasi Pancasila secara luring belum terjangkau hingga ke wilayah terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). 3. Materi dan metode sosialisasi yang digunakan di beberapa wilayah belum menyesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat 4. Belum adanya instrumen khusus untuk mengetahui jangkauan pemberitaan, jangkauan program radio, dan rating program PIP di televisi 5. Kurangnya pelibatan kreator konten profesional dalam produksi materi sosialisasi dan komunikasi PIP 6. Masing kurangnya inovasi format siaran yang menarik dan interaktif di media seperti radio dan televisi, sehingga	1. Peningkatan koordinasi lintas unit kerja dan pemanfaatan pengukuran indeks, data spasial (wilayah) dan sosial demografis untuk pemetaan target peserta secara lebih tepat. 2. Optimalisasi kerja sama dengan Pemerintah Pusat / Daerah, tokoh agama, tokoh adat, instansi pendidikan lainnya maupun organisasi masyarakat 3. Penyusunan materi PIP yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan daerah sasaran kegiatan 4. Pengembangan instrumen pemantauan berupa analisis efektivitas konten dan paparan kegiatan/materi Rating Share, NPS/Net Promotor Score, Media Monitoring, Sentimen Analisis untuk mengukur jangkauan konten di berbagai platform dan peningkatan kerja sama dengan lembaga penyiaran dan lembaga riset media (seperti Nielsen atau KPI). 5. Kolaborasi dengan komunitas kreatif, pegiat literasi digital, dan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	potensi engagement belum maksimal. 7. Belum tersusunnya pedoman baku terkait mekanisme penyusunan, penyampaian, dan tindak lanjut rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi	influencer yang sejalan dengan nilai Pancasila yang berbasis multimedia (video animasi, infografis, podcast, dll) 6. Pengembangan format program kreatif dan interaktif di radio dan televisi, seperti kuis, talkshow, dan segmen partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung 7. Menyusun pedoman teknis penyusunan dan penyampaian rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi yang melibatkan pakar, stakeholder, mitra BPIP untuk membuat perhitungan dan rate indikator rekomendasi
Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	1. Cukup lamanya waktu dalam penyesuaian anggaran ketika efisiensi anggaran sehingga kegiatan belum berjalan optimal	1. Menggunakan semua media/sarana komunikasi dalam melakukan komunikasi dengan lembaga 2. Melakukan kegiatan secara daring
Persentase Rekomendasi Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Ditindaklanjuti.	1. Terbatasnya anggaran akibat efesiensi sehingga berdampak pada pembuatan alat dan panduan 2. Belum ada penyamaan persepsi di antara unit kerja dalam bentuk alat dan panduan yang akan digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama guna sebagai penyusunan rekomendasi	1. Menyusun NSPK terkait petunjuk teknis mekanisme penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama dengan Lembaga tinggi negara, K/L, Pemda dan Orsospol, serta komponen masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti. 2. Penyusunan perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh Unit kerja teknis pelaksana
Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi	1. Belum adanya instrumen khusus untuk mengetahui jangkauan	1. Pengembangan instrumen pemantauan berupa analisis

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Pancasila yang Efektif	pemberitaan, jangkauan program radio, dan rating program PIP di televisi anggaran akibat efesiensi sehingga berdampak pada pembuatan alat dan panduan 2. Terbatasnya jumlah personil pendukung 3. Kurangnya pelibatan kreator konten profesional dalam produksi materi sosialisasi dan komunikasi PIP	efektivitas konten dan paparan kegiatan/materi Rating Share, NPS/Net Promotor Score, Media Monitoring, Sentimen Analisis untuk mengukur jangkauan konten di berbagai platform dan peningkatan kerja sama dengan lembaga penyiaran dan lembaga riset media (seperti Nielsen atau KPI). 2. Diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia yang membantu pelaksanaan administrasi dan kegiatan teknis. 3. Kolaborasi dengan komunitas kreatif, pegiat literasi digital, dan influencer yang sejalan dengan nilai Pancasila yang berbasis multimedia (video animasi, infografis, podcast, dll).
Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti	Belum tersusunnya pedoman baku terkait mekanisme penyusunan, penyampaian, dan tindak lanjut rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi	Menyusun pedoman teknis penyusunan dan penyampaian rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi yang melibatkan pakar, <i>stakeholder</i> , mitra BPIP untuk membuat perhitungan dan rate indikator rekomendasi
Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti	Dibutuhkan pedoman pelaksanaan pembudayaan Pancasila yang segmented sesuai target sasaran	Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan pembudayaan Pancasila yang lebih segmented sesuai target sasaran
Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila	1. Belum ada konektivitas antar komunitas sehingga dapat dipantau secara optimal melalui media sosial atau internet; dan	1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait guna memfasilitasi jejaring komunitas melalui platform digital terpadu untuk

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	administrasi keuangan 2. Tidak ada monitoring berkelanjutan untuk pembinaan ideologi Pancasila pada komunitas.	memetakan dan memantau aktivitas komunitas secara <i>realtime</i> ; dan 2. Membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk mendukung pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan.

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- Penyusunan Pedoman Optimalisasi dan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama PIP.
- Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung implementasi Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2025-2029
- Pelaksanaan Optimalisasi Kerjasama PIP kepada mitra eksternal dan internal BPIP
- Dilakukan peninjauan/evaluasi terhadap nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani yang sudah lewat masa berlakunya agar seluruh kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan optimal.
- Penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan prioritas kerja Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
- Melakukan percepatan finalisasi dan penerapan pedoman sosialisasi dan komunikasi agar kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan seragam.
- Optimalisasi penentuan wilayah dan target sosialisasi dan komunikasi sesuai dengan Rencana Strategis BPIP dan Indeks Aktualisasi Pancasila.
- Peningkatan kapabilitas pegawai Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi melalui program pelatihan dan bimbingan teknis untuk

mendukung pencapaian *output* kerja dan *outcome* kinerja secara optimal.

- i) Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat melalui peningkatan sinergitas dan gotong royong antar unit kerja di lingkungan BPIP serta penguatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
- j) Penyusunan instrument evaluasi program dan kegiatan yang terintegrasi dan komprehensif.
- k) Penyusunan dan pengajuan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan program secara efektif dan efisien untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- l) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila melalui relawan gerakan kebajikan Pancasila bersama seluruh unit kerja di BPIP

2. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 2 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya penguatan kelembagaan BPIP dalam bentuk Undang-Undang; 2. Belum adanya SOP dan Pedoman kriteria dalam melakukan analisis dan penyelarasan terhadap rancangan produk hukum nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam implementasi pada program dan kegiatan masing-masing bidang di direktorat.	1. Perlu penguatan kelembagaan BPIP dengan mengupayakan agar RUU BPIP dibahas pada tahun 2025; 2. Perlu pembuatan SOP dan pedoman kriteria kinerja penyelarasan rancangan peraturan perundang-undangan. 3. Perlu adanya kesepakatan konseptual antar stakeholder penyelenggara penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	3. Belum terstrukturnya penyelenggaraan Penyelarasan baik ditingkat pusat maupun di daerah	
Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan	1. Belum semua instansi memahami urgensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan mereka. 2. Keterbatasan pemahaman teknis dalam mengimplementasikan rekomendasi. 3. Minimnya regulasi operasional yang menjadi rujukan pelaksanaan advokasi	1. Menyusun pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Badan. 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi ke instansi/lembaga. 3. Menyusun materi advokasi yang lebih aplikatif dan kontekstual.
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	1. Rekomendasi hasil kajian kebijakan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila tidak serta merta langsung ditindaklanjuti oleh K/L, Pemprov, Pemkot/Pemkab atau <i>stakeholder</i> dikarenakan memerlukan mekanisme tersendiri dalam merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan antar lembaga belum terbangun secara optimal. 2. Dibutuhkan upaya atau Pola Koordinasi dan kolaborasi antar <i>Stakeholder</i> agar pelaksanaan hasil rekomendasi kajian kebijakan regulasi dapat ditindaklanjuti.	1. Perlu mendapat arahan, atensi dan disposisi dari Pimpinan dan Dewan Pengarah BPIP dalam hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Kajian Kebijakan Regulasi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 55 Perpres 7 Tahun 2018 tentang BPIP. 2. Perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hasil kajian nilai-nilai Pancasila
Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai	1. Belum adanya penguatan kelembagaan BPIP dalam bentuk Undang-Undang;	1. Perlu penguatan kelembagaan BPIP dengan mengupayakan agar RUU BPIP dibahas pada tahun 2025;

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Pancasila yang ditindaklanjuti	2. Belum adanya SOP dan Pedoman kriteria dalam melakukan analisis dan penyeselarasan terhadap rancangan produk hukum nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam implementasi pada program dan kegiatan masing-masing bidang di direktorat. 3. Belum terstrukturanya penyelenggaraan Penyeselarasan baik ditingkat pusat maupun di daerah	2. Perlu pembuatan SOP dan pedoman kriteria kinerja penyeselarasan rancangan peraturan perundang-undangan. 3. Perlu adanya kesepakatan konseptual antar <i>stakeholder</i> penyelenggara penyusunan peraturan perundang-undangan
Persentase rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Koordinasi antar lembaga belum terbangun secara optimal. 2. Belum ada sistem pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi. 3. Rekomendasi belum sepenuhnya masuk ke agenda kerja lembaga sasaran.	1. Menjalin kerja sama melalui PKS dengan instansi terkait. 2. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator. 3. Menyesuaikan substansi rekomendasi dengan prioritas program lembaga sasaran.
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Rekomendasi hasil kajian kebijakan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila tidak serta merta langsung ditindaklanjuti oleh K/L, Pemprov, Pemkot/Pemkab atau <i>stakeholder</i> dikarenakan memerlukan mekanisme tersendiri dalam merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan antar lembaga belum terbangun secara optimal. 2. Dibutuhkan upaya atau Pola Koordinasi dan kolaborasi antar <i>Stakeholder</i> agar pelaksanaan hasil rekomendasi kajian kebijakan regulasi	1. Perlu mendapat arahan, atensi dan disposisi dari Pimpinan dan Dewan Pengarah BPIP dalam hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Kajian Kebijakan Regulasi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 55 Perpres 7 Tahun 2018 tentang BPIP. 2. Perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hasil kajian nilai-nilai Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	dapat ditindaklanjuti.	

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- Untuk melaksanakan perpanjangan tugas Deputy bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagaimana diatur dalam organisasi dan tata kerja, perlu disusun arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam bentuk Peraturan BPIP;
- Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas analisis dan penyelarasan di Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
- Mendorong penyusunan pedoman pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila dalam bentuk Peraturan Badan, sebagai acuan normatif dan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan advokasi di seluruh tingkatan dan sektor. Kedua rekomendasi ini diharapkan memperkuat tata kelola serta efektivitas pelaksanaan advokasi ideologi Pancasila secara nasional;
- Mendorong disusunnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan mitra strategis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kajian dan advokasi pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan dan terarah; dan
- Mendorong tingkat Pimpinan dan melibatkan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal Menyusun format atau bentuk Surat Pengantar penyampaian Rekomendasi hasil Kajian Regulasi dan Kebijakan melalui tahap Deputy Bidang Hukum Advokasi dan

Pengawasan Regulasi ke Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan meminta arahan dan pertimbangan dari Ketua Dewan Pengarah BPIP

3. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 3 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan	1. Masih dilakukan penyusunan dokumen kajian sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	1. Melakukan penyusunan dokumen kajian sesuai tahapan penyusunan yang ditetapkan;
Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan	2. Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga. 3. Besarnya jumlah populasi guru sebagai narasumber uji keterbacaan sebagai sampling kajian 4. Kewenangan MKWK bukan pada BPIP 5. Besarnya jumlah perguruan tinggi sebagai sampling dosen pengampu pendidikan Pancasila 6. Terbatasnya narasumber/penulis standar materi yang memahami konteks 7. Kurangnya bahan materi yang sesuai dengan kebenaran sejarah	1. Melaksanakan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi sains dan Teknologi dan Kementerian/Lembaga terkait 2. Melaksanakan kegiatan di dalam kantor dengan melibatkan narasumber.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan	- Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga. - Besarnya jumlah populasi satuan Pendidikan dibawah lementerian agama (swasta) sebesar 52.350 satuan pendidikan sehingga tidak dapat menentukan lokus kajian dengan flesibilitas tinggi.	- Melaksanakan kolaborasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dasar dan menengah, Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kab/Kota, Balai Guru Penggerak, dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan. - Melaksanakan kegiatan di dalam kantor dengan melibatkan narasumber.
Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti	- Terdapat perubahan dan penambahan nomenklatur beberapa K/L seiring dengan bergantinya pemerintahan baru, sehingga dokumen Peta Jalan PIP perlu dilakukan penyesuaian kembali; - Pelibatan pemangku kepentingan lintas K/L dalam melakukan penyusunan kajian memerlukan waktu koordinasi yang cukup panjang; - Adanya perubahan standar akreditasi menuju SINTA 2 yang memerlukan persiapan dan dukungan lebih matang; - Penyusunan dokumen yang menjadi prioritas Lembaga sehingga memerlukan proses verifikasi dan validasi pimpinan yang memakan waktu cukup panjang	- Dilakukan verifikasi dan validasi ulang kepada K/L yang mengalami perubahan dan penambahan nomenklatur; - Mengefektif kan pembahasan substansi dalam setiap pertemuan antar pemangku kepentingan; - Melakukan persiapan teknis dan substantif dengan melibatkan <i>stakeholder</i> yang berkompeten terkait proses akreditasi menuju SINTA 2; - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja di BPIP terkait dengan penyusunan kajian

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga.	1. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Besarnya jumlah populasi satuan Pendidikan dibawah lementerian agama (swasta) sebesar 52.350 satuan pendidikan sehingga tidak dapat menentukan lokus kajian dengan flesibilitas tinggi.	1. Melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kab/Kota, Balai Guru Penggerak, dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan.

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program yaitu:

- Menyusun prioritas kegiatan didasarkan pada ketersediaan anggaran agar unit kerja tetap dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal;
- Komitmen bersama antar unit kerja dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kegiatan.
- Perlu dilakukan Kajian strategi Implementasi BTU Pendidikan Pancasila pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama pada tahun 2025, pada lingkup ekosistem satuan Pendidikan yang dikelola oleh swasta pada seluruh Jenjang Pendidikan (MI, MTs, MA/MAK).
- Perlu diambil Langkah Strategi dalam menyambut Tahun Ajaran Baru 2025/2026 yang jatuh pada Juli 2025, yakni Penerapan Buku Teks Utama (BTU) secara Nasional
- perlu sinergi dan kolaborasi Kemendikdasmen RI, Kemenag RI dan BPIP RI untuk memastikan Pendidikan Pancasila diterapkan sebagai muatan kurikulum dan mata Pelajaran wajib

4. Kendala dan rencana tindak lanjut Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 4 Kendala dan Tindak Lanjut Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi	Keterbatasan tim sekretariat dalam melakukan proses verifikasi dan validasi peserta.	Berkoordinasi secara internal untuk mendapatkan bantuan sumberdaya manusia dalam melakukan proses verifikasi dan validasi data peserta yang jumlahnya lebih dari 1.200 akun
Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi	Belum dilaksanakannya Diklat PIP oleh Lembaga penyelenggara Diklat PIP.	Melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti hasil akreditasi penyelenggara Diklat PIP.
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik	Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.	Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP dengan mengundang K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.
Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat	Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.	Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dengan mengundang K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.
Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	1. Perubahan tim asesor akreditasi penyelenggara Diklat PIP dikarenakan pensiun dan mutasi 2. Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024 tentang	1. Berkoordinasi dengan instansi tim asesor yang pensiun dan mutasi terkait pengganti tim asesor tersebut. 2. Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.	tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP dengan mengundang K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.
Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	Penyelenggaraan Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP belum secara optimal sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat PIP dan Keputusan Kepala BPIP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar dan Kurikulum Diklat PIP.	Melakukan koordinasi internal dan menyampaikan hasil evaluasi hasil Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP kepada Direktorat Penyelenggaraan Diklat.
Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila	1. Tidak semua daerah memiliki sinyal atau jaringan yang bagus, sehingga saat mengikuti diklat PIP banyak yang tidak berhasil menyelesaikan diklat dari awal sampai akhir sehingga tidak lulus diklat dan tidak bisa diangkat menjadi Duta Pancasila 2. Tidak semua Purnapaskibraka bersedia mengikuti diklat pembinaan Ideologi Pancasila untuk menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila 3. Purnapaskibraka sebelum tahun 2022 tidak dalam tanggungjawab BPIP dan Kesbangpol, sehingga agak sulit untuk melakukan pendataan terhadap Purnapaskibraka sebelum Tahun 2022 4. Purnapaskibraka ada yang sudah pindah domisili sehingga	1. Menyarankan agar Kesbangpol Kab/Kota dan Provinsi menghimpun Purnapaskibraka dalam 1 tempat yang memiliki sinyal bagus untuk memastikan semua Purnapaskibraka yang mengikuti diklat bisa menuntaskan dan menyelesaikan diklat PIP. 2. Bekerjasama dengan Kesbangpol di setiap kabupaten/kota dan provinsi agar terus mengingatkan peran Purnapaskibraka sebagai agen perubahan di tempat masing-masing 3. Menjalin hubungan baik dengan instansi-instansi yang pernah bertanggungjawab melakukan pembentukan Paskibraka agar lebih mudah dalam meminta basis data Purnapaskibraka

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	menyulitkan pihak Kesbangpol untuk menjangkau dan menginformasikan mengenai pelaksanaan Diklat PIP	sebelum tahun 2022. 4. Kesbangpol menjangkau melalui Purnapaskibraka di angkatannya
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila	Penyampaian laporan aktualisasi dari lulusan diklat terlambat disampaikan	1. Koordinasi intensif dengan para lulusan diklat melalui para penanggung jawab laporan 2. Usulan penambahan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Diklat PIP; 3. Kerja Sama penyelenggaraan diklat dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, baik Pusat dan Daerah melalui mekanisme <i>resource sharing</i>

Penyelenggaraan Diklat PIP pada Tahun 2025 menghadapi kendala-kendala dari aspek dukungan regulasi/kebijakan, keterbatasan sumber daya, sehingga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 dengan melakukan komunikasi strategis dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal BPIP dalam rangka kolaborasi/gotong royong dalam:

- a) Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b) Pengembangan dan penerapan kebijakan strategis dan program teknis untuk mewujudkan gotong royong kolaboratif, integratif, dan sinergis dalam pemanfaatan sumber daya (SDM, finansial, sarana prasarana, data informasi) antara BPIP dengan lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional bagi

aparatur negara, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;

- c) Pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP dan pelaksanaan PIP dalam Diklat calon Paskibraka;
- d) Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan
- e) Pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai standard dan kebutuhan
- f) Pengembangan sistem dan metode pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- g) Fasilitasi pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP serta sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP untuk mendorong penyelenggaraan Diklat PIP secara instansional di lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan
- h) Penyempurnaan Instrumen Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat PIP.

5. Kendala dan rencana tindak lanjut Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 5 Kendala dan Tindak Lanjut Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang	1. Belum tersedianya dokumen atau payung hukum yang dapat dijadikan pedoman resmi dalam pelaksanaan	1. Penyusunan dan Pengajuan Naskah Regulasi Pedoman Pengendalian dan metode

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
dimanfaatkan	pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). 2. Belum tersusunnya metode pengendalian program PIP secara baku dan terstandarisasi	pengendalian program PIP 2. Melaksanakan Konsultasi dan Harmonisasi dengan seluruh unit kerja di BPIP dalam bentuk Rapat Pengendalian PIP secara rutin 3. Konsultasi dan uji substansi dalam rangka penyempurnaan dokumen pedoman dan metode 4. Penerbitan dan Sosialisasi Regulasi Pengendalian Program PIP secara bertahap
Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	Belum terselesaikannya pedoman pengendalian dan evaluasi	1. Dilaksanakannya lintas koordinasi direktorat dan biro untuk membuat suatu pedoman yang menjadi dasar kegiatan pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila 2. Dilaksanakannya uji coba untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pedoman pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila
Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Belum ditetapkannya pedoman pengukuran Pelembagaan Pancasila dan Pengukuran IAP diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan BHO 2. Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga. 3. Masih adanya penyesuaian dan	1. Melakukan koordinasi untuk melakukan penyusunan pedoman pengukuran pelembagaan dan pengukuran IAP dengan BHO 2. Pembahasan lebih lanjut terkait metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	perubahan metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila, hal ini berdampak pada tahapan proses Pengukuran berikutnya 4. Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran, belum terdapatnya penganggaran pembangunan sistem informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila 5. Keterbatasan jumlah SDM pada Direktorat Pengukuran Pelembagaan	dengan melibatkan Lintas unit kerja dan melibatkan Pakar/Akademisi 3. Koordinasi lebih lanjut terkait perencanaan penganggaran sistem informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila 4. Permohonan penambahan SDM
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Belum tersedianya dokumen atau payung hukum sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Ketiadaan landasan hukum formal menyebabkan belum adanya kepastian regulatif yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan fungsi pengendalian. Hal ini turut menghambat proses penyusunan rekomendasi yang berbasis kebijakan secara sistematis dan kredibel. 2. Belum tersusunnya metode pengendalian program PIP secara terstandarisasi. Ketiadaan metode yang baku menyebabkan belum adanya kerangka teknis yang dapat dijadikan panduan	1. Menyusun dokumen kebijakan dalam bentuk Peraturan BPPI atau pedoman teknis yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian PIP. 2. Merancang metode pengendalian yang bersifat aplikatif dan dapat diterapkan secara menyeluruh, meliputi prosedur pelaksanaan, instrumen pengendalian, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut. 3. Melakukan konsolidasi dalam rangka penyampaian informasi secara aktif kepada seluruh unit kerja internal maupun mitra eksternal terkait fungsi dan mandat Direktorat Pengendalian. Ini dilakukan melalui forum koordinasi 4. Melakukan penguatan kapasitas tim pengendalian melalui pelatihan teknis, dan pendampingan agar mampu menjalankan peran pengendalian

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	dalam proses pengendalian. Akibatnya, pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan PIP berjalan tidak seragam dan kurang terdokumentasi secara konsisten. 3. Fungsi Pengendalian belum dianggap hal yang sangat penting oleh penerima manfaat	secara efektif dan adaptif. 5. Mendorong integrasi peran Direktorat Pengendalian dalam setiap tahapan pelaksanaan program PIP, agar pengendalian menjadi bagian integral dalam tata pelaksanaan program.
Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Belum tersedianya pedoman pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila	1. Dilaksanakannya koordinasi antar unit untuk membuat suatu pedoman yang menjadi dasar kegiatan pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila 2. Dilaksanakannya uji coba untuk pedoman pengendalian dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila
Persentase Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Belum ditetapkan pedoman pengukuran Pelembagaan Pancasila dan Pengukuran IAP diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan BHO 2. Masih adanya penyesuaian dan perubahan metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila, hal ini berdampak pada tahapan proses Pengukuran berikutnya. 3. Efisiensi anggaran di awal 2025 menyebabkan tertundanya pembangunan sistem informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila.	1. Melakukan koordinasi untuk melakukan penyusunan pedoman pengukuran pelembagaan dan pengukuran IAP dengan BHO 2. Pembahasan lebih lanjut terkait metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila dengan melibatkan Lintas unit kerja dan melibatkan Pakar/Akademisi 3. Koordinasi lebih lanjut terkait perencanaan penganggaran sistem

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	Relaksasi anggaran baru dilakukan pada April 2025, sehingga pelaksanaannya memerlukan waktu tambahan 4. Keterbatasan jumlah SDM pada Direktorat Pengukuran Pelembagaan 5. BPIP belum optimal dalam menyediakan dan mendiseminasikan data hasil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) kepada pemerintah daerah.	informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila 4. Permohonan penambahan SDM khususnya yang untuk JFT Ahli Madya 5. Perlunya pendistribusian data IAP secara terbuka, terstruktur, dan mudah diakses. Data tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan intervensi dalam menyusun kebijakan dan regulasi.

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan Sasaran Program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- Segera mensahkan Draft Pedoman Pengendalian menjadi Peraturan Badan agar Kedeputan Pengendalian dan Evaluasi memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Segera mensahkan metode pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- K/L, Pemda dan Perguruan Tinggi diharapkan dapat meningkatkan peran dari sebatas objek menjadi subjek dalam melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dirasakan oleh seluruh masyarakat luas;
- Penyelesaian Penyelesaian Pedoman Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan ditetapkan melalui regulasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Perlu Pembentukan POKJA evaluasi pelaksanaan PIP;
- Pembuatan Petunjuk Teknis pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila;

- g) Melakukan koordinasi intensif dengan unit kerja terkait guna mempercepat penyusunan dan penetapan pedoman resmi Pengukuran Pelembagaan Pancasila dan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) sebagai acuan pelaksanaan ke depan.
- h) Pembahasan metodologi secara kolaboratif dengan melibatkan unit kerja terkait, serta para akademisi atau pakar dalam rangka mereviu dan menyepakati metodologi pengukuran.
- i) Perencanaan penganggaran Sistem Informasi dengan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan unit kerja terkait untuk menyusun strategi penganggaran sistem informasi pengukuran.
- j) Melakukan uji coba awal terhadap sistem informasi sebelum implementasi penuh, guna memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berjalan secara optimal serta selaras dengan tujuan dan sasaran Pengukuran Pelembagaan Pancasila.
- k) Pengusulan penambahan dan pengembangan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan, guna mendukung optimalisasi kinerja serta percepatan pengisian formasi dalam peta jabatan yang telah ditetapkan dan menambah jabatan fungsional yang diperlukan.
- l) BPIP belum optimal dalam menyediakan dan mendiseminasikan data hasil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) kepada pemerintah daerah. Perlu pendistribusian data IAP secara terbuka, terstruktur, dan mudah diakses. Data tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan intervensi dalam menyusun kebijakan yang relevan dan berbasis pada data IAP yang selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN, termasuk sangat diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah /RPJMD. BPIP belum optimal dalam menyediakan dan mendiseminasikan data hasil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) kepada pemerintah daerah. Perlu pendistribusian data IAP secara terbuka,



terstruktur, dan mudah diakses. Data tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan intervensi dalam menyusun kebijakan yang relevan dan berbasis pada data IAP yang selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN, termasuk sangat diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah /RPJMD.

6. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Tabel 4. 6 Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Keterlambatan penyampaian dokumen usulan revisi anggaran dari unit kerja sehingga menghambat penerbitan dokumen revisi anggaran.	Perlu diadakan rapat bersama unit kerja tata cara revisi anggaran
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu keuangan	laporan keuangan 2024 audited sedang dalam proses penyusunan, kemarin terhambat akibat maintenance aplikasi SAKTI	Melakukan komunikasi dengan pihak terkait, seperti Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Penyampaian Laporan dari unit kerja melebihi waktu yang telah ditetapkan sehingga memperhambat dalam penyusunan laporan kinerja	Mengadakan rapat kepada unit kerja untuk menentukan penanggung jawab dalam penyusunan laporan kinerja
Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	RUU BPIP belum ada tindak lanjut dari Badan Legislasi DPR RI	Menunggu arahan Pimpinan BPIP
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	1. Renstra BPIP Tahun 2025-2029 belum terbit. Arah, kebijakan dan pencapaian organisasi kelembagaan belum dapat teridentifikasi; 2. Kategori kelembagaan yang masih belum jelas. Apakah masuk kedalam kelompok Kementerian/Lembaga atau setingkat kementerian. Hal ini membuat kendala dalam melakukan kajian organisasi dalam rangka penataan organisasi; 3. <i>Grand Design</i> RB Tahun 2025-2045 dan <i>Road Map</i> RB 2025-2029 belum ada. Arah, kebijakan dan pencapaian RB BPIP belum dapat ditentukan.	1. Melakukan koordinasi dan rapat intensif dengan Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian PAN RB; 3. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian PAN RB serta melakukan kaji banding dengan Kementerian/Lemba ga lainnya

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	1. Pemenuhan bukti dukung dalam proses penilaian masih belum maksimal khususnya mengenai implementasi aplikasi pengelolaan manajemen ASN baik pengelolaan manajemen talenta ataupun terkait kebijakan mengenai pengelolaan manajemen ASN di lingkungan BPIP 2. Belum dipenuhinya secara maksimal mengenai kebutuhan kualitas ASN meliputi Pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai 3. Salah satu indikator dalam indeks pengelolaan aset adalah mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk penghapusan yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak.	1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lemba ga terkait untuk memenuhi Sistem Merit di BPIP; 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kebutuhan pengembangan kompetensi dan pemenuhan data dukung proses penilaian dan pemenuhan indeks profesionalisme ASN; 3. Melakukan Penghapusan Barang Milik Negara yang telah dalam kondisi rusak berat untuk menunjang Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin.
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Kompetensi SDM Biro masih rendah;	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi atau Bimbingan Teknis
Nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik BPIP	Kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang dimaksud	Mengajukan permintaan SDM
Nilai pengawasan kearsipan	Pengawasan Kearsipan Internal, masih banyak Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik, hal tersebut karena BPIP belum memiliki SDM Kearsipan yang fokus untuk melakukan Pengelolaan arsip, dan BPIP belum memiliki NSPK Kearsipan yang menjadi syarat pelaksanaan kearsipan Internal	Melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	- Masih perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN serta memproses hasil inventarisasi peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya - Masih terdapat proses penghapusan BMN belum tertib - Masih Ada Pemilihan Jenis dan Lokus Diklat PIP Belum Dilakukan Sesuai Kebutuhan; - Masih Ada Diklat PIP Belum Sepenuhnya Diselenggarakan Sesuai dengan Perencanaan dan Kebutuhan; - Masih ada rekomendasi untuk Direktur Pelaksanaan Diklat supaya menetapkan jumlah peserta sesuai ketentuan dan menyelenggarakan tahapan pembelajaran diklat untuk semua Diklat PIP sesuai ketentuan	- Telah memberikan surat jawaban dari petugas pengelola BMN yang menyatakan kesediaan melaksanakan perintah Sestama untuk lebih tertib dalam proses penghapusan aset dan surat jawaban Kepala Subbag Manajemen BMN yang menyatakan kesediaan melaksanakan perintah Sestama untuk lebih tertib dalam proses penghapusan aset - Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan telah menyampaikan surat tanggapan tanggal 4 Juni 2024 atas membuat rekomendasi membuat analisis secara komprehensif dalam pemilihan jenis dan lokus. - Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan telah memberikan dokumen pemberian akreditasi kepada penyelenggara diklat PIP pada Pemda, Lembaga Negara dan K/L
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	Perolehan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPIP Tahun 2024 yang belum mencapai maksimal masih terdapat permasalahan pada unsur Penetapan Tujuan	Pelaksanaan reviu atas pengelolaan manajemen risiko di lingkungan BPIP dengan memperhatikan pada tahap penilaian risiko

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	sehingga berdampak ada kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis	berupa penetapan tujuan yang secara garis besar mengacu pada Keputusan Kepala BPIP nomor 28/2023 tentang proses bisnis. BPIP perlu segera menetapkan penentuan selera risiko oleh pemilik risiko pada unit kerja serta unit organisasi.
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	1. Keterbatasan SDM Teknis 2. Teknologi yang terus berkembang dengan cepat. 3. Terjadi serangan ransomware pada 20 Juni 2025 pada Pusat Data Nasional yang mengakibatkan aplikasi BPIP tidak dapat diakses	1. Perlu penambahan SDM Teknis 2. Perlu melakukan pengembangan kompetensi SDM 3. Melakukan rapat koordinasi untuk pembahasan langkah dan tindakan kedepannya

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan Sasaran Program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- a) Perlu adanya penguatan area perbaikan melalui koordinasi antar unit kerja dan/atau unit organisasi di lingkungan BPIP serta penguatan kompetensi APIP dalam rangka penilaian SPIP selaku tim penjamin kualitas;
- b) Pada tindak lanjut dari temuan BPK perlu adanya kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c) Perlu peningkatan koordinasi, komunikasi dan perhatian yang lebih dari para pengelola Keuangan (PPK) dalam penyediaan data Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa serta TP3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) sehingga data yang didapat menjadi representatif dalam menghasilkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh BPKP untuk pelaporannya kepada Presiden RI;

- d) Perlu adanya Pembuatan Timeline yang jelas mengenai pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas di BPIP sehingga sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang ditentukan oleh BPKP serta Pelaksanaan monitoring dan pendampingan secara berkala oleh Biro Pengawasan Internal atas penyampaian data dukung SPIP Terintegrasi sehingga proses Penilaian Mandiri oleh Manajemen tidak mengalami kendala;
- e) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, perlunya untuk BPIP melakukan monitoring beserta evaluasi secara berkala terhadap perencanaan kinerja sampai ke realisasi sehingga dapat memastikan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program, Target Kinerja mendukung Sasaran Strategis, Hal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan dokumentasi secara lebih tertib terhadap pelaksanaan monitoring tersebut.
- f) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala.
- g) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala.

- h) Pengelolaan arsip aktif pada beberapa Unit Kerja belum optimal, dan belum adanya NSPK Kearsipan sebagai syarat pelaksanaan kearsipan Internal. Oleh karena itu, tindak lanjut yang diusulkan mencakup identifikasi unit dengan performa kearsipan rendah, implementasi NSPK Kearsipan, serta evaluasi dampak pelatihan dan implementasi NSPK terhadap kinerja pengelolaan arsip aktif. Langkah-langkah tindak lanjut diarahkan pada penetapan jadwal rutin untuk pengawasan internal dan eksternal, dukungan tim pengawasan dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan, serta analisis mendalam terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi melibatkan pembentukan tim internal untuk memastikan pengawasan berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem manajemen mutu.
- i) Salah satu unsur penilaian Manajemen Risiko Indeks yakni adalah penguatan kompetensi penjaminan mutu dan kualitas pelaksanaan MRI melalui pelaksanaan sertifikasi pengelola risiko lingkup BPIP dengan kompetensi pelatihan serta bimbingan teknis Manajemen Risiko sektor Publik baik melalui penyelenggaraan BPKP maupun internal BPIP.
- j) Keamanan Administrasi, berupa Aset BMN untuk diberikan nomor urut pendaftaran barang inventaris, serta kelengkapan dokumen Aset pinjam berupa Berita Acara Serah Terimanya
- k) Diperlukan Kerja Sama dan sinergi dari semua unit kerja dan pegawai untuk mendukung peningkatan indeks maturitas SPBE tahun 2025. Dukungan dari pemangku kebijakan juga diperlukan untuk penguatan dari sisi regulasi dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan data dan informasi di lingkungan BPIP.

BAB V | PENUTUP

Kinerja BPIP harus lebih memberikan dampak dan manfaat dimasa-masa mendatang. Gerak langkah Aktualisasi Pancasila harus dapat sampai pada masyarakat, agar dapat memunculkan rasa percaya diri dan ketangguhan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Indikator kinerja BPIP harus dapat diukur agar Akuntabilitas Kinerja terjaga diiringi dengan pengelolaan anggaran yang makin bijaksana dan mengedepankan asas kepatutan.

SALAM PANCASILA!

Jakarta, 21 Juli 2025

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju



**BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA**

